



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KESEHATAN

Jl. Pasteur No. 25, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Telp : (022) - 4212800 - 4218372
Fax : (022) - 4236721 Website : www.diskes.jabarprov.go.id Email : diskes@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40171

KEPUTUSAN GUBERNUR
JAWA BARAT
NOMOR : 10639 /KS.01/SEKRE

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024-2026

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi pembangunan daerah bidang kesehatan untuk jangka waktu 2 (lima) tahun dimuat dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat 2024-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Rencana Strategis ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Gubernur Tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 juli 1950);
2. Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara RI nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / SDGs;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah dilakukan perubahan dengan permendagri Nomor 58 Tahun 2007 dan Permendagri No 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Jawa Barat

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat;
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 22);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 176 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
24. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.1751-Dinkes/2014 tentang Penetapan Fasilitasi Pelayanan Rujukan Tertinggi pada Wilayah Cakupan Rujukan Provinsi.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun.
- KETIGA : Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Mei 2023

an. GUBERNUR JAWA BARAT
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. R. NINA SUSANA DEWI, Sp.PK(K)., M.Kes., MMRS
Pembina Utama Madya
NIP. 19621203 198803 2 001



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Rabb Semesta Alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Dokumen Renstra ini dibuat sebagai tindak lanjut dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, yang menjadikan dasar bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk menyusun Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas bidang kesehatan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan di Jawa Barat.

Bandung, 31 Mei 2023

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat



dr. R. NINA SUSANA DEWI, Sp.PK (K)., M.Kes., MMRS

Pembina Utama Madya

NIP. 196212031988032001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI..... 2

DAFTAR AKRONIM..... 3

BAB I PENDAHULUAN 4

 1.1 Latar Belakang 4

 1.2 Dasar Hukum..... 4

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 7

 1.4 Sistematika Penulisan..... 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT 10

 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 10

 2.2 Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 21

 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 27

 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Jawa Barat..... 46

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT 48

 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat..... 48

 3.2 Telaahan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 51

 3.3 Telaahan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Kesehatan 54

 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 55

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 62

 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan 62

 4.2 Arah Pengembangan UPTD dan UOBK di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat..... 63

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 65

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN..... 68

 6.1 Program dan Kegiatan 68

 6.2 Pendanaan 99

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 105

BAB VIII PENUTUP 116





DAFTAR AKRONIM

- IKU = Indikator Kinerja Utama
- IKP = Indikator Kinerja Program
- LKIP = Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- RPD = Rencana Pembangunan Daerah
- RPJPD = Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- RPJMN = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- RS = Rumah Sakit
- RSUD = Rumah Sakit Umum Daerah
- Renstra = Rencana Strategis
- SPBE = Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- UOBK = Unit Organisasi Bersifat Khusus
- UPTD = Unit Pelaksana Teknis Daerah





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Jawa Barat di bidang kesehatan, yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan fungsi Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan pembangunan adalah sebagai instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi, menyediakan ukuran keberhasilan kinerja birokrasi dan menjadi acuan dalam penyusunan LKIP.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan berpedoman pada RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, RPJPD serta memperhatikan RPJMN. Selain itu, untuk menjaga sinkronisasi dan harmonisasi dengan berbagai level pemerintahan, Renstra Dinas Kesehatan juga memperhatikan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Kab/Kota agar kebijakan dan program prioritas yang dilaksanakan selaras dengan kebijakan pusat dan kabupaten/kota.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dilaksanakan dengan beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra Provinsi Jawa Barat.
2. Persiapan rancangan awal Renstra Provinsi Jawa Barat.
3. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
4. Pelaksanaan forum Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
5. Rumusan rancangan akhir Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
6. Penetapan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyusun RPD Tahun 2024-2026 sehingga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menindaklanjutinya dengan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 dengan tetap mengikuti kaidah penyusunan dokumen renstra sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Provinsi Jawa Barat 2024-2026, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.



19. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs;
21. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Peraturan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan penurunan Stunting;
24. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga;
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara pelayanan Publik;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan Bidang Kesehatan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
35. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;



40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2010, Nomor 22 Seri E);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2014, Nomor 12 Seri E);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
46. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
47. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kepesertaan dan Pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi Jawa Barat;
48. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Jawa Barat;
49. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat;
50. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 176 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
51. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
52. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
53. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai dokumen teknokratik yang berisi strategi dan arah kebijakan pembangunan Kesehatan di Jawa Barat.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja serta perencanaan penganggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;



- 2. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif berdasarkan basis data capaian kinerja;
- 3. Mewujudkan perencanaan pembangunan kesehatan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta provinsi perbatasan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, dan mengemukakan keterkaitan Renstra dengan Rencana Pemerintah Daerah 2024-2026, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra serta garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

Pada BAB ini menguraikan tentang kedudukan dan tugas pokok, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Jawa Barat. Memuat Data dan Informasi kondisi terakhir tentang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat , yang memuat antara lain:

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Kesehatan Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Struktur Organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal (sarana dan prasarana) dan unit kerja di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Kinerja Pelayanan menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya, SPM, atau indikator lainnya seperti SDGs.





2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Kesehatan Kab/Kota yang dapat berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Barat pada 3 (tiga) tahun ke depan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

Pada BAB ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan, arah kebijakan bidang Kesehatan pada RPD, telaahan Renstra K/L dan provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, Renstra Perangkat Daerah, serta Isu- isu strategis baik Internasional, Nasional dan Daerah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan isu strategis Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Informasi yang dimuat pada BAB ini secara rinci meliputi:

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas;
- 3.2. Arah Kebijakan Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam RPD Tahun 2024-2026
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kesehatan Kab/Kota;
- 3.4. Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada BAB ini diuraikan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan serta strategi dan kebijakan rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi penjelasan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagai instrumen penjabaran dan pelaksanaan tujuan, strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

BAB ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Kesehatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB ini menguraikan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026 serta penutup.

LAMPIRAN





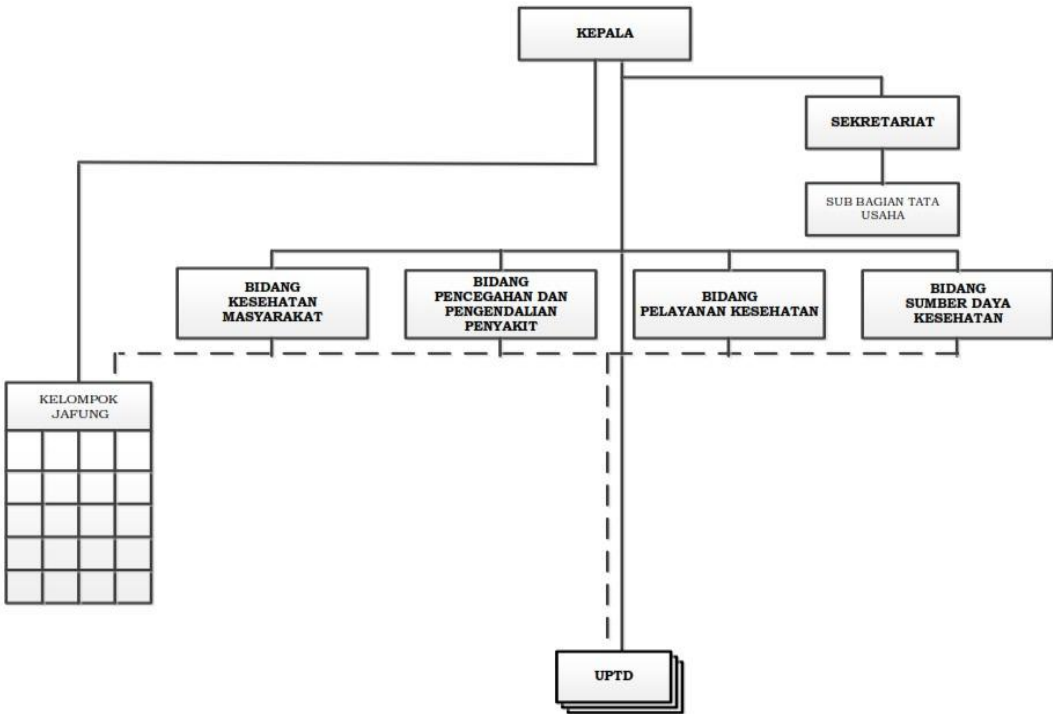
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan merupakan dinas yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memiliki 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan termasuk rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai UPT Dinas Kesehatan yang bersifat fungsional. Untuk itu sejak tahun 2017 RS Al Ihsan, RS Jiwa, RS Paru, RS Pameungpeuk dan RS Jampangkulon menjadi UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Adapun Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, meliputi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan bidang kesehatan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas; dan
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Jawa Barat
Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022



A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Dinas:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Kepala Dinas:

- a. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- c. Menyelenggarakan fasilitasi kesehatan masyarakat, meliputi regulasi dan pembinaan;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- e. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan kesehatan, meliputi regulasi dan pembinaan;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi sumber daya kesehatan, meliputi regulasi dan pembinaan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis bidang kesehatan;
- h. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang kesehatan;
- i. Menyelenggarakan kerja sama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri dalam bidang kesehatan;
- j. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
- k. Menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, dan PK, LKIP, LKPJ, LPPD, dan LHKASN lingkup Dinas;
- l. Menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
- m. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- n. Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- o. Menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, menyampaikan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kesehatan;
- p. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. Menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- r. Memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- s. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- t. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- u. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Sekretariat Dinas

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan bidang-bidang.

**Fungsi Sekretariat:**

- a. Penyelenggaraan koordinasi, menghimpun, dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- b. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset, kepegawaian dan umum;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Sekretariat:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
- b. Menyelenggarakan koordinasi, pengkajian, dan menghimpun bahan kebijakan teknis bidang kesehatan, yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset Dinas;
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD;
- f. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan, dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- g. Menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan Dinas, dan UPTD;
- h. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- i. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPa, dan PK, serta LKIP, LKPJ, LPPD, dan LHKASN lingkup Dinas;
- j. Menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
- k. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- l. Menyelenggarakan administrasi Dinas;
- m. Menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- n. Menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesehatan;
- o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai kesekretariatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
- r. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat UPTD;
- s. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
- t. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan:

- a. Subbagian Tata Usaha



C. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan aspek kesehatan masyarakat, meliputi kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan lingkungan serta kesehatan kerja dan olah raga.

Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat:

- a. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis kesehatan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan dan fasilitasi kesehatan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang Kesehatan Masyarakat:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis kesehatan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis bidang kesehatan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan pembinaan kesehatan keluarga dan gizi;
- e. Menyelenggarakan fasilitasi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Menyelenggarakan pembinaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- g. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan kesehatan masyarakat;
- h. Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
- i. Menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kesehatan masyarakat;
- j. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai kesehatan masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- l. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat;
- m. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- n. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Kesehatan Masyarakat;
- o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

D. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, aspek pencegahan dan pengendalian penyakit, meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. Penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;



- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. Menyelenggarakan pembinaan surveilans dan imunisasi;
- e. Menyelenggarakan pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- f. Menyelenggarakan pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- g. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- h. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- i. Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- j. Menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- k. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- m. Menyelenggarakan seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- n. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- o. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- p. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

E. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, aspek pelayanan kesehatan, meliputi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, pelayanan rujukan dan mutu pelayanan kesehatan.

Fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan dan fasilitasi pelayanan kesehatan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang Pelayanan Kesehatan:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis bidang pelayanan kesehatan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional;
- e. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan rujukan;
- f. Menyelenggarakan pembinaan mutu pelayanan kesehatan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan;
- h. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- i. Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan;



- j. Menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pelayanan kesehatan;
- k. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- m. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan;
- n. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- o. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- p. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

F. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, aspek sumber daya kesehatan, meliputi kefarmasian dan alat kesehatan, pembiayaan dan jaminan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis sumber daya kesehatan;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan dan fasilitasi sumber daya kesehatan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan, yaitu:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang sumber daya kesehatan;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang sumber daya kesehatan;
- d. Menyelenggarakan kefarmasian dan alat kesehatan;
- e. Menyelenggarakan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- f. Menyelenggarakan sumber daya manusia kesehatan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis pelaksanaan pengelolaan sumber daya kesehatan;
- h. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan sumber daya kesehatan;
- i. Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- j. Menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang sumber daya kesehatan;
- k. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai sumber daya kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- m. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- n. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang;
- o. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
- p. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

G. Kelompok Jabatan Fungsional



- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk.
- d. Jenis dan jenjang Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- f. Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- h. Hasil pelaksanaan tugas Tenaga Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Dinas.

H. UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

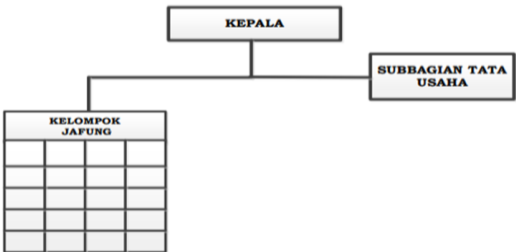
Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan untuk pelayanan kepada masyarakat, telah dibentuk UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Pembentukan dan Susunan serta Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

H.1. UPTD Laboratorium Kesehatan (Labkes)

UPTD Labkes mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas/badan bidang pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan, meliputi subbagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, UPTD Labkes memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang UPTD Laboratorium Kesehatan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Laboratorium Kesehatan;
- d. Penyelenggaraan fungsi lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan

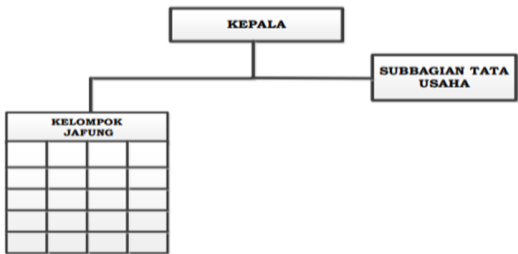
H.2. UPTD Pelatihan Kesehatan (Upelkes)

UPTD Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas bidang teknis penunjang pelatihan kesehatan, meliputi Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pelatihan Kesehatan. Upelkes dalam melaksanakan tugas pokoknya, memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang UPTD Pelatihan Kesehatan;



- b. Penyelenggaraan pelatihan kesehatan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pelatihan Kesehatan;
- d. Penyelenggaraan fungsi lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan

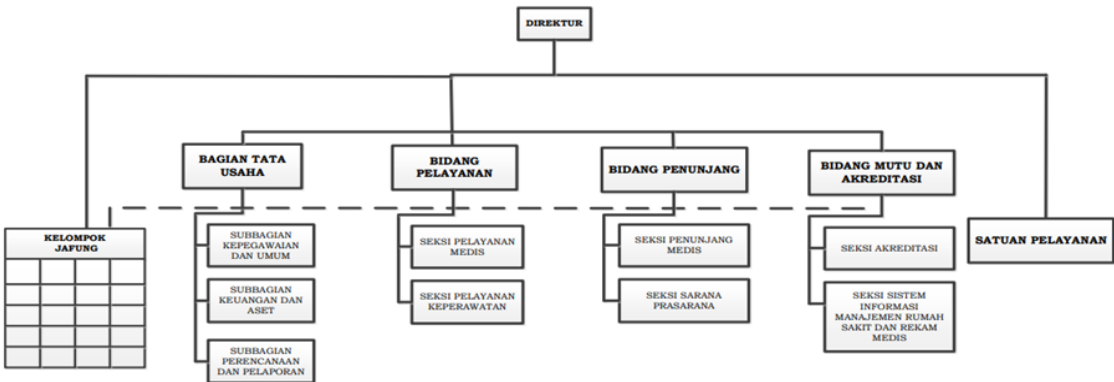
H.3. UOBK RSUD Pameungpeuk Garut

UOBK RSUD Pameungpeuk Garut berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional, bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, dipimpin oleh seorang direktur, serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

UOBK RSUD Pameungpeuk Garut mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/penunjang bidang rumah sakit, meliputi kepegawaian dan umum, perencanaan dan informasi, keuangan, pelayanan Kesehatan, penunjang medis dan non medis, serta mengensalikan tugas pokok dan fungsi UOBK RSUD Pameungpeuk Garut.

UOBK RSUD Pameungpeuk dalam melaksanakan tugas pokoknya memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis UOBK RSUD Pameungpeuk Garut
- b. Penyelenggaraan UOBK RSUD Pameungpeuk Garut meliputi kepegawaian dan umum, perencanaan dan informasi, keuangan, pelayanan Kesehatan, penunjang medis dan non medis;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UOBK RSUD Pameungpeuk Garut;
- d. Penyelenggaraan fungsi lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.



Gambar 2.4 Struktur Organisasi UOBK RSUD Pameungpeuk Garut

H.4. UOBK RS Paru

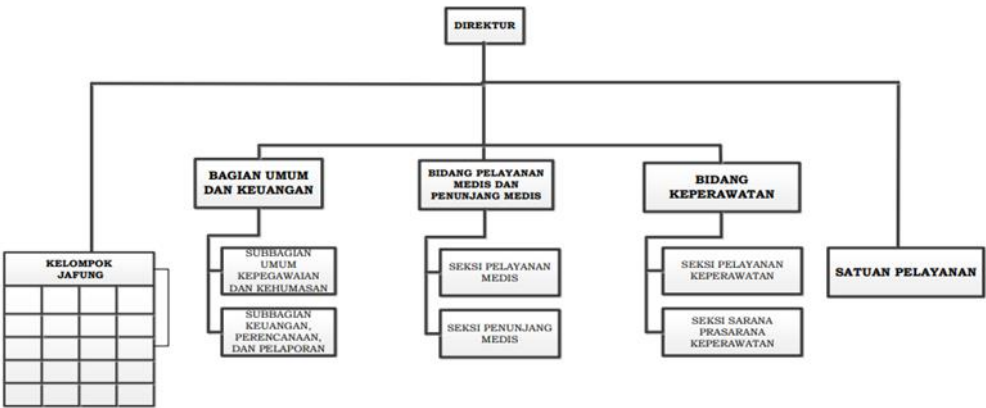
UOBK RS Paru mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pelayanan kesehatan, meliputi perumusan kebijakan teknis serta memberikan pelayanan kesehatan paru secara paripurna.

Dalam Menyelenggarakan tugas pokok, UOBK RS Paru mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan Paru;



- b. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pelayanan kesehatan, meliputi penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan paru sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paru yang paripurna, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan paru, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan paru dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UOBK RS Paru; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



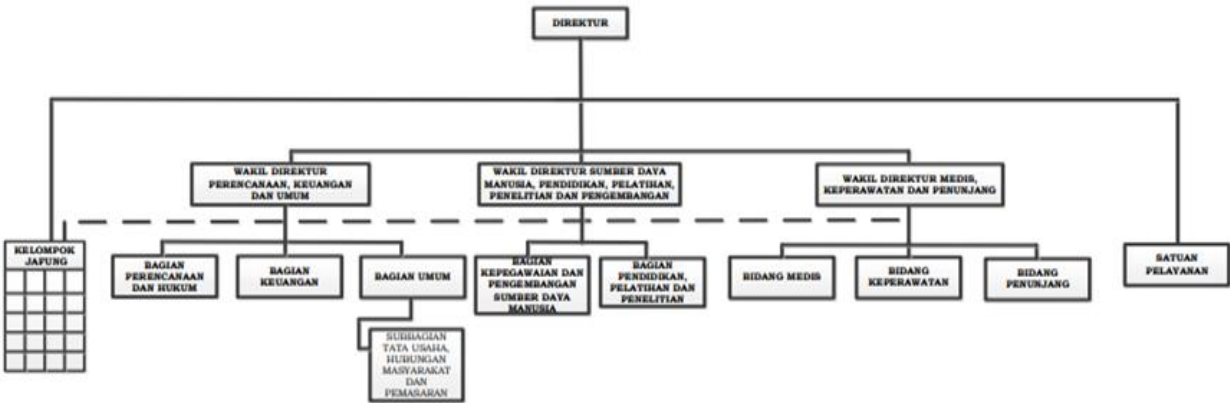
Gambar 2.4 Struktur Organisasi UOBK RS Paru

H.5. UPTD RS Jiwa

UPTD RS Jiwa mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta memberikan pelayanan Kesehatan khusus jiwa perorangan secara paripurna.

UPTD RS Jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan Kesehatan khusus jiwa;
- b. Penyelenggaraan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif Kesehatan khusus jiwa sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- c. Pemeliharaan dan peningkatan Kesehatan perorangan melalui pelayanan Kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan media;
- d. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan khusus jiwa;
- e. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang Kesehatan khusus jiwa
- f. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Gambar 2.5 Struktur Organisasi UPTD RS Jiwa

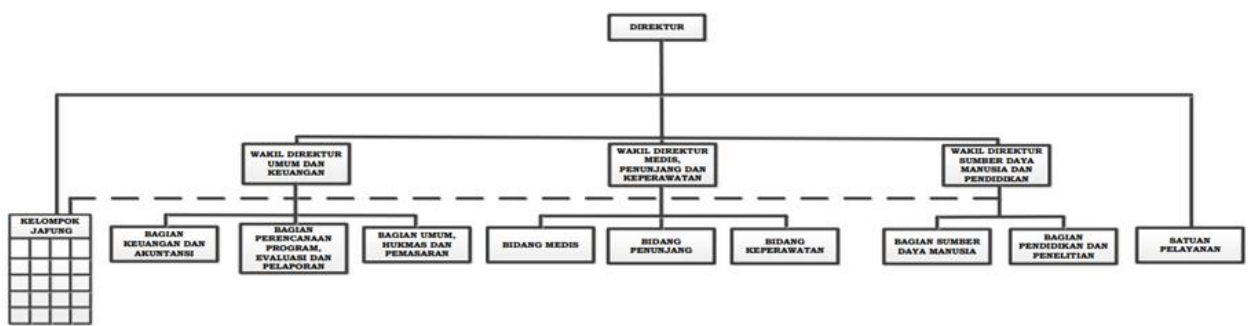


H.6. UOBK RSUD AI Ihsan

UOBK RSUD AI Ihsan mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta memberikan pelayanan Kesehatan umum secara paripurna.

UOBK RSUD AI Ihsan dalam melaksanakan tugas pokoknya memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan Kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi bidang pelayanan Kesehatan meliputi medis, penunjang dan keperawatan serta sumber daya manusia dan Pendidikan;
- c. Penyelenggaraan administrasi meliputi aspek umum dan keuangan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi pelayanan Kesehatan;
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan monitoring, penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah provinsi di bidang pelayanan Kesehatan;



Gambar 2.6 Struktur Organisasi UOBK RSUD AI Ihsan

H.7. UOBK RSUD Jampangkulon Sukabumi

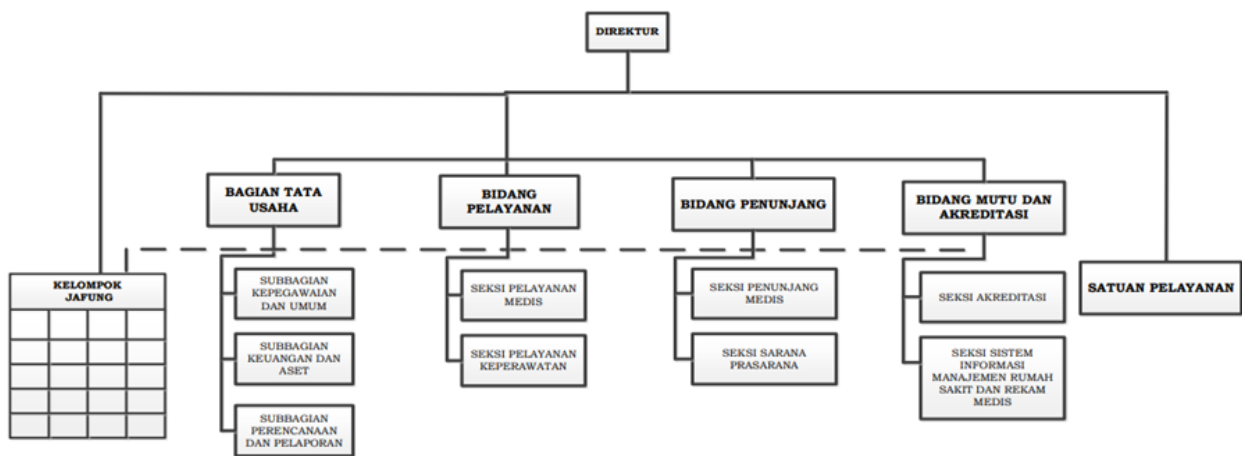
RSUD Jampangkulon Sukabumi berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional, bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, dipimpin oleh seorang direktur, serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

RSUD Jampangkulon Sukabumi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan Kesehatan, meliputi preventif, promotif dan kuratif.

UOBK RSUD Jampangkulon dalam melaksanakan tugas pokoknya memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis UOBK RSUD Jampangkulon;
- b. Penyelenggaraan UOBK RSUD Jampangkulon meliputi kepegawaian dan umum, perencanaan dan informasi, keuangan, Pelayanan Kesehatan, Penunjang Medis dan Non Medis;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UOBK RSUD Jampangkulon;
- d. Penyelenggaraan fungsi lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.





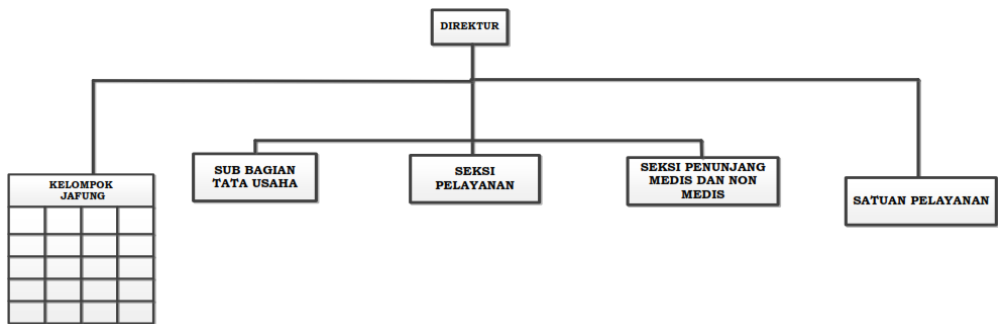
Gambar 2.7 Struktur Organisasi UOBK RSUD Jampangkulon Sukabumi

H.8. UPTD RSUD Kesehatan Kerja

UPTD RSUD Kesehatan Kerja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang Rumah Sakit meliputi Keuangan, Kepegawaian dan Umum, Perencanaan dan Informasi, Pelayanan dan Penunjang serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD RSUD Kesehatan Kerja.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, UPTD RSUD Kesehatan Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis UPTD RSUD Kesehatan Kerja;
- b. penyelenggaraan UPTD RSUD Kesehatan Kerja meliputi Keuangan, Kepegawaian dan Umum, Perencanaan dan Informasi, Pelayanan dan Penunjang;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD RSUD Kesehatan Kerja; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Gambar 2.8 Struktur Organisasi UPTD RSUD Kesehatan Kerja



2.2 Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

No.	BAGIAN BIDANG	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1.	KEPALA DINAS	1	Dokter, S1
2.	SEKRETARIS	1	S3 Pendidikan
	Staf	47	S2 = 6 orang S1/D4 = 26 orang D3 = 4 orang SMA = 8 orang
3.	Kelompok Jabatan Fungsional	9	S2
4.	SUBBAGIAN		
	Kepala Subbagian Tata Usaha	1	Ekonomi S1
	Staf	24	S1/D4 = 12 orang D3 = 12 orang
5.	BIDANG	4	
a.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	1	Dokter Gigi, S2
	Staf	31	S2 = 5 orang S1/D4 = 24 orang SMA = 2 orang
b.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Dokter, S2
	Staf	32	S2 = 9 orang S1/D4 = 17 orang D3 = 4 orang SMA = 2 orang
c.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	1	Dokter Gigi, S2
	Staf	21	S2 = 4 orang S1/D4 = 11 orang D3 = 5 orang SMA = 2 orang
d.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	1	Dokter Gigi, S2
	Staf	27	S2 = 10 orang S1/D4 = 9 orang D3 = 4 orang SMA = 4 orang

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2023

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia UPTD Laboratorium Kesehatan

No.	BAGIAN BIDANG/UPT	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1.	KEPALA	1	Dokter, S2
2.	SUBBAGIAN		
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	1	S1
	b. Kelompok Jabatan Fungsional	59	S2 = 7 orang S1/D4 = 16 orang D3 = 29 orang SMA = 7 orang

Sumber: UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia UPTD Pelatihan Kesehatan

No.	BAGIAN BIDANG/UPT	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1.	KEPALA	1	S2 Kesehatan
2.	SUBBAGIAN		
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	1	S2 Kesehatan
3.	JABATAN FUNGSIONAL	16	S2 = 12 orang S1/D4 = 3 orang D3 = 1 orang
	JABATAN PELAKSANA	21	S2 = 2 orang S1/D4 = 6 orang D3 = 2 orang SMA = 10 orang SMP = 1 orang

Sumber: UPTD Pelatihan Kesehatan Tahun 2022



Tabel 2.4 Sumber Daya Manusia UOBK RSUD Pameungpeuk

No.	BAGIAN BIDANG/UPT	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1.	DIREKTUR	1	Dokter, S2
A.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	1	S2
	1. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	1	S1
	2. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	1	S1
	3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	0	
	Staf	7	S1/D4 = 5 orang D3 = 1 orang SMA = 1 orang
B.	KEPALA BIDANG PELAYANAN	0	-
	1. Kepala Seksi Pelayanan Medis	1	S2
	2. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	1	D3
	Staf	34	S1/D4 = 20 orang D3 = 14 orang
C.	KEPALA BIDANG PENUNJANG	1	S1
	1. Kepala Seksi Penunjang Medis	1	S2
	2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	1	S2
	Staf	16	S1/D4 = 8 orang D3 = 7 orang D1 = 1 orang
D.	KEPALA BIDANG AKREDITASI DAN MUTU	1	S1
	1. Kepala Seksi Akreditasi	1	S1
	2. Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Rekam Medis	1	S1
	Staf	2	D3 = 2 orang

Sumber: UOBK RSUD Pameungpeuk

Tabel 2.5 Sumber Daya Manusia UPTD RSUD Kesehatan Kerja

No.	BAGIAN BIDANG/UPT	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1.	DIREKTUR	1	Dokter, S3
	Staf	35	S2 = 20 orang S1/D4 = 15 orang
A.	KEPALA SUBBAG TATA USAHA	1	S2
	Staf	21	S1 = 8 orang D3 = 3 orang SMA = 10 orang
B.	KEPALA SEKSI PELAYANAN	1	S2
	Staf	73	S2 = 9 orang S1 = 24 orang D3 = 40 orang
C.	KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS	1	S2
	Staf	36	S2 = 2 orang S1/D4 = 6 orang D3 = 27 orang SMA = 1 orang

Sumber: UPTD RSUD Kesehatan Kerja



Tabel 2.6 Sumber Daya Manusia UPTD RS Paru

No.	BAGIAN BIDANG/UPT	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1.	DIREKTUR	1	Dokter, S2
A.	KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	1	S2
	1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kehumasan	1	S2
	Staf	17	S1 = 7 orang D3 = 2 orang SMA = 7 orang SMP = 1 orang
	2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	1	S2
	Staf	20	S2 = 1 orang S1/D4 = 10 orang D3 = 5 orang SMA = 4 orang
B.	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	1	S1
	1. Kepala Seksi Pelayanan Medis	1	S2
	Staf	20	S2 = 2 orang S1/D4 = 15 orang D3 = 1 orang SMA = 2 orang
	2. Kepala Seksi Penunjang Medis	1	S2
	Staf	73	S1/D4 = 23 orang D3 = 39 orang SMA = 9 orang SMP = 2 orang
C.	KEPALA BIDANG KEPERAWATAN	1	S2
	Staf	8	S1/D4 = 8 orang
	1. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	1	S1
	Staf	66	S1/D4 = 17 orang D3 = 49 orang
	2. Kepala Seksi Sarana-Prasarana Keperawatan	1	S2

Sumber: Profil UPTD RS Paru



Tabel 2.7 Sumber Daya Manusia UPTD RS Jiwa

No.	BAGIAN BIDANG/UPT	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1.	DIREKTUR	1	Dokter Spesialis, S2
2.	WAKIL DIREKTUR PERENCANAAN, KEUANGAN DAN UMUM	0	-
A.	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN HUKUM	1	S2
	Staf	10	S2 = 1 orang S1/D4 = 8 orang D3 = 1 orang
B.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	1	S1
	Staf	17	S1/D4 = 2 orang D3 = 5 orang SMA/SMK = 10 orang
C.	KEPALA BAGIAN UMUM	1	S2
	Kepala Subbagian Tata Usaha	0	-
	Staf	40	S1/D4 = 11 orang D3 = 14 orang D1 = 1 Orang SMA/SMK = 14 orang
3.	WAKIL DIREKTUR MEDIK, KEPERAWATAN DAN PENUNJANG	1	Dokter Spesialis, S2
A.	KEPALA BIDANG MEDIK	1	Dokter, S2
	Staf	42	S3 = 1 S2 = 18 orang S1/D4 = 13 orang SMA/SMK = 2 orang D3 = 7 orang D3 PPPK = 1 orang
B.	KEPALA BIDANG KEPERAWATAN	1	S1
	Staf	196	S2 = 5 orang S1/D4 = 65 orang S1/D4 PPPK = 8 orang D3 = 77 orang D3 PPPK = 35 orang SMA/SMK = 6 orang
C.	KEPALA BIDANG PENUNJANG	1	S2
	Staf	77	S2 = 3 orang S1/D4 = 23 orang D3 = 34 orang SMA/SMK = 11 S1/D4 PPPK = 1 orang D3 PPPK = 5 orang
4.	WAKIL DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN, PELATIHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	S2
A.	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	1	S2
	Staf	8	S2 = 2 orang S1/D4 = 4 orang D3 = 1 orang SMA/SMK = 1 orang
B.	KEPALA BAGIAN PENDIDIKAN, PELATIHAN & PENELITIAN	1	S2
	Staf	4	S2 = 3 orang S1/D4 = 1 orang

Sumber: Profil UPTD RS Jiwa



Tabel 2.8 Sumber Daya Manusia UOBK RSUD Al-Ihsan

No.	BAGIAN BIDANG/UPT	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1.	WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN	1	S2
A.	BAGIAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI	1	S2
	1. SUBBAGIAN KEUANGAN	1	S1
	Staf	19	S1/D4 = 9 orang D3 = 1 orang SMA = 9 orang
	2. SUBBAGIAN AKUNTANSI	1	S1
	Staf	7	S1/D4 = 1 orang SMA = 6 orang
B.	BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PELAPORAN	1	S2
	Staf	3	S2 = 1 S1/D4 = 1 orang D3 = 1 orang
C.	BAGIAN UMUM, HUMAS DAN PEMASARAN	1	S2
	Staf	15	S2 = 1 S1/D4 = 4 orang D3 = 10 Orang
	3. SUBBAGIAN TATA USAHA	1	S2
	Staf	1	S1/D4 = 1 orang
2.	WAKIL DIREKTUR MEDIS, PENUNJANG DAN KEPERAWATAN	1	S2
	Staf	7	S2
A.	KEPALA BIDANG PENUNJANG	1	S2
	Staf	113	S2 = 1 Orang S1/D4 = 18 orang D3 = 94 orang
B.	KEPALA BIDANG MEDIS	1	S1
	Staf	72	S2 = 32 orang S1/D4 = 40 orang
C.	KEPALA BIDANG KEPERAWATAN	1	S1
	Staf	222	S3 = 1 orang S2 = 1 orang S1/D4 = 33 orang D3 = 186 orang SMP = 1 orang
3.	WAKIL DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENDIDIKAN	1	S2
A.	BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA	2	S2
	Staf	5	S2 = 1 orang S1/D4 = 3 orang SMA = 1 orang
B.	BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN	1	S2
	Staf	3	S2 = 1 orang S1/D4 = 2 orang

Sumber: Profil UOBK RSUD Al-Ihsan



Tabel 2.9 Sumber Daya Manusia UOBK RSUD Jampangkulon

No.	BAGIAN BIDANG/UPT	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1.	Direktur	ASN: 1	Dokter, S2
A.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	ASN: 1	S2
	1. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	ASN: 1	S2
	Staf	ASN: 1 NON ASN = 3	ASN S2 = 1 Orang NON ASN SMA = 1 orang DIII = 2 orang
	1. Kepala Subbagian Keuangan dan aset	ASN: 1	S2
	Staf	ASN: 14 NON ASN = 26	ASN S1/D4 = 12 orang D3 = 2 orang NON ASN SMA = 2 orang DIII = 9 orang S1 = 15 orang
	3. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	ASN: 1	S1
	Staf	ASN: 14 NON ASN = 28	ASN S1/D4 = 6 orang D3 = 2 orang SMA = 6 orang NON ASN SMA = 14 orang DIII = 4 orang S1 = 10 orang
B.	KEPALA BIDANG PELAYANAN	ASN:1	S1
	1. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	ASN: 1 NON ASN = 102	S2 = 1 NON ASN DIII = 72 orang S1 = 30 orang
	Staf	ASN: 186 NON ASN	ASN S1/D4 = 65 orang D3 = 121 orang NON ASN
	2. Kepala Seksi Pelayanan Medis	Kosong	Kosong
	Staf	ASN: 19 NON ASN = 35	ASN S2 = 1 Sp = 4 S1/D4 = 13 orang D3 = 1 orang NON ASN SMA = 9 orang S1 = 12 orang Sp = 14 orang
C.	KEPALA BIDANG PENUNJANG	1	S2
	1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	1	S1
	Staf	ASN: 14 NON ASN = 54	ASN S1/D4 = 3 orang D3 = 7 orang SMA = 3 orang SD = 1 orang NON ASN SMP = 3 orang SMA = 44 orang DIII = 4 orang S1 = 3 orang
	2. Kepala Seksi Penunjang Medis	ASN: 1	S2
	Staf	ASN: 41 NON ASN = 72	ASN S1/D4 = 9 orang D3 = 30 orang SMA = 1 orang SMP = 1 orang NON ASN SMA = 24 orang DIII = 14 orang S1 = 34 orang
D.	KEPALA BIDANG MUTU DAN AKREDITASI	1	S2
	1. Kepala Seksi Akreditasi	1	S2
	Staf	ASN:5 NON ASN = 8	ASN S2 = 1 orang S1/D4 = 4 orang NON ASN DIII = 1 orang S1 = 7 orang
	2. Kepala Seksi SIM RS dan Rekam Medis	1	S1
	Staf	ASN: 17 NON ASN =50	ASN S1 = 8 orang D3 = 9 orang NON ASN SMA = 10 orang DIII = 8 orang S1 = 32 orang

Sumber: Profil UOBK RSUD Jampangkulon



B. Sarana dan Prasarana

Data sarana dan prasarana pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat terangkum pada komponen Aset tetap berupa luas bangunan dan tanah, kendaraan roda-2, roda-4 dan kendaraan khusus (*ambulance*, Jenazah dll). Dengan gambaran sebagai berikut:

Tabel 2.10 Daftar Kendaraan pada Dinas Kesehatan dan UPT Tahun 2022

No.	Dinas/UPT	Kendaraan Roda-2		Kendaraan Roda-4				Jumlah
		Operasiona l	Khusus	Operasiona l (Mini bus + Pick up)	Ambulance	Jenazah	Khusus Lainnya	
1	Dinas Kesehatan	62	0	33	0	0	2	97
2	UPTD Pelatihan Kesehatan	4	0	3	0	0	0	7
3	RS Jiwa	28	0	14	5	1	12	60
4	RSUD Al Ihsan	11	0	20	6	2	1	40
5	RSUD Kesehatan Kerja	7	0	7	2	0	0	16
6	RS Paru	15	0	13	8	1	1	38
7	UPTD Laboratorium Kesehatan	4	0	9	0	0	0	13
8	RSUD Jampang Kulon	8	0	19	8	2	3	40
9	RSUD Pameungpeuk	3	0	11	4	0	0	18
Jumlah		143	0	149	28	5	7	332

Tabel 2.11 Daftar Asset Tetap Pada Dinas Kesehatan dan UPT Tahun 2022

No.	Dinas/UPT	Aset Bangunan		Aset Tanah	
1	Dinas Kesehatan	17.951	m ²	6.762	m ²
2	UPTD Pelatihan Kesehatan	5.711	m ²	2.820	m ²
3	RS Jiwa	35.099	m ²	Cisarua: 232.890 Grha Atma: 1860	m ²
4	RSUD Al Ihsan	62.585	m ²	45.360	m ²
5	RSUD Kesehatan Kerja	9.427	m ²	56.028	m ²
6	RS Paru	16.305	m ²	112.820	m ²
7	UPTD Laboratorium Kesehatan	8.038	m ²	6.662	m ²
8	RSUD Jampang Kulon	19.565	m ²	106.569	m ²
9	RSUD Pameungpeuk	24.000	m ²	324.209	m ²
Jumlah		184.666	M2	m ²	m ²

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan digambarkan melalui capaian kinerja berdasarkan sasaran atau target Renstra periode 2018-2023 yang dikelompokkan menjadi dua indikator kinerja yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu capaian indikator *impact* dan Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu capaian indikator *outcome* dari upaya pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi capaian suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja paling sedikit bersifat jelas, dapat diukur secara periodik, dapat dicapai, mempunyai relevansi, dan akurat.

Selain IKU dan IKP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dijelaskan juga capaian-capaian indikator yang mendukung kinerja pelayanan yaitu SPM Bidang Kesehatan, Program Unggulan Kesehatan Juara dan capaian SDG's.

Capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut.



Tabel 2.12 Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Satuan	Target Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A. INDIKATOR TUJUAN																				
1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,0 - 72,0	73,67 - 74,87	72,77 - 73,07	73,06	73,09	73,11	72,47	72,85	73,04	73,23	73,52	-	100	98,88	100	100,23	100,58	-
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA																				
1	Persentase pelayanan SPM di Kabupaten / Kota	%	N/A	N/A	N/A	67,63	68,92	70,58	N/A	N/A	N/A	73,7	85,34	-	N/A	N/A	N/A	108,97	123,82	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan UPTD	%	N/A	N/A	N/A	81,26-81,75	81,76-82,25	82,26-83,75	N/A	N/A	N/A	81,99	88,65	-	N/A	N/A	N/A	100,89	108,42	-
3	Jumlah RS Provinsi yang terakreditasi paripurna	%	N/A	N/A	N/A	3	3	4	N/A	N/A	N/A	3	4	-	N/A	N/A	N/A	100	133	-
4	Prevalensi Stunting	%	N/A	0,272	0,252	0,232	0,212	0,192	N/A	0,2621	0,2621	0,245	0,202	-	N/A	103,78	96,15	94,69	104,95	-
5	Ratio Kematian Ibu	100.000 KH	87	86	85	84	83	82	79,68	70,06	85,77	151,77	83,57	-	109,18	122,75	99,1	67,68	99,31	-
6	Ratio Kematian bayi	1.000 KH	5,8	5,2	5	4,8	4,6	4,4	3,4	3,26	3,18	2,94	3,54	-	160,71	159	157	163	129	-
7	Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	%	55	75	80	N/A	N/A	-	67,95	72,39	82,49	N/A	N/A	-	123,54	96,52	103,11	N/A	N/A	-
8	Persentase Kab/Kota dengan Cakupan Rumah Tangga ber PHBS >60%	%	N/A	40,7	51,9	N/A	N/A	-	N/A	48,1	59,25	N/A	N/A	-	N/A	118	114	N/A	N/A	-
9	Angka keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Succes Rate)	%	0,88	0,89	0,9	N/A	N/A	-	0,87	0,697	0,7316	N/A	N/A	-	98,86	78,31	81,28	N/A	N/A	-
10	Prevalensi Hipertensi	%	0,2908		0,384	N/A	N/A	-	0,345	0,396	0,398	N/A	N/A	-	84,28	98,48	96,48	N/A	N/A	-
11	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	N/A	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	-	N/A	N/A	N/A	100	100	-
12	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	N/A	0,9476	0,9981	N/A	N/A	-	N/A	0,9589	0,959	N/A	N/A	-	N/A	101,19	96,08	N/A	N/A	-
13	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan layanan layad rawat	%	N/A	0,2963	0,4815	1	1		N/A	0,4444	1	1	1	-	N/A	149,98	207,68	100	100	-
14	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	%	N/A	0,5913	0,6899	0,8	0,9		N/A	88.89 %	88.95%	0,8895	0,8496	-	N/A	150,33	128,93	118,18	94,4	-
15	Persentasi ketersediaan obat essensial di instalasi farmasi kabupaten/kota	%	70	90	91	N/A	N/A	-	94,18	94,33	92,12	N/A	N/A	-	134,54	100	101,23	N/A	N/A	-
16	Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan	%	80	85	90	90	95	96	83,17	84,46	84,46	84,56	90,36	-	103,96	101,55	93,84	93,95	95,11	-



Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang terlampir pada tabel 2.13 sebagaimana berikut





Tabel 2.13 Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Satuan	Target Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
C	INDIKATOR KINERJA PROGRAM																			
1	Persentase Rumah Tangga mencapai yang berperilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS)	%	0,65	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,618	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95,07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Prevalensi gizi buruk	%	0,54	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	94,44	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan	%	0,88	-	-	-	-	-	0,9418	-	-	-	-	-	107,02	-	-	-	-	-
4	Persentasi desa/kelurahan mencapai UCI ≥ 90%	%	0,93	90	90,5					0,775	0,448				98,81	86,11	49,78			
5	Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi	%	256	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	387	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	151,17	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi	%	90	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	77,78	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Jumlah Dokumen Regulasi kebijakan pembangunan kesehatan	%	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Jumlah Dokumen Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat	%	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Program Kesehatan di Jawa Barat	%	N/A	N/A	100	100	100	100	N/A	N/A	100	91,67	100		N/A	N/A	100	100	100	
10	Persentase Desa Siaga Aktif	%	0,81	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,99	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	122	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas	%	0,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,7685	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	128,08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Air Minum Yang Berkualitas	%	N/A	0,8	0,8	N/A	N/A	N/A	N/A	0,7784	0,8029	N/A	N/A	N/A	N/A	97,3	100,36	N/A	N/A	N/A
13	Presentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	%	N/A	N/A	N/A	0,85	90	93	N/A	N/A	N/A	0,879	90,04		N/A	N/A	N/A	103,41	100,04	
14	Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	%	55	75	80	N/A	N/A	N/A	67,95	72,39	82,49	N/A	N/A	N/A	123,54	96,52	103,11	N/A	N/A	N/A
15	Persentase Kab/Kota dengan 100% Puskesmas melaksanakan Yankes Jiwa 100%	%	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Persentasi penduduk yang mengalami Gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0,74	N/A	N/A	N/A	N/A	100	74	N/A	N/A	N/A
17	Persentase RSUD terisi dokter spesialis Dasar sesuai standar	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95,45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95,45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar	%	63,15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	38,64	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	61,18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prioritas Terisi Tenaga Kesehatan	%	N/A	65	70	70	59	69	N/A	93	70	86	100		N/A	143,07	100	122,85	169,49	
20	Jumlah Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar	%	98	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	98	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas	%	N/A	N/A	N/A	90	92	95	N/A	N/A	N/A	92	95,34		N/A	N/A	N/A	102,22	103,63	
22	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Cakupan Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal 88%	%	N/A	0,663	0,7	N/A	N/A	N/A	N/A	0,89	0,56	N/A	N/A	N/A	N/A	141,26	80	N/A	N/A	N/A
23	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	%	N/A	N/A	N/A	0,89	91		N/A	N/A	N/A	0,9862	94,97		N/A	N/A	N/A	110,8	104,36	
24	Persentase Draft Regulasi Bidang Kesehatan Yang Diusulkan Oleh Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat	%	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
25	Persentase tenaga kesehatan mengikuti pemilihan tenaga kesehatan puskesmas teladan	%	N/A	0,7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,7879	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	112,55	N/A	N/A	N/A	N/A
26	Persentase rekomendasi perijinan yang dikeluarkan	%	N/A	0,85	0,9	N/A	N/A	N/A	N/A	0,8776	0,8752	N/A	N/A	N/A	N/A	103,24	97,24	N/A	N/A	N/A
27	Persentase Pembiayaan Kesehatan PBI ke Kab/Kota	%	N/A	0,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
28	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Bumil Minimal 95%	%	N/A	0,63	0,7037	N/A	N/A	N/A	N/A	0,8617	0,5925	N/A	N/A	N/A	N/A	136,77	84,19	N/A	N/A	N/A



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Satuan	Target Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
29	Persentase puskesmas di kabupaten/kota Menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	%	N/A	0,55	0,6	N/A	N/A	N/A	N/A	0,57	0,7991	N/A	N/A	N/A	N/A	103,63	133,18	N/A	N/A	N/A
30	Persentase puskesmas di kabupaten/kota yang Menyelenggarakan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	%	N/A	0,55	0,6	N/A	N/A	N/A	N/A	0,57	0,86	N/A	N/A	N/A	N/A	103,63	143,33	N/A	N/A	N/A
31	Jumlah unsur masyarakat tingkat provinsi yang dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	N/A	4	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
32	Persentase Pasien HIV yang di obati	%	N/A	0,45	0,65	N/A	N/A	N/A	N/A	0,52	0,42	N/A	N/A	N/A	N/A	115,55	64,61	N/A	N/A	N/A
33	Persentase Kab/Kota yg 50 % Puskesmas melaksanakan tatalaksana pnemonia balita sesuai standar	%	N/A	0,6	0,6	N/A	N/A	N/A	N/A	0,6	0,4444	N/A	N/A	N/A	N/A	100	74,06	N/A	N/A	N/A
34	Persentase kab/kota yang melakukan deteksi dini hepatitis B pada Ibu Hamil	%	N/A	0,7	0,8	N/A	N/A	N/A	N/A	0,85	0,96	N/A	N/A	N/A	N/A	121,42	120	N/A	N/A	N/A
35	Persentase kab/kota yang mencapai IR DBD < 49/100.000 pddk	%	N/A	0,88	0,7	N/A	N/A	N/A	N/A	0,7	0,5555	N/A	N/A	N/A	N/A	79,54	79,35	N/A	N/A	N/A
36	Persentase Kab/kota yang sudah eliminasi malaria	%	N/A	0,85	0,89	N/A	N/A	N/A	N/A	0,85	0,93	N/A	N/A	N/A	N/A	100	104,49	N/A	N/A	N/A
37	Proporsi cacat kusta TK II	%	N/A	0,1	0,1	N/A	N/A	N/A	N/A	0,09	0,06	N/A	N/A	N/A	N/A	1,1	1,4	N/A	N/A	N/A
38	Proporsi kab/kota yang mencapai eliminasi filariasis	%	N/A	0,27	0,45	N/A	N/A	N/A	N/A	0,27	0,2727	N/A	N/A	N/A	N/A	100	60,6	N/A	N/A	N/A
39	Persentase Kab/Kota yang mencapai Eliminasi Rabies	%	N/A	0,88	1	N/A	N/A	N/A	N/A	0,88	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
40	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu (PANDU)	%	N/A	0,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,54	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	108	N/A	N/A	N/A	N/A
41	Persentase Kegiatan Rapid Health Assesment	%	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
42	Persentase Masyarakat yang dilayani di lokasi Bencana	%	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
43	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	N/A	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	-	N/A	N/A	N/A	100	100	-
44	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	%	N/A	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100		N/A	N/A	N/A	100	100	-
45	Persentase Puskesmas siap Akreditasi	%	N/A	0,95	1	N/A	N/A	N/A	N/A	0,96	0,9492	N/A	N/A	N/A	N/A	101,05	94,92	N/A	N/A	N/A
46	Persentase Kab/Kota memiliki Laboratorium Kesehatan terakreditasi	%	N/A	0,19	0,3	N/A	N/A	N/A	N/A	0,44	0,852	N/A	N/A	N/A	N/A	231,57	284	N/A	N/A	N/A
47	Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	%	N/A	0,82	0,86	0,91	0,96	100	N/A	0,82	0,82	0,9136	0,9855	-	N/A	100	95,34	100,39	102,65	
48	Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 50% Puskesmas Menyelenggarakan kesehatan tradisional	%	N/A	0,64	0,72	80	88	96	N/A	0,73	0,7523	90	100	-	N/A	114,06	104,48	N/A	N/A	-
49	Persentase Rumah Sakit siap Akreditasi	%	N/A	0,6	0,7	N/A	N/A	N/A	N/A	0,889	0,8664	N/A	N/A	N/A	N/A	148,16	123,77	N/A	N/A	N/A
50	Persentase Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi	%	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
51	Persentase Kab/Kota yg mempunyai 80% Rumah Sakit dengan pencapaian SPM	%	N/A	0,19	0,33	N/A	N/A	N/A	N/A	0,1923	0,33	N/A	N/A	N/A	N/A	101,21	100	N/A	N/A	N/A
52	Persentase Rumah Sakit Regional yg memenuhi standar	%	N/A	0,38	0,5	N/A	N/A	N/A	N/A	0,4286	0,5	N/A	N/A	N/A	N/A	112,78	100	N/A	N/A	N/A
53	Jumlah Dinas Kesehatan Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelaksanaan BOK oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	%	N/A	27	27	N/A	N/A	N/A	N/A	27	27	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
54	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS Al Ihsan	%	N/A	76,82	77,84	80	80	80	N/A	79,07	80,46	82,12	97,08	-	N/A	102,92	103,36	102,65	121,35	-
55	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS Jiwa	%	N/A	75	80	75	80	85	N/A	0,808	0,8886	79,77	90,85	-	N/A	107,73	111,07	106,36	113,56	-
56	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RS PARU	%	N/A	0,75	0,76	76	78	79	N/A	0,75	0,7709	78,76	90,13	-	N/A	100	101,43	103,63	115,55	-
57	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RSUD Jampangkulon	%	N/A	0,759	0,7615	77	78	79	N/A	0,7998	0,8104	83,98	83,92	-	N/A	105,37	106,42	109,06	107,58	-



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Satuan	Target Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
58	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RSUD Pameungpeuk	%	N/A	80,84	76,15	83,54	85,22	86,92	N/A	81,13	82,78	82,45	83,21	-	N/A	100,35	108,71	98,69	97,64	-
59	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS Kesehatan Kerja	%	N/A	60	76,15	80	82	85	N/A	74,4	81	80,3	83,5	-	N/A	124	106,36	100,37	104,37	-
60	Persentase BOR (bed occupancy ratio) di RSUD Al Ihsan	%	N/A	0,6	0,65	N/A	N/A	N/A	N/A	0,7312	0,8029	N/A	N/A	N/A	N/A	121,86	123,52	N/A	N/A	N/A
61	Persentase BOR (bed occupancy ratio) di RS Jiwa	%	N/A	0,58	0,61	N/A	N/A	N/A	N/A	0,51	0,4765	N/A	N/A	N/A	N/A	87,93	78,11	N/A	N/A	N/A
62	Persentase BOR (bed occupancy ratio) di RS Paru	%	N/A	0,57	0,58	N/A	N/A	N/A	N/A	0,2965	0,18	N/A	N/A	N/A	N/A	52,01	31,03	N/A	N/A	N/A
63	Persentase BOR (bed occupancy ratio) di RS Jampangkulon	%	N/A	0,65	0,68	N/A	N/A	N/A	N/A	0,6673	0,6152	N/A	N/A	N/A	N/A	102,66	92,19	N/A	N/A	N/A
64	Persentase BOR (bed occupancy ratio) di RS Pameungpeuk	%	N/A	0,6	0,58	N/A	N/A	N/A	N/A	0,7672	0,6359	N/A	N/A	N/A	N/A	127,86	109,6	N/A	N/A	N/A
65	Jumlah Penambahan Parameter Pemeriksaan yang diakreditasi di Unit Laboratorium Kesehatan	%	N/A	68	70	N/A	N/A	N/A	N/A	0,7	0,7	N/A	N/A	N/A	N/A	102,94	100	N/A	N/A	N/A
66	Persentase Kepuasan Pelanggan di Unit Laboratorium Kesehatan	%	N/A	0,55	0,6	N/A	N/A	N/A	N/A	0,7	0,7	N/A	N/A	N/A	N/A	127,27	116,66	N/A	N/A	N/A
67	Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	%	N/A	N/A	N/A	72	90	95	N/A	N/A	N/A	72	93,75	-	N/A	N/A	N/A	100	104,16	-
68	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit Pelatihan Kesehatan	%	N/A	0,6	0,65	N/A	N/A	N/A	N/A	0,6	0,65	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
69	Persentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Upaya Peningkatan Kualitas Pelatihan Bidang Kesehatan yang sudah dapat difungsikan	%	N/A	N/A	N/A	50	75	80	N/A	N/A	N/A	50	50	-	N/A	N/A	N/A	100	66,66	-
70	Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	%	N/A	N/A	N/A	63	83	93	N/A	N/A	N/A	80	84,86	-	N/A	N/A	N/A	126,98	102,24	-
71	Persentase Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	%	N/A	N/A	N/A	87	88	90	N/A	N/A	N/A	90,59	90,97	-	N/A	N/A	N/A	104,12	103,37	-



2.3.1.Capaian Kinerja Indikator Tujuan

Pencapaian Target Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 yang tertuang dalam tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

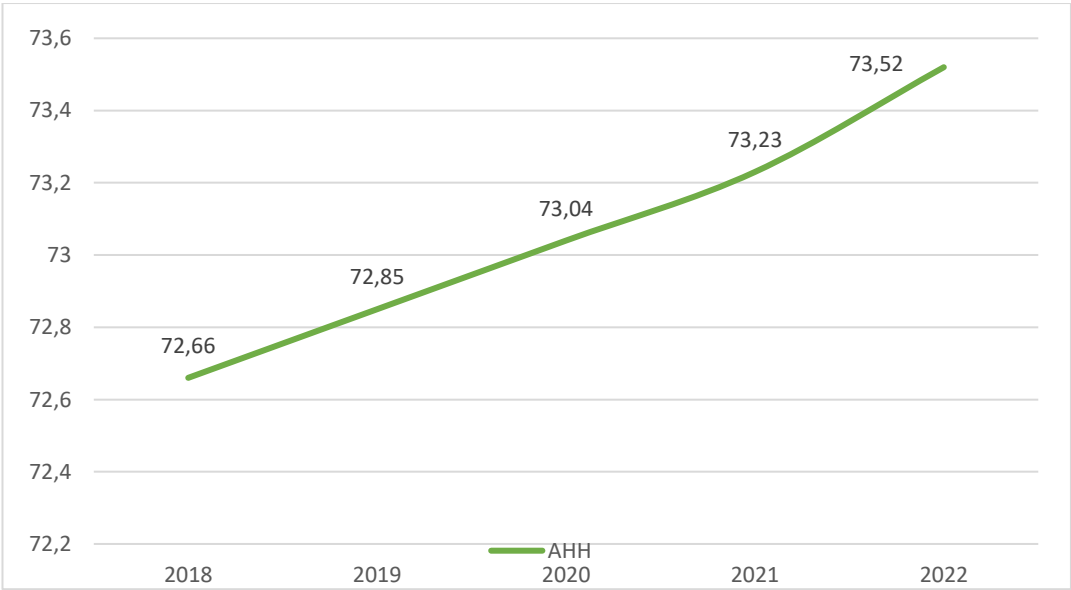
2.3.1.1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan yang digunakan sebagai salah satu dasar penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka Harapan Hidup memberikan gambaran probabilitas umur maksimal yang dapat dicapai seorang bayi baru lahir.

Indikator ini dipandang dapat menggambarkan taraf hidup suatu bangsa, sehingga dijadikan salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Peningkatan Angka Harapan Hidup menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan penduduk serta meningkatnya derajat kesehatan suatu bangsa.

Untuk dapat meningkatkan Umur Harapan Hidup bukan saja diperlukan program pembangunan kesehatan namun diperlukan juga progam sosial lainnya seperti program pemberantasan kemiskinan, perbalikan kualitas lingkungan hidup, kecukupan pangan dan gizi dan pendidikan. Indikator Angka Harapan Hidup tidak bisa didapatkan dari sistem pencatatan pelaporan rutin, tetapi melalui estimasi berdasarkan data primer hasil survey atau sensus yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Gambar 2.1
Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2022



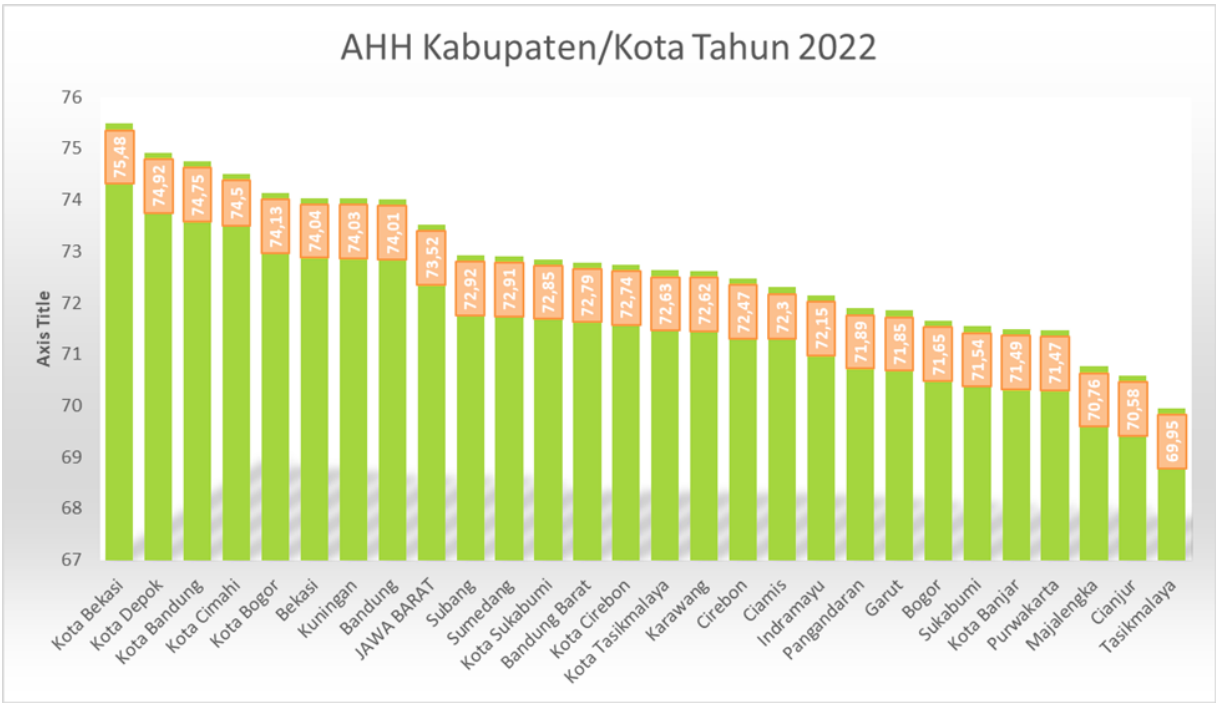
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 capaian AHH Provinsi Jawa Barat, dari tahun 2018 berkisar 72,66 setiap tahunnya meningkat sampai pada tahun 2022 yaitu pada angka 73,52. AHH menurut Kabupaten Kota Jawa Barat yang tertinggi berada di Kota Bekasi mencapai 75,19 dan terendah berada di Kabupaten Tasikmalaya dengan 69,67 tahun. AHH menurut Kabupaten /Kota, secara rinci dapat tergambarkan pada gambar grafik di bawah ini.





Gambar 2.2
Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2022

Sebanyak 8 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat mempunyai AHH di atas rata-rata Jawa Barat, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Bandung. Fokus pembangunan kesehatan di Jawa Barat selama lima tahun ke depan diprioritaskan pada 19 kabupaten/kota yang mempunyai AHH di bawah rata-rata Provinsi.

2.3.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan tujuan, sasaran pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Perubahan ini bertujuan mendukung sasaran dan indikator pembangunan kesehatan daerah di mana akses terhadap fasilitas kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berikut ini akan dijelaskan capaian IKU Dinas Kesehatan.

2.3.2.1 Persentase pelayanan SPM di Kabupaten/ Kota

Persentase pelayanan SPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebesar 85,34% dan mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu 68,92%. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Bila pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program maka pada SPM ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemerintah Daerah untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM (pasal 298). Konsep SPM berubah dari Kinerja Program Kementerian menjadi Kinerja Pemerintah Daerah yang memiliki konsekuensi *reward* dan *punishment*, sehingga Pemerintah Daerah diharapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya) yang



cukup agar proses penerapan SPM berjalan adekuat. SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya.

2.3.2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada UPT

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat disebutkan bahwa SKM bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang akan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja terhadap layanan yang diberikan, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat atau pelanggan untuk menilai layanan yang telah diterima dalam rangka peningkatan mutu kualitas pelayanan, serta mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap kinerja aparatur negara dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai IKM terhadap pelayanan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2021 yaitu 81,99 poin dan meningkat pada tahun 2022 yaitu 88,65 poin.

2.3.2.3 Jumlah RS Provinsi yang terakreditasi paripurna

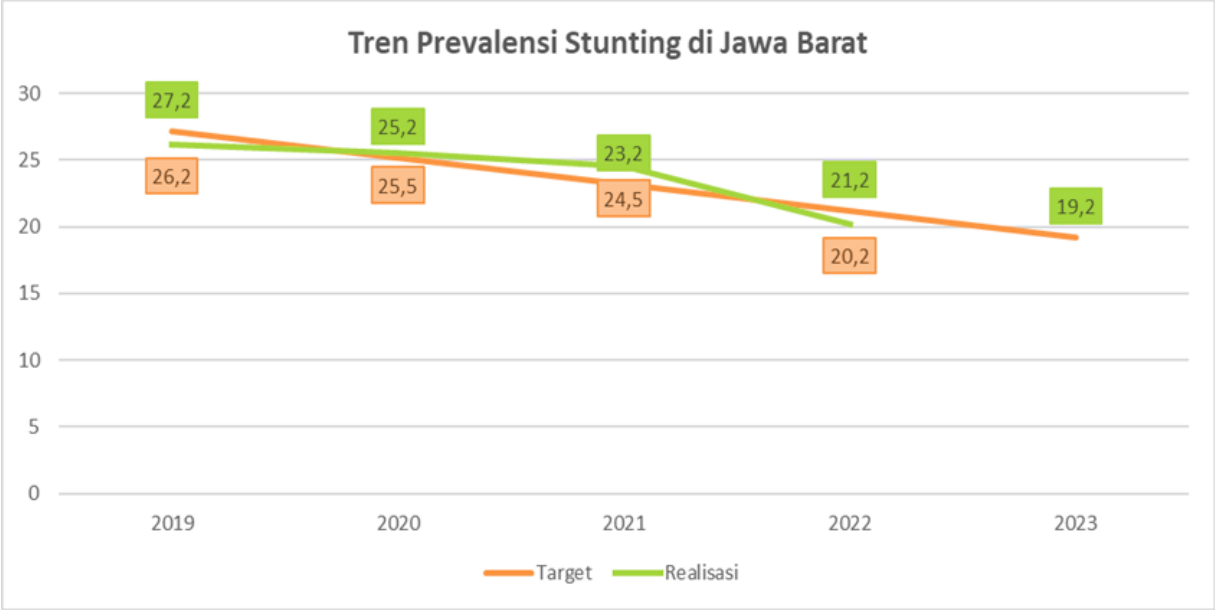
Jumlah RS Provinsi Provinsi Jawa Barat yang sudah terakreditasi paripurna pada tahun 2022 yaitu ada 6 Rumah Sakit antara lain RSUD Al Ihsan, RS Jiwa, RS Paru Provinsi RSUD Jampangkulon, RSUD Kesehatan Kerja dan RSUD Pameungpeuk. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 RS Provinsi Jawa Barat yang terakreditasi paripurna sebanyak 3 Rumah Sakit.

Dampak dari Pandemi Covid-19, maka banyak RS yang sebenarnya sudah berakhir sertifikat akreditasinya namun demikian dengan adanya Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/652/2022 tanggal 5 September 2022 tersebut, RS diberi kesempatan untuk akreditasi/reakreditasi sampai dengan akhir Desember 2023.

2.3.2.4 Prevalensi Stunting

Pada tahun 2021, prevalensi stunting di Jawa Barat masih termasuk dalam kategori tinggi karena berada pada rentang 20% – 30% berdasarkan standar masalah kesehatan masyarakat WHO. Pada tahun 2022 prevalensi stunting di Jawa Barat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 4,3% yaitu menjadi 20,2%. Capaian ini telah melebihi target prevalensi stunting pada tahun 2022 sebesar 21,2%.

Meskipun prevalensi stunting di Jawa Barat menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, masih diperlukan upaya inovasi agar terjadi penurunan 3 – 3,5% per tahun untuk mencapai target RPJMD 19,2% dan target RPJMN 14% pada tahun 2024. Upaya percepatan penurunan stunting perlu dilakukan secara terintegrasi mencakup intervensi gizi spesifik dan sensitif secara multisektor dan diprioritaskan pada daerah yang bermasalah gizi dengan kolaborasi pentahelix yang melibatkan sektor Pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan media.



2.3.3 Capaian Kinerja Indikator Program

Dinas Kesehatan memiliki 71 indikator program yang juga melingkupi kinerja UPTD Dinas Kesehatan. Namun keseluruhan indikator ini tidak diampu di tahun yang sama. Beberapa indikator menggantikan indikator program lainnya yang telah tercapai dan tidak relevan lagi menjadi indikator capaian program. Berikut ini rincian capaian indikator program pada Renstra Perubahan Tahun 2018-2023.

1. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 97.97% dengan target pada renstra sebesar 91%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 98.62% dengan target kinerja pada renstra sebesar 89%. Target selama 2 tahun telah tercapai namun terdapat penurunan capaian 0,65% dari tahun sebelumnya.
2. Persentase Kabupaten/Kota Yang Penduduknya Menggunakan Air Minum Yang Berkualitas realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 90.04% dengan target pada renstra sebesar 90%, pada tahun 2022 realisasi capaian kinerja target pada renstra tercapai, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 87.79% dengan target kinerja, pada renstra sebesar 85%, pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja target pada renstra tercapai dan terdapat kenaikan 2,25%.
3. Persentase Kabupaten/Kota Yang Penduduknya Menggunakan Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 90.83% dengan target pada renstra sebesar 87.75%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 85.90% dengan target kinerja pada renstra sebesar 80%. Indikator telah tercapai dengan terdapat peningkatan capaian sebesar 4.93%.
4. Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100% dengan target pada renstra sebesar 73.27%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 100% dengan target kinerja pada renstra sebesar 80,19%. Indikator telah tercapai 100% di tahun 2021 dan 2022.
5. Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 84.86% dengan target pada renstra sebesar 80%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 80% dengan target kinerja pada renstra sebesar 63%. Realisasi tercapai dan terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 4.46%.





6. Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100% dengan target pada renstra sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 100% dengan target kinerja pada renstra sebesar 100%. Target kinerja telah tercapai.
7. Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100% dengan target pada renstra sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 100% dengan target kinerja pada renstra sebesar 100%. Target kinerja telah tercapai.
8. Persentase Puskesmas di Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 98.55% dengan target pada renstra sebesar 96%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 91.36% dengan target kinerja pada renstra sebesar 91%. Target kinerja telah tercapai dan terdapat kenaikan capaian sebesar 7.19%.
9. Persentase Kabupaten/Kota Dengan Minimal 50% Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Tradisional realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100% dengan target pada renstra sebesar 88%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 90% dengan target kinerja pada renstra sebesar 80%, dan pada tahun 2020 realisasi capaian kinerja sebesar 75.23% dengan target capaian pada renstra sebesar 72%. Target kinerja telah tercapai dan terdapat peningkatan capaian sebesar 10% dari tahun sebelumnya.
10. Persentase Rumah Sakit Terakreditasi realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 84.96% dengan target pada renstra sebesar 90%. Pada tahun 2022 realisasi capaian kinerja target pada renstra tidak tercapai, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 88.95% dengan target kinerja sebesar 80% dan pada tahun 2020 realisasi capaian kinerja sebesar 88.95% dengan target capaian pada renstra sebesar 68.99%. Target tercapai pada tahun 2020 dan tahun 2021 namun tidak tercapai di tahun 2022 karena kondisi pandemi covid-19 yang menyebabkan penundaan pelaksanaan akreditasi RS oleh Pemerintah Pusat.
11. Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Layad Rawat realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100% dengan target pada renstra sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 100% dengan target kinerja pada renstra sebesar 100%, dan pada tahun 2020 realisasi capaian kinerja sebesar 100% dengan target capaian pada renstra sebesar 48.15%. Target telah tercapai sesuai yang direncanakan.
12. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 45,5% dengan target pada renstra sebesar 60%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 29.9% dengan target kinerja pada renstra sebesar 45%.Target tidak tercapai sesuai yang direncanakan. Faktor penyebab tidak tercapainya karena dampak pandemi covid-19 sehingga pelaksanaan akreditasi FKTP menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat.
13. Persentase Kab/Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang terakreditasi realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 85% dengan target pada renstra sebesar 90%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 85.18% dengan target kinerja pada renstra sebesar 80%.Target tidak tercapai sesuai yang direncanakan pada tahun 2022. Faktor penyebab tidak tercapainya karena dampak pandemi covid-19 sehingga pelaksanaan akreditasi menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat.
14. Persentase Ketersediaan Obat Esensial di Puskesmas realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 95.34% dengan target pada renstra sebesar 92%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 92% dengan target kinerja pada



- renstra sebesar 92%. Target indikator telah tercapai dengan peningkatan sebesar 3,34% dari tahun sebelumnya.
15. Persentase Penduduk Dengan Jaminan Kesehatan realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 90.36% dengan target pada renstra sebesar 95%, pada tahun 2022 realisasi capaian kinerja target pada renstra tidak tercapai dikarenakan ada beberapa permasalahan diantaranya penonaktifan peserta PBI-JK sesuai Keputusan Menteri Sosial RI dan pengalihan peserta dari segmen PBPU Pemda ke PBI-JK sehingga mempengaruhi kepesertaan. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 84.56% dengan target kinerja pada renstra sebesar 90%. Pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja target pada renstra tidak tercapai dikarenakan ada beberapa permasalahan diantaranya terkendala proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang belum bisa berjalan maksimal selain itu juga dampak pandemi ada penurunan PAD Daerah dan berpengaruh pada jumlah kepesertaan.
 16. Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Program Kesehatan di Jawa Barat realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100% dengan target pada renstra sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 100% dengan target kinerja pada renstra sebesar 91.67%, pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja target pada renstra tercapai.
 17. Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan Dana BOK dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100% dengan target pada renstra sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 100% dengan target kinerja pada renstra sebesar 100%, pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja target pada renstra tercapai.
 18. Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) di RSUD Al Ihsan, RSUD Jampangkulon, RSUD Pameungpeuk, RSKK, RS Paru, RS Jiwa realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021 telah tercapai.
 19. Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 93.75% dengan target pada renstra sebesar 90%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 72% dengan target kinerja pada renstra sebesar 72%. Target indikator telah tercapai sesuai target dan peningkatan 21,75%
 20. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prioritas Terisi Tenaga Kesehatan realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100% dengan target pada renstra sebesar 59%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 86% dengan target kinerja pada renstra sebesar 70%, dan pada tahun 2020 realisasi capaian kinerja sebesar 70% dengan target capaian pada renstra sebesar 70%. Target telah tercapai.
 21. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Al Ihsan realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 97.08% dengan target pada renstra sebesar 80%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 82.12% dengan target kinerja pada renstra sebesar 80%, dan pada tahun 2020 realisasi capaian kinerja sebesar 80.46% dengan target capaian pada renstra sebesar 80%. IKM RSUD Al Ihsan tercapai sesuai target yang diharapkan.
 22. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RS Jiwa realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 90.85% dengan target pada renstra sebesar 80%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 79.77% dengan target kinerja pada renstra sebesar 75%, dan pada tahun 2020 realisasi capaian kinerja sebesar 77.09% dengan target capaian pada renstra sebesar 76%.
 23. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RS Paru realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 90.13% dengan target pada renstra sebesar 78%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 78.76% dengan target kinerja pada



- renstra sebesar 76%, dan pada tahun 2020 realisasi capaian kinerja sebesar 77.09% dengan target capaian pada renstra sebesar 76%.
24. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Jampangkulon realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 83.92% dengan target pada renstra sebesar 78%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 83.98% dengan target kinerja pada renstra sebesar 77%, dan pada tahun 2020 realisasi capaian kinerja sebesar 81.04% dengan target capaian pada renstra sebesar 76.15%.
25. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Pameungpeuk realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 83.21% dengan target pada renstra sebesar 85.22%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 82.45% dengan target kinerja pada renstra sebesar 83.54%, dan pada tahun 2020 realisasi capaian kinerja sebesar 82.78% dengan target capaian pada renstra sebesar 76.15%. Realisasi IKM pada RSUD Pameungpeuk tidak tercapai pada tahun 2021 dan 2022 dikarenakan beberapa faktor yaitu penentuan target yang rata-rata lebih tinggi dari RS lainnya dan proses pelaksanaan survey yang harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
26. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RS Kesehatan Kerja realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 83.5% dengan target pada renstra sebesar 82%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 80.30% dengan target kinerja pada renstra sebesar 80% dan pada tahun 2020 realisasi capaian kinerja sebesar 81% dengan target capaian pada renstra sebesar 76.15%.

2.3.4 Capaian Kinerja SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Berikut ini capaian indikator SDG’s Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.16 Capaian Indikator SDG’s Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Satuan	2015	2019		2020		2021		2022	
			Baseline	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	%	60	85	84,99	85	85,51	90	84,56	95	90,36
2	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	70,63	85	95,46	87	93,2	89	98,62	91	94,76
3	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	%	61,87	40,26	50,11	92,9	87,4	93,6	89,9	90	101
4	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49	%	66,86	78,3	75,7	-	75,03	-	77,12	-	85,5
5	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	55,31	80	77,84	80	80,29	85	87,79	90	90,04
6	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%	43,87	75	72,39	75	82,94	80	85,9	87,75	90,83
7	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	% (0-6 bulan)	44,54	61,2	71,11	56	59,8	58,6	68,8	61,8	67,62
8	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%	89,18	94,17	98,1	-	94,73	-	99,93	-	96,44
9	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	70,63	85	95,46	87	93,2	89	98,62	91	94,76
10	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	per 1.000 KH	4,19	5,2	3,26	5	3,18	-	3,4	-	3,62
11	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	%	78,20	90,00	98,90	74,1	85,2	85,2	77,8	88,9	100
12	Kejadian Malaria per 1000 orang	per 1000 orang	0,00	0,01	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
13	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Kab/ Kota	23	25	25	26	26	27	26	27	27

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Satuan	2015	2019		2020		2021		2022	
			Baseline	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
14	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	%	23	80	96,3	85	100	90	100	95	100
15	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	62.12	85.00	84.99	85	85,51	90	84,56	95	90,36
16	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	%	33.82	32.28	32.97	-	-	-	-	-	-
17	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	%	77.7	85.7	95.84	85	89,09	90	91,77	92	93,49
18	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	desa/ kelurahan	3532	5184	4732	-	-	-	-	-	-
19	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	desa/ kelurahan	704	1556	1320	-	-	-	-	-	-

Diantara 17 tujuan dalam *Sustainable Development Goals*, poin kesehatan tercantum dalam tujuan nomor 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Pada masa MDG's terdapat beberapa poin yang belum tuntas, seperti upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), pengendalian penyakit HIV/AIDS, TB, Malaria serta peningkatan akses kesehatan reproduksi termasuk KB. Kini juga terdapat hal-hal baru yang perlu menjadi perhatian, yaitu kematian akibat penyakit tidak menular (PTM), penyalahgunaan narkotika dan alkohol, kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas, *Universal Health Coverage*, kontaminasi dan polusi air, udara dan tanah, serta penanganan krisis dan kegawatdaruratan.

SDGs Kesehatan terdiri dari 4 *Goals*, 19 Target, dan 31 Indikator. Keempat *goals* tersebut berada pada posisi goals 2, 3, 5 dan 6 dengan target-targetnya (19 Target). Adapun capaian indikator SDG's bidang kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan capaian kinerjanya cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018-2023. Target di tahun 2022 adalah 95 %, adapun realisasinya adalah 90,36 % dari sebelumnya 84,56 %.
- Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan capaian kinerjanya mengalami peningkatan dari tahun 2018-2023. Realisasi di tahun 2021 lebih tinggi, yaitu 98,62 %, dan realisasi di tahun 2022 adalah 94,76 %, dari target 89 % di tahun 2020 dan target 91 % di tahun 2022.
- Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap capaian kinerjanya cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018-2023. Realisasi di tahun 2021 adalah 89,90 %, target di tahun 2022 adalah 90 %, adapun realisasinya adalah 101%.
- Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 capaian kinerjanya cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018-2023. Realisasi di tahun 2021 adalah 77,12 %, dan realisasi di tahun 2022 adalah 85,5%.
- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan capaian kinerjanya cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018-2023. Realisasi di tahun 2021 adalah 87,79 %, target di tahun 2022 adalah 90 %, adapun realisasinya adalah 90,04 %.
- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan capaian kinerjanya cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018-2023. Realisasi di tahun 2021 adalah 85,90 % dari target 80 %, dan realisasi di tahun 2022 adalah 90,83 % dari target 87,75 %.
- Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif capaian kinerjanya cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018-2023,akan tetapi di tahun 2022 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2021. Realisasi di tahun 2021



- adalah 68,80 %, dari target 58,60 %, adapun realisasi di tahun 2022 adalah 67,62 %, dari target 61,8 %.
8. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih capaian kinerjanya cenderung fluktuatif dari tahun 2018-2023. Realisasi di tahun 2020 adalah 94,73 %, di tahun 2021 meningkat menjadi 99,93 %, dan realisasi di tahun 2022 menjadi 96,44%.
 9. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan capaian kinerjanya mengalami peningkatan dari tahun 2018-2023. Realisasi di tahun 2021 lebih tinggi, yaitu 98,62 % dari target 89 %, dan realisasi di tahun 2022 adalah 94,76 % dari target 91 %.
 10. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup capaian kinerjanya mengalami peningkatan dari tahun 2018-2023. Realisasi di tahun 2020 sebesar 3,18, di tahun 2021 3,4 dan realisasi di tahun 2022 adalah 3,62 per 1000 kelahiran hidup.
 11. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi capaian kinerjanya cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018-2023. Realisasi di tahun 2021 adalah 77,80 %, lebih rendah dari target 85,20 %. Adapun target di tahun 2022 meningkat kembali menjadi 88,90 %, dan realisasinya adalah 100 %.
 12. Kejadian Malaria per 1000 orang capaian kinerjanya tidak mengalami perubahan, sebesar 0,01 per 1000 orang pada kurun waktu tahun 2020-2022.
 13. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria cakupan kinerjanya cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018-2023. Realisasi di tahun 2021 adalah 26 Kabupaten/Kota, tidak ada peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya dari target 27 Kabupaten/Kota. Adapun target di tahun 2022 meningkat kembali menjadi semua/27 Kabupaten/Kota melaksanakan eliminasi malaria.
 14. Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B cakupan kinerjanya cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018-2023. Realisasi di tahun 2021 adalah 100 %, dan target 90 %. Adapun target di tahun 2022 adalah 95 %, dan realisasinya adalah 100 %.
 15. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) capaian kinerjanya cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018-2023. Realisasi di tahun 2021 adalah 84,56 %, target di tahun 2022 adalah 95 %, adapun realisasinya adalah 90,36 %.
 16. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas capaian kinerjanya cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018-2023. Target di tahun 2022 adalah 92 %, adapun realisasinya adalah 93,49 % dari sebelumnya 91,77 %.

Secara umum kinerja program Dinas Kesehatan Provinsi telah tercapai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2018. Meskipun mengalami kondisi pandemi covid-19 mulai tahun 2020, program-program yang dilaksanakan diadaptasi mengikuti situasi pandemi. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun lintas sektor.

Capaian AHH didukung juga oleh pencapaian program-program Juara yaitu Kesehatan Juara yang bertujuan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan. Program Kesehatan Juara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yaitu, Pembangunan dan Revitalisasi Rumah Sakit, Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA), Layad Rawat, dan jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin.

Selain Program Kesehatan Juara, Dinas Kesehatan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan terjemahan dari indikator AHH telah mencapai target



yang ditetapkan. Tantangan lain dalam pencapaian IKU ini adalah penurunan prevalensi stunting, target penurunan yang cukup tinggi oleh pemerintah pusat di tahun 2024 menjadi dorongan dalam peningkatan program-program inovasi terkait prevalensi stunting.

Penurunan prevalensi stunting ini didukung juga oleh indikator-indikator program yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Kesehatan. Indikator program yang belum sesuai target diantaranya Persentase Penduduk Dengan Jaminan Kesehatan yang terkendala oleh data kepesertaan yang tepat dan update serta skema pembiayaan yang sesuai dan dapat dilaksanakan. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini juga merupakan indikator SDG's yang sangat berdampak terhadap akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Selain itu indikator program yang tidak tercapai yaitu yang berkaitan dengan Akreditasi baik Rumah Sakit, FKTP maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/652/2022 tanggal 5 September 2022, RS diberi kesempatan untuk akreditasi/reakreditasi sampai dengan akhir Desember 2023.

Indikator kinerja program layanan Dinas Kesehatan lainnya yang bersifat teknis dan terkait juga dengan SDG's, dapat dikategorikan tercapai sesuai target yang direncanakan. Pencapaian target dipengaruhi oleh capaian output dan indikator kegiatan dibawahnya. Target-target program yang sebagian besar telah tercapai ini untuk perencanaan selanjutnya mungkin harus lebih diperhatikan penentuan indikator yang tepat dalam mengukur kinerja program dan kualitas pelaksanaan programnya.



**Tabel 2.17 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Bersumber APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Program/Kegiatan	Anggaran, Realisasi, dan Rasio															Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022		
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio		
Pendapatan Asli Daerah	342.229.666.501	309.186.904.470	90,34%	368.500.600.000	376.258.881.938	102%	420.462.872.529	447.848.975.172	106,51%	454.078.623.905	627.020.136.728	138,09%	536.667.077.141,00	650.233.349.087,00	121,16%		
Belanja Operasi	-			-			-			2.410.513.925.228	2.078.438.490.129,00		1.997.685.172.519,00	1.864.153.946.511,00	93,32%		
Belanja Pegawai	166.608.500.000,00	165.897.954.914	99,57%	229.523.633.913	178.638.240.307	78%	492.696.895.600	255.766.471.536	51,91%	363.799.314.162	306.506.792.285	84,25%	369.333.969.975,00	358.333.642.970,00	97,02%		
Belanja Langsung	1.072.326.500.002,00	793.827.603.629,00	74,03%	1.177.049.512.892,00	939.691.148.515,00	80%	1.235.708.244.862,00	1.007.585.859.551,00	81,54%	-							
Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi										701.279.231.917,00	586.534.661.071,00	83,64%	740.413.662.484,00	671.740.408.527,00	90,73%		
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat										1.135.954.108.604,00	1.006.779.750.258,00	88,63%	720.380.765.233,00	689.306.633.469,00	95,69%		
Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan										208.518.041.149,00	177.767.467.271,00	85,25%	165.262.410.114,00	142.657.132.311,00	86,32%		
Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman										61.836.516,00	41.463.314,00	67,05%	127.320.681,00	118.726.430,00	93,25%		
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan										901.392.880,00	808.355.930,00	89,68%	2.167.044.032,00	1.997.402.804,00	92,17%		
Program Kesehatan Masyarakat							979.780.750,00	965.088.750,00	98,50%								
Program Promosi Kesehatan	2.666.094.950,00	1.528.503.306,00	57,33%	2.153.124.752	1.904.306.086,00	88%											
Program Pengembangan lingkungan sehat	1.242.675.000,00	1.178.230.160,00	94,81%	1.178.513.241,00	1.109.039.957,00	94%											
Program Pelayanan Kesehatan	380.207.143.733,00	299.594.033.382,00	78,80%	69.018.498.117,00	23.657.929.992,00	34%	13.452.628.600,00	10.623.522.041,00									
Program Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	16.397.224.140,00	12.535.356.616,00	76,45%	8.095.793.882,00	7.065.994.500,00	87%		1.040.132.231,00									
Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit							1.076.232.487,00	1.040.132.231,00									
Program Sumber Daya Kesehatan	416.798.344.672,00	261.425.151.833,00	62,72%	52.453.521.897,00	49.452.106.503,00	94%	56.839.153.785,00	47.535.904.156,00	83,63%								
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan							133.573.953.215,00	98.259.573.867,00									
Program Manajemen Kesehatan	5.300.164.200,00	4.905.560.192,00	92,55%	3.238.211.275,00	2.660.767.537,00	82%	27.204.202.373,00	20.071.952.963,00	73,78%								
Program Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Akibat KLB Provinsi				1.956.626.797,00	1.468.866.500,00	75%	424.849.220,00	398.208.400,00	93,73%								
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Provinsi				822.423.759.290,00	660.843.054.316,00	80%											
Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan								2.053.882.184,00									
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat							3.989.765.849,00	75.594.348.331,00	1894,71%								
Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat							20.823.913.044,00	14.737.342.954,00	70,77%								





Program/Kegiatan	Anggaran, Realisasi, dan Rasio															Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022		
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi
Program dukungan manajemen perkantoran unit laboratorium kesehatan UPTD Dinas Kesehatan Prov Jabar							5.773.309.790,00	4.506.430.793,00	78,06%								
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Laboratorium Kesehatan							249.010.381,00	124.321.600,00	49,93%								
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Uptd Pelatihan Kesehatan							173.100.000,00	136.100.000,00									
Program Peningkatan Mutu Unit Pelatihan Kesehatan							752.398.350,00	350.048.250,00									
Program Dukungan Manajemen Perkantoran Unit Pelatihan Kesehatan Upt Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat							3.546.562.352,00	3.078.100.372,00									
Program peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Jiwa							61.539.650.098,00	31.730.729.794,00									
Program dukungan manajemen perkantoran RS Jiwa UPTD Dinas kesehatan Prov Jabar							13.696.964.149,00	10.654.801.517,00									
Program peningkatan sarana dan prasarana RS Jiwa							6.823.046.341,00	4.412.573.641,00									
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Paru							14.792.957.090,00	13.009.610.078,00									
Program dukungan manajemen perkantoran RS Paru UPTD Dinas kesehatan Prov Jabar							15.564.140.901,00	12.111.608.895,00									
Program peningkatan sarana dan prasarana RS Paru							13.554.635.450,00	12.272.912.827,00									
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Al Ihsan							341.953.621.724,00	303.327.838.515,00									
Program dukungan manajemen perkantoran RS Al Ihsan Dinas kesehatan Prov Jabar							214.695.550,00	105.676.510,00									
Program peningkatan sarana dan prasarana RS Al Ihsan							52.654.490.773,00	30.284.534.400,00									
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Jampangkulon							75.509.181.403,00	71.432.348.661,00									
Program dukungan manajemen perkantoran RS Jampang Kulon Dinas kesehatan Prov Jabar							30.869.514.873,00	28.335.629.385,00									
Program peningkatan sarana dan prasarana RS Jampang Kulon							84.655.132.627,00	65.671.774.964,00									
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Kesehatan Kerja							3.179.119.894,00	2.087.778.048,00									
Program dukungan manajemen perkantoran RS Kesehatan Kerja Dinas kesehatan Prov Jabar							17.568.263.592,00	13.463.861.663,00									





Program/Kegiatan	Anggaran, Realisasi, dan Rasio															Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022		
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana RSUD Kesehatan Kerja							107.840.676.625,00	106.424.387.383,00									
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Pameungpeuk							41.201.635.452,00	32.967.801.788,00									
Program dukungan manajemen perkantoran RS Pameungpeuk Dinas kesehatan Prov Jabar							13.572.099.021,00	9.982.263.697,00									
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana RS Pameungpeuk							71.659.559.103,00	54.084.907.369,00									
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.183.984.000,00	1.039.553.065,00	87,80%	4.046.482.422,00	2.053.882.184,00	51%											
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kesehatan				78.843.843.753,00	75.594.348.331,00	96%		3.391.053.550,00									
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	7.269.017.000,00	6.057.261.410,00	83,33%														
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	200.237.712.146,00	169.097.719.370,00	84,45%														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	40.182.453.861,00	35.476.248.702,00	88,29%	133.641.137.466,00	113.934.072.689,00	85%											
Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat								14.737.342.954,00									
Kesehatan							1.235.708.244.862,00			2.410.513.925.228,00			1.997.685.172.519,00				



Sumber pendanaan untuk melaksanakan Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bersumber dana APBD Provinsi dan BLUD, dengan uraian sebagai berikut:

- a. APBD Provinsi Jawa Barat
Anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mendanai program/kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 sebesar Rp 1.072.326.500.002; pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 1.177.049.512.892; tahun 2020 menjadi Rp 1.235.708.244.862; pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp 2.046.714.611.066; dan tahun 2022 menjadi Rp 1.997.685.172.519,00.

- b. Alokasi Anggaran BLUD

	UPTD / UOBK	RSUD Al Ihsan	RSUD Jampangkulon	RSUD Pameungpeuk	RS Jiwa	RS Paru	RSUD KK	Labkes
Pendapatan	2018	252.860.000.000	39.000.000.000	12.800.880.000	29.507.362.000	-	-	-
	2019	266.985.000.000	41.000.000.000	19.432.042.622	25.000.000.000	-	-	-
	2020	298.925.817.348	47.500.000.000	16.538.100.211	28.000.000.000	-	-	-
	2021	325.870.657.133	39.642.120.247	37.133.774.536	30.000.000.000	-	-	-
	2022	362.304.045.246	52.050.438.617	51.522.733.405	35.226.746.024	-	-	-
	2023	397.870.700.000	57.255.482.479	60.442.333.403	36.016.305.217	-	-	-
Pembiayaan	2018	252.860.000.000	-	455.888.327	6.695.249.162	-	-	-
	2019	266.985.000.000	-	3.006.528.393	19.962.789.505	-	-	-
	2020	316.884.124.151	-	7.232.920.986	27.194.068.909	-	-	-
	2021	398.696.010.417	-	12.697.596.215	34.745.802.081	-	-	-
	2022	484.214.681.852	-	4.033.897.421	12.234.950.000	-	-	-
	2023	513.943.364.767	11.257.608.953		36.776.828.984	-	-	-
SiLPA 2022		188.088.818.578	21.477.801.783		48.069.690.194	-	-	-
Estimasi SiLPA 2023		35.143.091.839	2.220.192.830		15.066.872.489	-	-	-

2.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Bersumber APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Realisasi belanja APBD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sebesar Rp. 793.827.603.629,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.072.326.500.002,- (74.03%), sedangkan untuk tahun 2019 anggaran sebesar Rp. 1.177.049.512.892 tetapi realisasi hanya sebesar Rp. 939.691.148.515,- (79,83%). Untuk tahun 2020 realisasi sebesar Rp. 1.007.585.859.551 dari alokasi sebesar Rp. 1.235.708.244.862 (81,54%). Tahun 2021 anggarannya sebesar Rp. 2.046.714.611.066,- dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.771.933.212.914,- (53.91%), Kemudian Tahun 2022 anggarannya sebesar Rp.1.997.685.172.519,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 1.864.153.946.511,- (93.32%). Dengan melihat rata-rata realisasi anggaran pada setiap tahunnya, maka dibutuhkan pengelolaan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik ke depannya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Jawa Barat

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra kementerian Kesehatan, Renstra Kabupaten/Kota dan telaahan terhadap dokumen RTRW dan KLHS perubahan, ada beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat agar menjadi perhatian dalam pelaksanaan program/kegiatan tidak dengan memanfaatkan peluang yang dimiliki secara optimal. Berikut beberapa potensi kondisi/kebijakan/fenomena yang dapat menjadi tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, diantaranya:

- 1. Pemilihan kepala daerah serentak di beberapa wilayah termasuk Provinsi Jawa Barat;



2. Perbedaan periode awal perencanaan di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
3. Perbedaan target pencapaian indikator nasional dengan kemampuan dan kondisi daerah dalam mendukung ketercapaian target kinerja tersebut;
4. Beban Pembiayaan Kesehatan masih tinggi;
5. Perkembangan teknologi informasi digital dan kecerdasan buatan di sektor kesehatan serta pemanfaatan data informasi geospasial;
6. Regulasi Pengelolaan tenaga Kesehatan;
7. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim;
8. Bonus demografi versus sistem Kesehatan yang rentan;
9. Pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat;
10. Implementasi transformasi sistem kesehatan di Jawa Barat;
11. kesehatan yang belum terakreditasi;
12. Masih ada pelanggan yang merasa belum puas dengan pelayanan Laboratorium Kesehatan; dan
13. Masih ada parameter baru yang belum tersedia di pelayanan Laboratorium Kesehatan.

Tantangan di atas merupakan kondisi yang tidak dapat diabaikan begitu saja tanpa antisipasi intervensi yang terencana sehingga Dinas Kesehatan perlu melihat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan agar tantangan tersebut bukan menjadi penghalang tetapi menjadi dorongan untuk meningkatkan performa kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghadapi tantangan di tahun 2024-2026, diantaranya:

1. Kebijakan nasional mengenai transformasi Kesehatan yang berimplikasi pada rencana pembiayaan bagi daerah;
2. Perencanaan program dan kegiatan Kesehatan direncanakan sesuai pemetaan kebutuhan, urgensi, dan prioritas;
3. Regulasi yang memberikan peluang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi.
4. Kolaborasi dan Kerjasama yang sudah terbangun bersama menjadi peluang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan di sektor kesehatan
5. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memberikan arahan pada penguatan di sektor Kesehatan (RPD, RTRW);
6. Sumber daya Kesehatan di Jawa Barat yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan;
7. Adanya kerjasama lintas batas dalam upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular yang berpotensi mengakibatkan Wabah/ KLB dengan Provinsi Jawa Tengah
8. Adanya komitmen UOBK dan UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Laboratorium Kesehatan



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah diuraikan pada BAB II, beberapa capaian kinerja sudah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian masih terdapat permasalahan kesehatan yang belum dapat diselesaikan dengan optimal dan membutuhkan kelanjutan penyelesaian di tahun 2024-2026.

Dengan memperhatikan capaian dan analisis hasil evaluasi Renstra serta mempertimbangkan prioritas pembangunan yaitu penguatan sistem kesehatan daerah dan arah kebijakan pembangunan kesehatan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memetakan 7 (tujuh) permasalahan utama bidang kesehatan berdasarkan pengelompokan komponen dari Sistem Kesehatan Daerah (SKD) yang akan dilakukan penanganannya sampai dengan tahun 2026, yaitu:

1. Belum optimalnya upaya kesehatan yang dilakukan baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat;
2. Belum optimalnya pembiayaan kesehatan di Provinsi Jawa Barat;
3. Belum terpenuhinya SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai standar;
4. Belum terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan/minuman;
5. Belum optimalnya pengelolaan manajemen kesehatan, data dan informasi kesehatan serta regulasi kesehatan;
6. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
7. Belum optimalnya penelitian dan Pengembangan Kesehatan beserta pemanfaatannya

Dari pokok masalah tersebut di atas, akan diuraikan dalam rincian pemetaan masalah dan akar masalah dalam pembangunan bidang kesehatan di Jawa Barat, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah
Pembangunan Bidang Kesehatan di Jawa Barat

NO (1)	MASALAH POKOK (2)	MASALAH (3)	AKAR MASALAH (4)
1.	Belum optimalnya upaya kesehatan yang dilakukan baik upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Masih adanya kasus kematian ibu dan kematian bayi	Belum tersedianya sarana dan prasarana pertolongan persalinan sesuai standar.
			Masih kurangnya SDM terlatih dalam penanganan kegawatdaruratan maternal Neonatal
			Belum kuatnya integrasi pelaksanaan rujukan persalinan antara fasyankes ptimer dengan rujukan
			Kurangnya kesadaran keluarga tentang pentingnya perawatan antenatal care.
		Masih terdapat kasus balita gizi buruk dan stunting serta obesitas pada balita dan remaja	masih kurangnya peran puskesmas untuk pelayanan gizi masyarakat
			Masih kurangnya pengetahuan dan perilaku keluarga dalam pemberian asupan gizi pada anak
			kurangnya pemanfaatan KMS untuk pemantauan tumbuh kembang balita

NO (1)	MASALAH POKOK (2)	MASALAH (3)	AKAR MASALAH (4)
		Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan	Belum semua penduduk di Kab/Kota mendapat air minum yang berkualitas
			Masih rendahnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat
			Belum seluruh kab/kota mencapai <i>Open Defecation Free</i> (ODF) 100 persen
			Kondisi rumah dan sanitasi yang tidak memenuhi syarat kesehatan.
		Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular	Masih tingginya prevalensi penyakit HIV/AIDS dan TB
			Belum seluruh bayi dan balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap
			Masih adanya penyakit-penyakit yang bersiko KLB
			Masih kurangnya penerapan pelayanan SPM penyakit menular dan tidak menular
			masih rendahnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat
			Belum optimalnya layanan terintegrasi untuk penyakit menular dan tidak menular
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana, KLB dan/atau berpotensi KLB/Bencana Provinsi	Belum dialukannya <i>Rapid Health Assesment</i> (RHA) pada kondisi bencana sesuai standar
			Belum terintegrasi sistem informasi kesehatan terkait bencana
			Masih kurangnya koordinasi lintas sector/program dalam penanganan dampak akibat bencana/KLB
			Belum adanya Surveillance terintegrasi dan realtime
		Belum terpenuhi sarana dan prasarana kesehatan di wilayah Jawa Barat dan wilayah perbatasan provinsi sesuai standar.	Belum adanya SOP penanganan terintegrasi terhadap dampak bencana/KLB
			Masih terdapat Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, RS dan Laboratorium kesehatan) yang belum memenuhi kriteria sarana prasarana sesuai standar.
			Masih adanya wilayah yang kesulitan akses terhadap pelayanan kesehatan
			Masih ada kesenjangan rasio tempat tidur dengan jumlah penduduk di beberapa kabupaten/kota.
			FKTL/layanan rujukan yang ada, belum tertata dengan baik pola rujukan antar layanan RS tipe D/C/B/A.
			Penyebaran jumlah FKTL tidak merata/ rasio FKTL terhadap penduduk tidak merata terutama di wilayah Jabar Selatan.
		Belum optimalnya peran rumah sakit provinsi dalam melayani masyarakat	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sesuai standar
		Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi serta pembinaan terhadap pelayanan SPM di kabupaten/kota	Belum adanya instrumen monev terpadu terhadap hasil pembinaan pelaksanaan SPM di kab/kota
2.	Belum optimalnya pembiayaan kesehatan di Provinsi Jawa Barat	Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan kesehatan	Belum terlaksananya penghitungan PHA dan DHA untuk pembiayaan Kesehatan
			Masih rendahnya koordinasi dan kerjasama antar LS dan pihak swasta dalam pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan Kesehatan
			Kurang optimalnya pengelolaan dana BLUD RS
		Belum tercapainya target Jaminan Kesehatan menuju <i>Universal Health Coverage</i> (UHC).	Masih belum terintegrasinya data kepesertaan Jaminan Kesehatan PBI oleh Dinas Sosial dan Disdukcapil.
			Kurangnya jumlah kepesertaan jaminan kesehatan mandiri.
			Masih adanya SKTM di beberapa kab/kota.
			Masih terdapat peserta jaminan kesehatan mandiri yang menunggak
3.	Belum terpenuhinya SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai standar	Penyebaran/distribusi Sumberdaya Manusia Kesehatan tidak merata di Kabupaten/Kota	Belum ada regulasi insentif untuk daerah tidak diminati
		Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai standar	Belum idealnya rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk
			Perencanaan dan kebijakan pengangkatan PNS/ASN tenaga kesehatan masih tersentralisasi di pusat
			Kemampuan Kabupaten/Kota yang bervariasi dalam pemenuhan SDM Kesehatan

NO (1)	MASALAH POKOK (2)	MASALAH (3)	AKAR MASALAH (4)
			Masih kurangnya SDM Kesehatan yang ada di RS sesuai standar
		Masih adanya kualitas personil/ sumber daya manusia kesehatan di bawah standar	Jumlah pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh balai pelatihan tidak sesuai dengan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia.
			Belum semua tenaga kesehatan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)
4.	Belum optimalnya penatalaksanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan	Ketersediaan farmasi tidak sesuai dengan kebutuhan	Pemenuhan sediaan farmasi (obat-obat program dan vaksin) masih tergantung pada dropping dari Kementerian Kesehatan
			Koordinasi yang belum optimal antara pusat dan provinsi
			Masih adanya obat bufferstock di provinsi yang dimusnahkan
		Pemanfaatan obat tidak sesuai kebutuhan	Proses pengelolaan dan penyimpanan obat program dan vaksin tidak sesuai standar
		Belum optimalnya pemanfaatan alat kesehatan di rumah sakit	Keterbatasan tenaga kesehatan terlatih untuk mengoperasikan alat Kesehatan
5.	Belum optimalnya pengelolaan manajemen data, dan informasi serta regulasi kesehatan	Belum terintegrasinya data dan informasi kesehatan di tingkat provinsi	Banyaknya aplikasi system informasi kesehatan dari pusat/ kementerian kesehatan (Aspak, SPGDT, e-warning, sistrute, RS online, simpus, SIHA, SIR, SP2TP, e-health)
			Belum adanya regulasi manajemen system informasi kesehatan provinsi
			Rendahnya input dan validasi data e-profil di tingkat provinsi kabupaten/kota.
6.	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan	Masih rendahnya pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, organsiasi swadaya masyarakat, media dan dunia usaha tingkat provinsi dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
			Masih rendahnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat
			Masih rendahnya upaya promotif dan preventif kesehatan
7.	Belum optimalnya penelitian dan Pengembangan Kesehatan beserta pemanfaatannya	Masih Rendahnya Penelitian di Bidang Kesehatan	Belum terjalinnya Kerjasama yang solid antara Lembaga penelitian provinsi dengan Dinas Kesehatan.

Selain permasalahan utama Bidang Kesehatan di atas, terdapat permasalahan pada Dinas Kesehatan berkenaan dengan pengelolaan Badan layanan Umum (BLUD) sehingga perlu penguatan terhadap UPTD dan UOBK yang telah memberlakukan BLU agar dapat menerapkan manajemen keuangan berbasis kinerja yang lebih baik.

Perluasan akses dan mutu pelayanan UOBK Rumah Sakit Provinsi menjadi persoalan yang juga perlu mendapatkan prioritas di dalam perencanaan dan penganggaran dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Peran UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi perlu didorong untuk menjadi laboratorium Pembina bagi laboratorium kabupaten/kota dan menjadi UPTD yang juga menerapkan BLU dalam pengelolaan keuangannya sehingga menjadi Laboratorium Kesehatan juara di Indonesia. UPTD Unit Pelatihan Kesehatan didorong pula untuk dapat menjadi unit yang menerapkan BLU dalam system manajemen keuangannya sehingga Unit Pelatihan Kesehatan dapat menentukan arah kebijakannya sendiri sesuai kebutuhan pengguna dan didukung pengembangannya sebagai *Corporate University* di Jawa Barat dalam bidang pelatihan kesehatan. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya peran bidang pada Dinas Kesehatan dalam pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi pengelolaan UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Permasalahan Kesehatan di daerah perbatasan pun menjadi hal penting yang perlu mendapatkan perhatian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, di samping perlu penguatan untuk mendukung pengembangan fasilitas dasar Kesehatan di kabupaten/kota yang menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan mendorong tersedianya fasilitas



Kesehatan di kabupaten/kota yang telah ditentukan menjadi Pusat kegiatan Lokal (PKL) di Jawa Barat.

3.2 Telaahan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

Dalam RPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, terdapat salah satu prioritas pembangunan yang telah disepakati yaitu Penguatan Sistem Kesehatan daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan fasilitas Kesehatan dan mutu pelayanan Kesehatan.
2. Peningkatan pelayanan Kesehatan ibu, anak, dan remaja
3. Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka mencapai Jabar *zero new stunting*
4. Peningkatan Pelayanan Penyakit Menular (AIDS, Tuberculosis, dan Malaria) yang komprehensif
5. Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular yang komprehensif
6. Pemenuhan tenaga Kesehatan/SDMK
7. Penguatan pembiayaan Kesehatan
8. Penguatan sistem informasi Kesehatan terintegrasi

Untuk mendukung prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kesehatan tersebut, Dinas Kesehatan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong agar dapat mengawal prioritas dan arah kebijakan dengan optimal.

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong yang Mempengaruhi Pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Arah kebijakan Pembangunan Kesehatan

No.	Prioritas Pembangunan & Arah kebijakan Pembangunan Kesehatan Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan PD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Analisis Faktor	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Belum optimalnya upaya kesehatan yang dilakukan baik Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi di Jawa Barat - Masih tingginya penyakit menular dan penyakit tidak menular - Masih kurangnya SDM Kesehatan dan distribusi Nakes yang tidak merata di beberapa daerah; - Masih kurangnya sarana dan parasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan sesuai standar - Masih terdapat kesulitan akses ke pelayanan kesehatan - Masih kurangnya Sosialisasi dan penyebaran informasi kesehatan pada berbagai media informasi. - Masih kurangnya koordinasi antar stakeholder dan Lintas Sektor terkait.	- Komitmen kebijakan dan pendanaaan untuk bidang kesehatan dari Pemerintah - Menjadi target/isu/sasaran prioritas pembangunan daerah. - Adanya regulasi terkait dengan penyelenggaraan kesehatan dan rancangan Perda Upaya Kesehatan jawa Barat - Terbukanya akses informasi melalui media social dan media elektronik lainnya. - Keterlibatan akademisi, dunia usaha, filantropi, dan media yang semakin kuat
		Belum optimalnya pembiayaan kesehatan di Provinsi Jawa Barat	- Perencanaan kebutuhan pembiayaan belum tepat sasaran - Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan - Kesesuaian data di lapangan yang tidak valid - Belum dilakukannya perhitungan PHA dan DHA sebagai instrument untuk melihat kebutuhan pembiayaan Kesehatan di Jawa Barat - Belum adanya regulasi jelas dan tegas mengenai pengeloaan sumber	- Perda Pelayanan Kesehatan & Pergub Pembiayaan Kesehatan - Komitmen pemerintah untuk memprioritaskan anggaran kesehatan dalam pembangunan - Banyaknya sumber-sumber pembiayaan kesehatan yang belum termanfaatkan



No.	Prioritas Pembangunan & Arah kebijakan Pembangunan Kesehatan Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan PD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Analisis Faktor	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pembiayaan BLUD untuk pembiayaan kesehatan	
		Belum terpenuhinya SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan sesuai standar	- Sentralisasi penyediaan SDM masih dilakukan oleh Pusat - Keterbatasan APBD untuk penyediaan nakes - Belum meratanya pemenuhan tenaga Kesehatan - faskes di daerah belum menghitung dengan berkelanjutan keterisian tenaga kesehatan melalui anjab abk yang sesuai dengan perkembangan pelayanan	- Adanya Program PTT nakes di daerah - Perda Penyelenggaraan pelayanan kesehatan - Perda Tenaga Kesehatan - Dukungan BOK untuk rekrutmen Tenaga Kontrak P3K di Puskesmas
		Belum optimalnya penatalaksanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan	- Belum terstandarisasi Rencana Kebutuhan Obat (RKO) - Belum adanya monitoring dan evaluasi pemanfaatan sediaan obat - Keterbatasan anggaran untuk ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan - Mahalnya harga dan operasionalisasi teknologi kesehatan - Masih kurangnya SDM yang mampu untuk mengoperasikan alat Kesehatan	- Tersedianya system aplikasi mulai dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi walaupun terpisah / belum terintegrasi - Dukungan anggaran DAK farmasi dan droping obat program dari Kemenkes - Banyaknya sumber-sumber pembiayaan yang dapat digunakan
		Belum optimalnya pengelolaan manajemen data dan informasi kesehatan serta regulasi kesehatan	- System informasi kesehatan masih belum terintegrasi sehingga membutuhkan waktu lama dalam pengumpulan data - Belum ada sistem manajemen yang menjamin penyediaan data akurat, up to Date (Mutakhir), aman, dan tersedia bagi pemakai (user) - Belum ada regulasi yang dapat memperkuat pengelolaan manajemen data dan informasi	- Dukungan jaringan 3G/4g/5G dan smartphone sudah tersedia - Infrastruktur teknologi informasi mudah diakses - Adanya Satu Data Jabar - Adanya Kebijakan Pemerintah terhadap digitalisasi informasi
		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	- Belum optimalnya peran LS/LP dalam pembangunan kesehatan - Kurangnya kemampuan advokasi ke pemangku kebijakan - Belum tersedianya kanal pengaduan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan - Belum optimalnya peran dan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan bidang kesehatan	- Terdapat komitmen kepala daerah dalam prioritas pembangunan daerah - Terdapat proporsi anggaran untuk kesehatan dalam APBD Daerah (Prov, kab/Kota, Kecamatan dan Desa) - Banyak organisasi/lembaga peduli kesehatan
		Masih Rendahnya Penelitian di Bidang Kesehatan	- Belum adanya kerja sama yang kuat dengan Lembaga penelitian dan RS provinsi - Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan	- Adanya perda pelayanan Kesehatan dan rancangan perda upaya Kesehatan - Pemprov jabar memiliki Badan Penelitian dan Pengembangan daerah - Adanya komitmen pemerintah pusat dan provinsi
2.	Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan Jawa Barat		-	
	a. Penguatan fasilitas Kesehatan dan mutu pelayanan Kesehatan	Belum optimalnya pengelolaan fasilitas Kesehatan dan mutu Kesehatan sesuai standar	- Keterbatasan anggaran dan - Masih ada RS dan puskesmas yang belum terakreditasi - Keterbatasan anggaran untuk penguatan RS & Puskesmas - Belum adanya blue print pengembangan fasyankes di Jawa Barat termasuk wilayah	- Adanya perda pelayanan Kesehatan dan rancangan perda upaya Kesehatan - Komitmen dan Kebijakan Pemerintah provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat



No.	Prioritas Pembangunan & Arah kebijakan Pembangunan Kesehatan Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan PD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Analisis Faktor	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pengembangan, pusat kegiatan, dan perbatasan - Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan	
	b. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja	Masih banyaknya angka kesakitan dan kematian pada ibu, anak, dan remaja	- Komitmen program dan anggaran dalam penerapan SPM di daerah masing-masing masih kurang - Belum ada integrasi program penanganan Kesehatan ibu, anak, dan remaja	- Adanya komitmen Pemda Provinsi melalui dukungan anggaran dan kebijakan lainnya - Tersediannya anggaran untuk program tersebut
	c. Peningkatan Pelayanan Penyakit Menular (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria) yang komprehensif	Belum terintegrasinya pengelolaan penyakit AIDS, TB, dan Malaria kesehatan Rumah Sakit sesuai standar	- Belum pahamnya pemerintah daerah dalam mengelola penyakit ATM secara komprehensif - Keterbatasan anggaran dalam pengelolaan penyakit ATM	- Adanya Kebijakan pusat mengenai perencanaan dan penganggaran penyakit ATM - Adanya pendampingan ADINKES dalam perencanaan pengelolaan penyakit ATM
	d. Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka mencapai Jabar zero new stunting	Belum seluruh indikator intervensi spesifik dapat tercapai sesuai target	- Program dan anggaran belum diarahkan dengan tepat untuk penanganan stunting secara komprehensif - Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan	- Komitmen nasional dan daerah - Kebijakan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi
	e. Pemenuhan tenaga Kesehatan/SDMK	Masih kurangnya pemenuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan primer dan rujukan	- keterbatasan kewenangan daerah dalam melakukan rekrutmen SDM kesehatan - Masih adanya puskesmas yang belum terakreditasi	- Adanya Perda Tenaga Kesehatan di Jawa Barat - Komitmen dan kebijakan pemerintah daerah provinsi terkait pembiayaan tenaga kesehatan
	f. Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular yang komprehensif	Masih rendahnya cakupan pelayanan pada penyakit tidak menular	- Komitmen program dan anggaran dalam penerapan SPM di daerah masing-masing masih kurang - Keterbatasan sumberdaya manusia Kesehatan yang memberikan pelayanan penyakit tidak menular - Keterbatasan anggaran dalam pelayanan penyakit tidak menular - Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan	- Adanya kebijakan program dan anggaran dari pemerintah pusat
	g. Penguatan pembiayaan Kesehatan	Belum optimalnya pembiayaan kesehatan di Provinsi Jawa Barat	- Perencanaan kebutuhan pembiayaan belum tepat sasaran - Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan - Kesuaian data di lapangan yang tidak valid - Belum adanya kerja sama dengan filantropi dalam pemanfaatan pembiayaan Kesehatan	- Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah - Perda Pelayanan Kesehatan & Pergub Pembiayaan Kesehatan - Komitmen pemerintah untuk memprioritaskan anggaran kesehatan dalam pembangunan - Terdapat sumber-sumber pembiayaan kesehatan yang belum termanfaatkan
	h. Penguatan sistem informasi Kesehatan terintegrasi	Belum optimalnya pengelolaan system informasi Kesehatan di Jawa Barat	- System informasi kesehatan masih belum terintegrasi sehingga membutuhkan waktu lama dalam pengumpulan data - Belum ada sistem manajemen yang menjamin penyediaan data akurat, up to Date (Mutakhir), aman, dan tersedia bagi pemakai (user) - Belum ada regulasi yang dapat memperkuat pengelolaan manajemen data dan informasi - Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan	- Dukungan jaringan 3G/4g/5G dan smartphone sudah tersedia - Infrastruktur teknologi informasi mudah diakses - Adanya Satu Data Jabar - Adanya Kebijakan Pemerintah terhadap digitalisasi informasi



No.	Prioritas Pembangunan & Arah kebijakan Pembangunan Kesehatan Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan PD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Analisis Faktor	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pengembangan di bidang kesehatan	

3.3 Telaahan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melalui Renstra Tahun 2024 – 2026 melakukan penyelarasan dengan melakukan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat termasuk faktor-faktor penghambat dan pendorongnya untuk setiap sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020–2024.

Tabel 3.4 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Kesehatan	Permasalahan Pelayanan PD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Analisis Faktor	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Belum optimalnya upaya kesehatan yang dilakukan baik Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat: Masih adanya kasus kematian ibu dan kematian bayi	- Masih kurangnya sarpras pertolongan persalinan di daerah, masih kurangnya nakes terlatih pertolongan persalinan, - kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya antenatal care	- Adanya Perda Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, - Adanya komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran untuk kesehatan ibu dan anak
2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Belum optimalnya upaya kesehatan yang dilakukan baik Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat: Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Belum adanya grand desain/ rencana induk peningkatan /pengembangan sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan di Jawa Barat.	- Adanya Perda Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, - Adanya komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran
3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Belum optimalnya upaya kesehatan yang dilakukan baik Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat: Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular	- Masih rendahnya upaya kesehatan promotif dan preventif. - Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular maupun penyakit tidak menular. - Terjadinya pergeseran penyakit menular menjadi penyakit tidak menular (Tripel Burden diseases).	- Adanya Perda Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, - Adanya komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran
4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Ketersediaan farmasi tidak sesuai dengan kebutuhan	- Upaya kesehatan promotif dan preventif masih belum menunjukan peningkatan terhadap penurunan angka kesakitan. - Macam layanan dan tenaga kesehatan di FKTP (puskesmas dan klinik swasta) belum cukup efektif dalam memberikan pelayanan promotif dan preventif yang berdampak terhadap menurunnya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM).	- Adanya Perda Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, - Adanya komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran
5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	Masih kurangnya kualitas, kuantitas, dan penyebaran SDM Kesehatan	Perencanaan dan kebijakan pengangkatan PNS tenaga kesehatan	Adanya Perda Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Adanya komitmen pemerintah dalam



No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Kesehatan	Permasalahan Pelayanan PD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Analisis Faktor	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			masih tersentralisasi di pusat	perencanaan dan penganggaran - Adanya Perda Tenaga Kesehatan
6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan	Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan kesehatan	- Belum terjalin kuat hubungan/kerjasama antara pemda dengan filantropi kesehatan dan CSR	- Adanya Perda Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Adanya komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran, - Jumlah filantropi peduli Kesehatan cukup banyak - Terdapat dana CSR perusahaan untuk kesehatan
		Belum tercapainya target Jaminan Kesehatan menuju <i>Universal Health Coverage</i> (UHC).	- Belum banyak masyarakat yang paham pentingnya jaminan kesehatan	- Adanya kebijakan Pemda yang menjamin masyarakat miskin mendapatkan jaminan kesehatan
7	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan	Belum terintegrasinya data sistem informasi kesehatan di tingkat provinsi	- Belum adanya regulasi manajemen system informasi kesehatan provinsi	- Adanya Perda Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Adanya komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran

Selain mempertimbangkan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, perlu diperhatikan pula Program Prioritas Transformasi Kesehatan yang terdiri dari 6 pilar transformasi yaitu Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan. Dinas Kesehatan akan melakukan adaptasi program/kegiatan terhadap 6 pilar tersebut melalui program prioritas/unggulan Kesehatan dalam rangka memperkuat Sistem Kesehatan Daerah sesuai prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang kesehatan tahun 2024-2026.

Tabel 3.5 Sandingan Program Transformasi Kesehatan dan Program Prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

No	Tranformasi Kesehatan	Program Prioritas
1	Transformasi Layanan Primer	- Pemenuhan Upaya Kesehatan - Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2	Transformasi Layanan Rujukan	Pemenuhan Upaya Kesehatan
3	Transformasi Ketahanan Kesehatan	- Pemenuhan dan Penatalaksanaan Sumber Daya Kesehatan - Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
4	Transformasi SDM Kesehatan	Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
5	Transformasi Pembiayaan Kesehatan	Pembiayaan Kesehatan
6	Transformasi Teknologi Kesehatan	- Digitalisasi Pelayanan Kesehatan - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat

Secara khusus disebutkan bahwa rencana pembangunan harus mempedomani RTRW dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka



menengah daerah melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan pembangunan dengan sasaran dan arah kebijakan serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. RTRW mengarahkan lokasi dan menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Barat. Kebijakan pengembangan wilayah, struktur ruang dan pola ruang, ditindaklanjuti dalam arahan pemanfaatan ruang berupa indikasi program utama sebagai perwujudan 4 (empat) sasaran penataan ruang Provinsi Jawa Barat. Indikasi program memuat indikasi program utama/indikator kegiatan sektoral yang perlu diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah, tahunan, dan sektoral.

Indikasi program yang berkaitan dengan bidang kesehatan adalah:

- 1) Indikasi program dalam perwujudan struktur ruang dalam hal penyediaan sarana prasarana minimal di pusat kegiatan nasional, (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu:
 - Pemenuhan sarana dan prasarana minimal di PKN yaitu pembangunan Rumah Sakit Tipe A;
 - Pemenuhan sarana prasarana minimal di PKW yaitu pembangunan Rumah Sakit Tipe B; dan
- 2) Pemenuhan sarana prasarana minimal di PKL yaitu pembangunan Rumah Sakit Tipe C dan pembangunan puskesmas PONED. Indikasi program dalam perwujudan pola ruang di mana kesehatan erat kaitannya dengan penyediaan infrastruktur pendukung bagi pengembangan pariwisata di Jawa Barat.
- 3) Indikasi program dalam kebijakan pengembangan wilayah perbatasan. Di setiap wilayah perbatasan antara Jawa Barat-Banten, Jawa Barat-Jawa Tengah, dan Jawa Barat-DKI Jakarta, berfokus pada aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum yang salah satu aspeknya adalah urusan kesehatan.

Tabel 3.6 Telaahan Struktur Ruang Provinsi Jawa Barat Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

No.	Rencana Struktur Ruang dan Fungsi Ruang	Indikasi Program	Pengaruh rencana struktur ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan lokasi pengembangan pelayanan PD
1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Mempunyai peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi, Kawasan ekonomi khusus.	• Penyediaan fasilitas Pelayanan kesehatan sesuai struktur ruang;	Perencanaan struktur ruang ini berpengaruh terhadap penyediaan layanan kesehatan yang akan diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Kawasan perkotaan Bodebek, Kawasan Bandung Raya, Kawasan Cirebon.
2	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Mempunyai peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala nasional.			Kota Sukabumi, Palabuhanratu, Cikampek-Cikopo, Pangandaran, dan Cidaun.



No.	Rencana Struktur Ruang dan Fungsi Ruang	Indikasi Program	Pengaruh rencana struktur ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan lokasi pengembangan pelayanan PD
3	Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Mempunyai wilayah pelayanan kabupaten/kota dan beberapa kecamatan			Cikarang-Cibitung, Cibinong, Cileungsi, Cigudeg, Cibadak, Cicurug, Sagaranten, Jampangkulon, Cikembar, Cianjur, Sindangbarang, Purwakarta, Karawang, Teluk Jambe barat, Soreang-Kutawaringin-Katapang, Cikalong Wetan, Padalarang, Sumedang, Tomo, Congeang, Pamanukan, Subang, Jalan Cagak, Pusakanagara, jatibarang, Losarang, Gantar, Arjawinangun, Sumber, Lemahabang, Palimanna, Ciledug, Majalengka, Kertajati, Kuningan, Cilimus, Garut, Cikajang, Pameungpeuk, Rancabuaya, Singaparna, Cikatomas, Mundu, Ciawi, Ciamis, Banjarsari, Kawali, Rancah, Banjar, dan Parigi.

Tabel.3.7 Telahaan Pola Ruang Provinsi Jawa Barat Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

No.	Rencana Pola Ruang	Indikasi Program	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
1	Kawasan peruntukan permukiman	• Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan unggulan sesuai spesifikasi kawasan.	Pengembangan fokus/unggulan layanan kesehatan pada Puskesmas perkotaan/perdesaan	Rencana pengembangan hunian vertical di Kawasan perkotaan Purwasuka.
2	Kawasan peruntukan perkantoran, perdagangan, dan jasa		Pengembangan fokus/unggulan layanan kesehatan pada Puskesmas Perkotaan	
3	Kawasan peruntukan industri dan pergudangan nasional/internasional		Pengembangan RSUD/Rumah Sakit Khusus Daerah dengan kekhususan spesifikasi layanan kesehatan tingkat lanjut/ rujukan.	• Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)-1 (Kab. Bogor, Kab Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang). • Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)-2 (Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka.
4	Kawasan peruntukan pariwisata skala nasional/internasional	• Pengembangan fasilitas pelayanan Kesehatan di Kawasan wisata sebagai destinasi wisata yang telah ditetapkan oleh Gubernur	• Penyediaan/ pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan (Primer/Rujukan) yang berfungsi sebagai utilitas Kawasan pariwisata skala nasional/ internasional. • Penyediaan/ Pengembangan Jejaring pelayanan kesehatan / rujukan di Kawasan pariwisata.	• Kawasan strategis ekowisata alam Puncak. • Kawasan strategis geowisata Palabuhanratu-Cileutuh-Ujunggenteng. • Kawasan strategis geowisata Tasikmalaya-Pangandaran.



No.	Rencana Pola Ruang	Indikasi Program	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
5	Kawasan rawan bencana alam	- Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). - Penguatan logistic kesehatan pasca bencana. - Penanggulangan penyakit pasca bencana.	- Integrasi ke dalam system SPGDT yang ada di Jawa Barat. - Perencanaan logistik kesehatan pasca bencana. - Surveilans dan pelayanan kesehatan pasca bencana.	Kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan gempa, Kawasan rawan banjir.

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan jangka menengah di Jawa Barat dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, dan adaptasi.



Gambar 3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals

KLHS RPD 2024-2026 dijadikan dasar dalam pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPD 2024-2026. Muatan KLHS RPD Tahun 2024-2026 terfokus pada 7 (tujuh) tujuan isu prioritas, yang sebagai berikut:

1. TPB 2: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
2. TPB 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
3. TPB 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
4. TPB 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
5. TPB 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
6. TPB 11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
7. TPB 13: Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.



Di antara 7 isu prioritas tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab dalam mengawal arah kebijakan di 5 TPB di atas yaitu:

- TPB 2: Pelayanan kesehatan masyarakat dalam penanggulangan gizi buruk melalui program peningkatan sumberdaya kesehatan, program upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
- TPB 3: Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak melalui program upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dan program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman; Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui program peningkatan sumberdaya kesehatan; Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui peran posyandu dan penyuluhan imunisasi, kesehatan dasar, dan kesehatan reproduksi kepada masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan, pencegahan, dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan pandemi; Pembinaan dan pemantauan masyarakat terkait pencegahan pandemi dan penyakit menular melalui program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat melalui program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
- TPB 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
- TPB 6: Sosialisasi dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
- TPB 13: Memperkuat sektor ketahanan kesehatan yang adaptif terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di Jawa Barat.

Berdasarkan telaahan RTRW Provinsi Jawa Barat dan kajian KLHS perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Dari kelima tujuan TPB tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berkontribusi dalam pencapaian indikator PT sebagai berikut:

Tabel. 3.8 Telaahan Implikasi RTRW dan KLHS Terhadap Renstra Dinas Kesehatan Povinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

No	RTRW / KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Dinkes Provinsi Jawa Barat	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	WP Bodebekpunjur	Diperlukan perencanaan melengkapi fasilitas Kesehatan di PKL,	Pengembangan RSUD Cibinong sebagai RS Rujukan Regional tidak sesuai dengan arah pengembangan wilayah.	Sumber daya kesehatan berlimpah (RS swasta, nakes)
2	WP Purwasuka	Melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan di PKW dan PKL.	Di Kab. Subang masih kekurangan nakes dan layanan kesehatan swasta masih kurang.	Diarahkan untuk melengkapi RSUD Karawang sebagai RS Rujukan Regional.
3	WP Ciayumajakuning	Melengkapi fasilitas kesehatan di PKN, PKW, PKL.	Belum adanya RSUD di Kuningan sebelah Timur yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.	- Melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan pendukung PKN Bandara Internasional Kertajati - Diarahkan untuk melengkapi RSUD Gunungjati sebagai RS Rujukan Regional. - Melengkapi RS Paru Provinsi Jawa Barat sebagai rujukan pelayanan paru di Jawa Barat.
4	WP Priangan Timur & Pangandaran	Melengkapi fasilitas kesehatan di PKN, PKW, PKL	Pengembangan RSUD Pameungpeuk terkendala penetapan wilayah Pameungpeuk sebagai PKL.	- Diarahkan untuk melengkapi RSUD dr. Soekardjo sebagai RS Rujukan Regional. - Melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan pendukung PKW Pangandaran. - Pengusulan KEK Pariwisata Pangandaran.



No	RTRW / KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Dinkes Provinsi Jawa Barat	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				Adanya RSUD Pameungpeuk di wilayah Garut.
5	WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung	Melakukan pemantauan terhadap dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat pembangunan	Tidak terkendalinya kesehatan lingkungan	Sumber daya kesehatan berlimpah (RS swasta, nakes)
6	WP Sukabumi	Melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan di PKN, PKW, dan PKL	Pengembangan RSUD Jampangkulon terkendala penetapan wilayah Jampangkulon sebagai PKL.	- Adanya KEK Sukabumi - Melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan pendukung PKW Pelabuhanratu. - Adanya RSUD Jampangkulon.

3.6. Penentuan Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah tersebut di masa datang.

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2018-2023, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, arah kebijakan pembangunan Kesehatan dalam RPD Tahun 2024-2026, serta implikasi RTRW dan KLHS Provinsi Jawa Barat, maka isu strategis yang akan ditangani dalam 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Penurunan jumlah kesakitan dan kematian ibu, anak, dan remaja
2. Pemenuhan dan penatalaksanaan sumber daya kesehatan;
3. Penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular yang komprehensif
4. Penurunan kasus stunting baru;
5. Penerapan SPM Kesehatan;
6. Pencegahan dan pengendalian penyakit AIDS-Tuberculosis-Malaria (ATM) secara konvergensi;
7. Pemanfaatan teknologi (digitalisasi) dalam pelayanan Kesehatan
8. Pengembangan dan penguatan pelayanan kesehatan di wilayah pengembangan, pusat-pusat kegiatan dan wilayah perbatasan;
9. Pengembangan UOBK Rumah Sakit milik Provinsi Jawa Barat dan
10. Pengelolaan BLUD UPTD dan UOBK RS di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
11. Penelitian dan pengembangan bidang Kesehatan;

Merujuk pada isu strategis di atas dengan menggunakan beberapa kriteria di bawah ini, Dinas Kesehatan melakukan penentuan prioritas terhadap isu-isu tersebut dengan melakukan pembobotan.

Tabel 3.9 Kriteria Pembobotan

NO	KRITERIA	BOBOT
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi	20
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan Masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	20

Dengan menggunakan rentang nilai 1-5 dimana nilai 1 = rendah, 2 = sedang, 3 = agak tinggi, 4 = tinggi, 5 = sangat tinggi, maka nilai yang didapat akan dikalikan dengan bobot



yang sudah ditentukan di masing-masing kriteria untuk mendapatkan total skor sebagai penentu peringkat masing-masing isu.

Tabel 3.10 Nilai Pembobotan Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria					Total Skor	Peringkat
		1	2	3	4	5		
1	Penurunan jumlah kesakitan dan kematian ibu, anak, dan remaja	100	60	100	80	40	380	4
2	Pemenuhan dan penatalaksanaan sumber daya Kesehatan	80	60	80	80	60	360	5
3	Penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular yang komprehensif	80	80	100	40	40	340	8
4	Penurunan kasus stunting baru	100	80	100	80	60	420	2
5	Penerapan SPM Kesehatan	100	100	80	80	80	440	1
6	Pencegahan dan pengendalian penyakit AIDS-Tuberculosis-Malaria (ATM) secara konvergensi	100	80	80	80	40	380	3
7	Pemanfaatan teknologi (digitalisasi) dalam pelayanan Kesehatan	60	60	80	80	40	320	10
8	Pengembangan dan penguatan pelayanan kesehatan di wilayah pengembangan, pusat-pusat kegiatan dan wilayah perbatasan	60	100	80	80	40	360	6
9	Pengembangan UOBK Rumah Sakit milik Provinsi Jawa Barat	40	100	80	60	80	360	7
10	Pengelolaan BLUD UPTD dan UOBK RS di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	40	100	60	60	80	340	9
11	Penelitian dan pengembangan bidang Kesehatan	60	40	60	80	60	300	11

Berdasarkan hasil penilaian dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan, maka urutan prioritas isu yang menjadi fokus Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Penerapan SPM kesehatan;
2. Penurunan kasus stunting baru
3. Pencegahan dan pengendalian penyakit AIDS-Tuberculosis-Malaria (ATM) secara konvergensi;
4. Penurunan jumlah kesakitan dan kematian ibu, anak, dan remaja
5. Pemenuhan dan penatalaksanaan sumber daya Kesehatan
6. Pengembangan pelayanan kesehatan di wilayah pengembangan, pusat-pusat kegiatan dan wilayah perbatasan
7. Pengembangan UOBK Rumah Sakit milik Provinsi Jawa Barat
8. Penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular yang komprehensif
9. Pengelolaan BLUD UPTD dan UOBK RS di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
10. Pemanfaatan teknologi (digitalisasi) dalam pelayanan Kesehatan
11. Penelitian dan pengembangan bidang Kesehatan





BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengacu tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024 - 2026 yang akan diwujudkan dalam 3 (tiga) tahun ke depan yang disertai dengan ukuran keberhasilan (indikator kinerja). Adapun tujuan dan sasaran pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yang secara langsung berkaitan dengan urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Arah Kebijakan RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Penguatan fasilitas Kesehatan dan mutu pelayanan Kesehatan. 2. Peningkatan pelayanan Kesehatan ibu,anak dan remaja 3. Peningkatan Pelayanan Penyakit Menular (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria) yang komprehensif. 4. Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka mencapai Jabar <i>zero new stunting</i> 5. Pemenuhan tenaga Kesehatan/SDMK 6. Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular yang komprehensif 7. Penguatan pembiayaan Kesehatan 8. Penguatan sistem informasi Kesehatan terintegrasi

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, Dinas Kesehatan telah merumuskan tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat yang diukur melalui indikator kinerja Angka Harapan Hidup (AHH). Indikator AHH yang digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan hasil kesepakatan bersama Bappeda dan Biro Organisasi untuk mengawal ketercapaian indikator daerah bidang Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dimana Dinas Kesehatan merupakan dinas pengampu utama (tunggal) indikator dimaksud.

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan derajat kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,90	74,10	74,29

Definisi operasional dari IKU Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Definisi Operasional IKU

Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Sumber Data
Angka Harapan Hidup	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.	LEI = Life Expectancy - 25/85-25	BPS



Angka harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar. Semakin tingginya angka harapan hidup di Jawa Barat menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal itu berdasarkan atas penghitungan angka harapan hidup sendiri dengan menggunakan rata-rata anak yang dilahirkan hidup, serta rata-rata anak yang masih hidup pada periode sensus. Jika angka kematian bayi tinggi, maka harapan hidup akan rendah, begitu pula sebaliknya.

Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan kesehatan Jawa Barat di mana akses terhadap fasilitas kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing diharapkan fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Jawa Barat khususnya milik pemerintah dapat menampilkan pelayanan terbaik dan berkualitas kepada masyarakat sehingga dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap pelayanan fasilitas kesehatan milik pemerintah yang selama ini sebagian besar masih dipandang berada di bawah performa fasilitas kesehatan milik swasta atau perorangan.

Khusus bagi rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seluruh rumah sakit yang berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi didorong untuk terus mempertahankan capaian akreditasi paripurna sebagai bentuk pengakuan terhadap mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, UPTD yang berada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi dapat menerapkan manajemen pengelolaan keuangan yang lebih mandiri melalui BLUD.

4.2 Arah Pengembangan UPTD dan UOBK di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Dinas Kesehatan provinsi Jawa Barat memiliki 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu Laboratorium kesehatan dan Unit pelatihan kesehatan serta 6 Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK). Arah pengembangan UOBK dan UPTD harus selaras dengan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026.

- A. UOBK Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat
 - A.1. RSUD Al Ihsan

Rencana pengembangan RSUD Al Ihsan 2024-2026 adalah menjadikan rumah sakit tipe A dengan konsep wisata medis melalui Pelayanan Unggulan Jantung, kanker dan bedah estetika dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan rujukan di Jawa Barat.
 - A.2. RSUD Jampangkulon

Rencana Pengembangan RSUD Jampangkulon Tahun 2024-2026 adalah menaikkan kelas rumah sakit menjadi Tipe B Pendidikan dengan layanan dengan unggulan Pusat Layanan Jantung Terpadu, Pusat Pelayanan Urologi dan Nefrologi, serta pengembangan *medical tourism*.
 - A.3. RSUD Pameungpeuk

RSUD Pameungpeuk menjadi pusat rujukan pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak di Jabar Selatan. Untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 2024-2026, RSUD Pameungpeuk akan melengkapi sarana dan prasarana terutama pelayanan spesialis dengan didukung sistem informasi rumah sakit yang handal.
 - A.4. RSUD Kesehatan Kerja

Rencana pengembangan RSUD Kesehatan Kerja tahun 2024-2026 adalah menjadi rumah sakit Tipe B dengan unggulan pusat rujukan kesehatan kerja berstandar internasional.
 - A.5. RS Paru Sidawangi

Pengembangan RS Paru Sidawangi ke depan menjadi rumah sakit umum dengan unggulan paru terlengkap dan berkelas dunia serta menjadi rumah sakit infeksi tipikal, dengan melengkapi sarana prasarana dan penyediaan gedung sesuai dengan standar



perumahsakitan berdasarkan *master plan*, FS, dan DED, serta mendukung program Layanan Prioritas Respirasi dan Tuberkulosis, Pengembangan Satpel dengan menambah Layanan Laboratorium Kultur.

A.6. RS Jiwa

Rencana Pengembangan RS Jiwa Tahun 2024-2026 menjadi pusat pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif berbasis teknologi informasi serta peningkatan status RS Pendidikan Afiliasi dan RS Pendidikan satelit.

B. UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

B.1. UPTD Laboratorium Kesehatan (Labkes)

Arah pengembangan UPTD Labkes Tahun 2024-2026 menjadi laboratorium rujukan daerah/nasional untuk beberapa layanan diantaranya menjadi Pusat Rujukan Laboratorium Biomolekuler, Pusat Rujukan Laboratorium Mikrobiologi Lingkungan, Pusat Layanan Kalibrasi Alat Kesehatan, Pusat Layanan Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Kesehatan Tingkat Jawa Barat (Regional Maintenance Center/ RMC), Rujukan Pemeriksaan *New/Re Emerging Diseases* di Jawa Barat serta menjadi Labkesmas Tier 3 Sesuai Standar dan menjadi Pusat Uji Profisiensi Laboratorium di Jawa Barat.

B.2. UPTD Unit Pelatihan Kesehatan (Upelkes)

Upelkes didorong untuk dapat menjadi unit yang menerapkan BLU dalam system manajemen keuangannya sehingga Upelkes dapat menentukan arah kebijakannya sendiri sesuai kebutuhan pengguna dan mendukung pengembangannya sebagai *Corporate University* di Jawa Barat dalam bidang pelatihan kesehatan.



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra tahun 2024-2026 agar dapat mengatasi permasalahan dan isu kesehatan di Provinsi Jawa Barat.

Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 menjadi konsekuensi logis ketika sektor kesehatan akan bertransformasi. Perubahan tersebut mencakup 6 (enam) hal prinsip atau disebut sebagai pilar transformasi kesehatan yang juga merupakan bentuk penerjemahan reformasi sistem kesehatan nasional, yaitu:

1. Transformasi Layanan Primer, mencakup upaya promotif dan preventif yang komprehensif, perluasan jenis antigen, imunisasi, penguatan kapasitas dan perluasan skrining di layanan primer dan peningkatan akses, SDM, obat dan kualitas layanan serta penguatan layanan laboratorium untuk deteksi penyakit atau faktor risiko yang berdampak pada masyarakat;
2. Transformasi Layanan Rujukan, yaitu dengan perbaikan mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit, dan layanan laboratorium kesehatan masyarakat;
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah penyakit/kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan, penguatan surveilans yang memadai berbasis komunitas dan laboratorium, serta penguatan sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan;
4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan, untuk menjamin pembiayaan yang selalu tersedia dan transparan, efektif dan efisien, serta berkeadilan;
5. Transformasi SDM Kesehatan, dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis, dan kapasitas SDM kesehatan; dan
6. Transformasi Teknologi Kesehatan, yang mencakup: (1) integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, (2) integrasi dan pengembangan sistem aplikasi kesehatan, dan (3) pengembangan ekosistem (teknologi kesehatan (regulasi/kebijakan yang mendukung, memberikan kemudahan/fasilitas, pendampingan, pembinaan serta pengawasan yang memudahkan atau mendukung bagi proses pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan) yang disertai peningkatan tatakelola dan kebijakan kesehatan.

Berikut strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat:

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026**

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	STRATEGI RENSTRA	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Penguatan sistem kesehatan daerah provinsi	• Meningkatkan upaya kesehatan dengan memperkuat layanan primer dan rujukan • Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan Kesehatan untuk peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan; • Meningkatkan jumlah, mutu dan persebaran sumberdaya manusia Kesehatan; • Meningkatkan ketahanan farmasi/alat kesehatan dan ketahanan tanggap darurat • Menguatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan • Menguatkan digitalisasi pengelolaan manajemen data dan informasi serta regulasi Kesehatan

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	STRATEGI RENSTRA	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
			- Meningkatkan sistem pengendalian dan penguatan pengawasan di Bidang Kesehatan. - Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Kesehatan serta pemanfaatannya
		Penerapan SPM sesuai standar	Meningkatkan pelaksanaan SPM secara terpadu
		Peningkatan pelayanan kesehatan	- Memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah pengembangan, pusat-pusat kegiatan dan wilayah perbatasan - Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan UPTD/UOBK RS - Meningkatkan kualitas dan perluasan layanan RS provinsi - Memperkuat pembinaan dan pengelolaan BLUD pada UPTD Dinas Kesehatan
		Penguatan dan percepatan intervensi konvergensi stunting	Memperkuat dan mempercepat Intervensi Spesifik dan Sensitif terintegrasi lingkup Kesehatan

Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sudah mengadaptasi pesan transformasi kesehatan yang saat ini tengah dilaksanakan oleh pemerintah pusat agar transformasi Kesehatan yang akan dilakukan di Provinsi Jawa Barat dapat mendukung tercapainya target yang diharapkan.

Selain itu, strategi dan arah kebijakan ini juga menjadi arah bagi pelaksanaan program unggulan/prioritas bidang Kesehatan 2024-2026, yaitu:

1. **Penguatan Sistem Kesehatan Daerah**

a. **Layad rawat**

Mendorong kesinambungan dan kemandirian Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan Layad rawat melalui kegiatan advokasi kepada Kepala daerah Kabupaten/ Kota untuk dukungan penyelenggaraan *Call Center* PSC 119 sebagai upaya peningkatan penanggulangan gawat darurat terpadu, penguatan program Layad rawat, pembinaan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Layad rawat, monitoring serta evaluasi.

b. **Pembangunan dan revitalisasi UOBK Rumah Sakit dan UPTD**

Pembangunan gedung dan perbaikan gedung rumah sakit dilakukan dalam rangka meningkatkan akses pelayanan Kesehatan rujukan di UOBK Provinsi dan daerah kabupaten/kota terutama di daerah perbatasan yang menjadi kewajiban provinsi, pengembangan pelayanan Kesehatan di wilayah pengembangan dan pusat kegiatan lokal, meningkatkan sarana prasarana, alat kesehatan rumah sakit dan puskesmas sesuai dengan standar. Membantu kab/kota dalam pembangunan rumah sakit baru dalam upaya peningkatan/pemerataan akses pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan rasio jumlah tempat tidur perawatan dengan jumlah penduduk di wilayah kabupaten/kota. Pembangunan dan revitalisasi rumah sakit meliputi pembangunan rumah sakit baru, merevitalisasi rumah sakit yang kurang layak, dan melakukan revitalisasi rumah sakit terutama Rumah Sakit milik Provinsi dalam rangka penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit terutama untuk layanan 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrologi) dan sarana rumah sakit mampu PONEK;

c. **Jaminan kesehatan masyarakat miskin yang terintegrasi dengan jaminan kesehatan nasional (JKN).**

Membantu subsidi pembayaran premi jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin berupa Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi dan mengalokasikan anggaran pembiayaan dan jaminan kesehatan daerah pada rumah sakit milik Provinsi Jawa Barat.



d. Penanganan Stunting

Penguatan dan percepatan intervensi konvergensi stunting membutuhkan dukungan Kerjasama berbagai pihak mengingat target Jawa Barat yang ditetapkan oleh pusat di tahun 2024 adalah 14%. Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyusun *logical framework* penurunan prevalensi stunting di Jawa Barat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Kesehatan menyusun rencana aksi penurunan stunting agar setiap program/kegiatan terarah dan dapat dipantau ketercapaian target yang diharapkan.

e. Cakupan Imunisasi Rutin Lengkap

Program Imunisasi tahun 2024-2026 difokuskan untuk meningkatkan cakupan Imunisasi Rutin Lengkap meliputi Imunisasi Dasar pada Bayi, bayi di bawah 2 (dua) tahun) dan Imunisasi anak usia sekolah di Jawa Barat. Semua anak memiliki akses dan kesempatan mendapatkan imunisasi (tanpa memandang status sosial, ekonomi, geografis, dan jenis kelamin).

f. Pemenuhan 9 (Sembilan) Tenaga Kesehatan di Puskesmas.

Posisi Jawa Barat yang berada di level terbawah di antara provinsi di pulau Jawa dengan capaian hanya sekitar 50,23% per Februari 2023 menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan akselerasi pengadaan 9 jenis nakes sesuai standar melalui fasilitasi internal (redistribusi, pengembangan karir, peningkatan kompetensi) dan fasilitasi eksternal pendayagunaan tenaga kesehatan.

g. Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, Obat-obatan dan Pemenuhan SPM

Jawa Barat masih menghadapi penyakit menular yang belum teratasi, penyakit baru baik penyakit menular maupun tidak menular, dan penyakit yang sudah hilang muncul kembali. Jawa Barat juga perlu meningkatkan kesiapan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana, KLB dan/atau berpotensi KLB/Bencana Provinsi, serta penguatan sistem ketahanan kesehatan daerah melalui penatalaksanaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

2. Program Prioritas Lainnya

Amanat lainnya yang perlu diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan dan melaksanakan indikator program pemanfaatan ruang yang diamanatkan di dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2042 yang disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi agar dapat mengawal dan melakukan optimalisasi pelayanan Kesehatan di wilayah pengembangan, pusat-pusat kegiatan dan wilayah perbatasan baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi yang berbatasan. Hal ini dilakukan agar pelayanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa dibatasi wilayah sesuai sasaran Dinas Kesehatan sampai dengan tahun 2026 ke depan.

Program prioritas lainnya juga berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang harus menterjemahkan prioritas pembangunan bidang kesehatan yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah.



BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Dengan berdasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dirumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Bidang dan UOBK/UPTD yang ada pada struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Program dan Kegiatan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Barat terkait dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. Program dan Kegiatan tersebut disusun mengacu ke Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. Arah program Dinas Kesehatan yang akan dilaksanakan tahun 2024-2026 dengan mengadaptasi program Transformasi Kesehatan, sebagai berikut:

1. Pemenuhan Upaya Kesehatan
2. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Pembiayaan Kesehatan
4. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
5. Pemenuhan dan Penatalaksanaan Sumber Daya Kesehatan
6. Digitalisasi Pelayanan Kesehatan
7. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 2024-2026 terdapat arahan kegiatan prioritas yang perlu menjadi perhatian dalam merumuskan program dan kegiatan, yaitu:

1. Pengembangan RS khususnya pada kawasan metropolitan REBANA dan Jabar Selatan;
2. Pengembangan peningkatan layanan puskesmas;
3. Pemenuhan alat kesehatan RS dan Puskesmas;
4. Layanan *Call Center* (Layad Rawat);
5. Pengobatan TB;
6. Eliminasi Malaria;
7. Pengobatan HIV/AIDS;
8. Deteksi dini penyakit;
9. Penatalaksanaan kasus kesehatan jiwa;
10. Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) melalui penugasan khusus
11. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM;
12. Kontribusi PBI-JK dan Bankeu Jaminan Kesehatan untuk PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah;
13. Peningkatan Gerakan Masyarakat Sehat melalui 5 kluster Germas;
14. Pemberian makanan tambahan kepada Balita dan ibu hamil kurang energi kronik (KEK)
15. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada Remaja Putri;

Selain arahan kegiatan prioritas di atas, beberapa indikasi program pemanfaatan ruang yang menjadi tugas Dinas Kesehatan untuk mengawal dan melaksanakannya, diantaranya:



- a. Wilayah Pengembangan: penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di WP Bodebekjur, Ciayumajakuning, Purwasuka, Sukabumi dan sekitarnya, Priangan Timur-Pangandaran, dan Cekungan Bandung.
- b. Pusat-pusat Kegiatan:
 - Pemenuhan sarana dan prasarana minimal di PKN yaitu pembangunan Rumah Sakit Tipe A.
 - Pemenuhan sarana dan prasarana minimal di PKW yaitu pembangunan Rumah Sakit Tipe B
 - Pemenuhan sarana dan prasarana minimal di PKL yaitu pembangunan Rumah Sakit Tipe C
 - Pembangunan puskesmas PONEK
- c. Wilayah perbatasan:
 - Kerjasama dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular bagi masyarakat di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah (Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan)
 - Kerjasama dalam pembiayaan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat di daerah perbatasan
 - Kerjasama dalam pengendalian dan pencegahan penyakit menular di daerah perbatasan

Sebagaimana diketahui bahwa prioritas bidang kesehatan yaitu untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

1. Penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
2. Peningkatan kesehatan ibu, anak & penurunan stunting
3. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama Tuberkulosis (TBC), Human Immunodeficiency Virus (HIV), dan malaria;
4. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama Diabetes Melitus dan Hipertensi;
5. Penguatan jejaring layanan primer dan penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrologi) dan sarana rumah sakit mampu PONEK;
6. Penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana laboratorium Kesehatan masyarakat (labkesmas) dan laboratorium Kesehatan daerah (labkesda);
7. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

Berpedoman pada arahan program Dinas Kesehatan 2024-2026, indikasi kegiatan prioritas RPD 2024-2026, dan pemanfaatan ruang dalam Perda RTRW, serta memperhatikan prioritas nasional yang harus didukung dalam pelaksanaannya, berikut program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan digunakan selama tahun 2024-2026 berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, yaitu:

- I. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,** dengan sasaran program adalah meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat, meningkatnya kesehatan keluarga, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan, meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, terkendalinya penyakit menular dan tidak menular, terkendalinya penyakit pada saat bencana dan KLB, meningkatnya jaminan kesehatan masyarakat. Adapun kegiatan, sebagai berikut:
 1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dengan sasaran sebagai berikut:



- a. Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat
- b. Meningkatnya layanan perorangan dan masyarakat
- c. Meningkatnya layanan kesehatan lingkungan
- d. Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas
- e. Terbangunnya penguatan tata Kelola rumah sakit
- f. Terlayannya Kesehatan di waktu bencana/KLB, meningkatnya layanan
- g. Tersedianya pembiayaan dan jaminan kesehatan
- h. Meningkatnya layanan kesehatan di lingkungan RSUD Al Ihsan

dengan Sub Kegiatan:

- 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu dan anak;
- 2) Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan gizi masyarakat ;
- 3) Pengelolaan Kesehatan usia produktif dengan sasaran terlaksananya pengelolaan kesehatan usia produktif ;
- 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan usia lanjut;
- 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan sasaran terlaksananya pengelolaan Kesehatan lingkungan;
- 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan haji;
- 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga;
- 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular;
- 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan masalah Kesehatan jiwa (ODMK);
- 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;
- 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat KLB dan/atau berpotensi KLB;
- 12) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan sasaran terlaksananya pengelolaan jaminan Kesehatan masyarakat;
- 13) Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan dengan sasaran terbinanya pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan;
- 14) Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan sasaran terlaksananya pendampingan fasilitasi pelayanan kesehatan;
- 15) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dengan sasaran tersedianya dan terkelolanya Public Safety Center (PSC) 119 yang terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu system penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT);
- 16) Pengelolaan surveilans Kesehatan dengan sasaran terlaksananya pengelolaan surveilans Kesehatan;
- 17) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi masyarakat;
- 18) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan khusus;



- 19) Operasional Pelayanan Rumah Sakit dengan sasaran tersedianya operasional pelayanan rumah sakit.;
- 20) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat RSUD Al Ihsan
2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan medik sesuai standar di RSUD Pameungpeuk
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan perawatan sesuai standar di RSUD Pameungpeuk
 - c. Meningkatnya pelayanan penunjang medik di RSUD Pameungpeuk
3. Meningkatnya layanan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan di RSUD Al Ihsan dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan dengan sasaran tersedianya prasarana fasilitas layanan Kesehatan;
 - 2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan dengan sasaran tersedianya alat kesehatan/alat penunjang medis fasilitas layanan Kesehatan;
 - 3) Pengembangan Rumah Sakit dengan sasaran tersedianya rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit;
 - 4) Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya dengan sasaran tersedianya bahan habis pakai lainnya spre, handuk, dan habis pakai lainnya);
 - 5) Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya dengan sasaran terpenuhinya rumah sakit dengan rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000;
 - 6) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan sasaran tersedianya fasilitas Kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar;
 - 7) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan sasaran terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan alat Kesehatan pada fasilitas Kesehatan lainnya;
 - 8) Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan dengan sasaran terpeliharanya alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan Kesehatan;
 - 9) Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan sasaran tersedianya obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya;
 - 10) Distribusi alat Kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas Kesehatan lainnya dengan sasaran terlaksananya distribusi alat Kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas Kesehatan lainnya;
 - 11) Pengembangan Rumah Sakit RSUD Al Ihsan;
 - 12) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan RSUD Al Ihsan;
 - 13) Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) RSUD Al Ihsan.
4. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, dengan sasaran tersedianya sistem informasi Kesehatan yang terintegrasi, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan dengan sasaran terlaksananya pengelolaan data dan informasi Kesehatan;
 - 2) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dengan sasaran terlaksananya pengelolaan system informasi Kesehatan.



5. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat dengan sasaran tersedianya rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan Kesehatan yang dikendalikan, diawasi, dan ditindaklanjuti perijinannya, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan dengan sasaran terlaksananya peningkatan mutu pelayanan fasilitas Kesehatan;
 - 2) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dengan sasaran terlaksananya peningkatan tata Kelola rumah sakit;
 - 3) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan sasaran meningkatnya tata Kelola rumah sakit sesuai standar.

II. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan sasaran program adalah meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan. Adapun kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi dengan sasaran meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan dan meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan dan pemenuhan tenaga kesehatan, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia Kesehatan di fasilitas Kesehatan yang memenuhi standar;
 - 2) Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sasaran terlaksananya distribusi dan pemerataan sumber daya manusia Kesehatan.
2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sasaran meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah provinsi, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sasaran terlaksananya pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia Kesehatan;
 - 2) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sasaran terlaksananya peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia Kesehatan.

III. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dengan sasaran program adalah meningkatnya kualitas sediaan farmasi dan alat kesehatan. Adapun kegiatan sebagai berikut:

1. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dengan sasaran meningkatnya sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang terverifikasi, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK dengan sasaran terbinanya pelaku usaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
2. Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dengan sasaran terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT), dengan sub kegiatan:
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional terbinanya pelaku usaha sarana usaha kecil obat tradisional (UKOT) sesuai standar.

IV. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan sasaran program adalah meningkatnya perilaku hidup sehat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan. Adapun kegiatan sebagai berikut:



1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan sasaran meningkatnya partisipasi mitra dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan sub kegiatan:
 - 1) Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan sasaran terlaksananya advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat provinsi
2. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi dengan sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan sasaran terselenggaranya promosi Kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat.

V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran program adalah terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Adapun kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan sasaran tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Kesehatan;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan sasaran tersedianya dokumen RKA dinas Kesehatan dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA Dinas Kesehatan;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan sasaran tersedianya dokumen DPA Dinas Kesehatan dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA Dinas Kesehatan;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan sasaran tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Kesehatan.
 - 5) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan sasaran tersusunnya dokumen perencanaan program dan evaluasi pelaporan di lingkungan RSUD Al Ihsan
2. Administrasi Keuangan dengan sasaran terlaksananya administrasi keuangan Dinas Kesehatan, dengan sub kegiatan:
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan sasaran tersedianya laporan keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan;
 - 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan sasaran tersedianya gaji dan tunjangan ASN;
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan sasaran terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Dinas Kesehatan;
 - 4) Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan sasaran tersedianya laporan bulanan/triwulanan/semesteran Dinas Kesehatan dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester Dinas Kesehatan.
3. Administrasi Kepegawaian dengan sasaran terlaksananya administrasi kepegawaian Dinas Kesehatan, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan sasaran terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;



- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan sasaran terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
- 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sasaran terlaksananya administrasi umum Dinas Kesehatan, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan sasaran tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan sasaran tersedianya barang cetakan dan penggandaan;
 - 3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan sasaran terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Kesehatan;
 - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan sasaran tersedianya peralatan rumah tangga;
 - 5) Fasilitas Kunjungan Tamu dengan sasaran terlaksananya fasilitas kunjungan tamu;
 - 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan sasaran tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSUD Al Ihsan;
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD RSUD Al Ihsan.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sasaran terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan sasaran tersedianya sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - 2) Pengadaan Mebel RSUD Al Ihsan;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sasaran tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan sasaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan sasaran tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan sasaran tersedianya jasa pelayanan umum kantor.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sasaran terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan sasaran tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan sasaran terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan sasaran terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan sasaran terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya.



8. Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sasaran meningkatnya pelayanan BLUD, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan sasaran tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan;
 - 2) Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD dilaksanakan merujuk pada kebutuhan Renstra masing-masing Rumah Sakit UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan pendanaan bersumber dari pendapatan jasa pelayanan BLUD;
 - 3) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Al Ihsan.

Adapun penyajian Rencana Program dan Kegiatan , Indikator Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 -2026 tersedia pada tabel terlampir.





Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2024-2026

Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING												
MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT												
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT						7.646.052.571		9.963.915.392		11.417.746.420		29.027.714.383
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase kab/kota dengan target IKS> 60%	persen	-	3,70	5.163.200.460	7,40	6.019.520.506	11,11	6.714.472.557	11,11	17.897.193.523
		Persentase Kab/kota yang melaksanakan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan	persen	-	18,00	622.151.840	30,00	650.000.000	40,00	750.000.000	40,00	2.022.151.840
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase kab/kota yang melakukan pengelolaan/penerapan indikator keluarga sehat 100 persen	persen	100,00	100,00	5.023.200.460	100,00	5.669.520.506	100,00	6.364.472.557	100,00	17.057.193.523
		Persentase Kab Kota yang melaksanakan program STBM	persen	-	37,00	622.151.840	44,00	650.000.000	55,00	750.000.000	55,00	2.022.151.840
		Persentase Jemaah Haji Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Haji	persen	100,00	100,00	140.000.000	100,00	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00	840.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	dokumen	6,00	6,00	2.214.478.200	6,00	2.435.926.020	6,00	2.679.518.622	18	7.329.922.842
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	dokumen	-	1,00	157.340.100	1,00	173.074.110	1,00	190.381.521	3	520.795.731
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	dokumen	1,00	1,00	152.796.100	1,00	168.075.710	1,00	184.883.281	3	505.755.091
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	8,00	16,00	2.338.586.060	16,00	2.572.444.666	16,00	2.829.689.133	48	7.740.719.859
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	6,00	3,00	160.000.000	4,00	320.000.000	4,00	480.000.000	11	960.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	7,00	7,00	622.151.840	7,00	650.000.000	7,00	750.000.000	21	2.022.151.840
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	dokumen	5,00	5,00	140.000.000	6,00	350.000.000	6,00	350.000.000	17	840.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan rumah tangga ber-PHBS >80%	persen	37,00	70,00	1.027.697.866	75,00	2.294.792.000	80,00	2.753.750.400	80,00	6.076.240.266



Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
		Persentase Kerjasama/kemitraan Tingkat Daerah Provinsi (Evaluasi Pelaksanaan dan Implementasi PKS-nya)	persen	-	5,00	833.002.405	10,00	999.602.886	15,00	1.199.523.463	15,00	3.032.128.754
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya advokasi Kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat, dan lintas sector tingkat daerah provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Kebijakan Germas	persen	92,59	92,59	833.002.405	96,30	999.602.886	100,00	1.199.523.463	100,00	3.032.128.754
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	dokumen	-	6,00	833.002.405	7,00	999.602.886	7,00	1.199.523.463	20	3.032.128.754
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	persen	92,59	92,59	1.027.697.866	96,30	2.294.792.000	100,00	2.753.750.400	100,00	6.076.240.266
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	-	8,00	1.027.697.866	9,00	2.294.792.000	9,00	2.753.750.400	26	6.076.240.266
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						448.023.186.581		514.284.021.461		518.729.381.620		1.481.036.589.662
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Menuju Universal Health Coverage (UHC)	persen	90,36	96,00	377.378.634.882	96,20	441.944.145.720	96,50	445.961.819.772	96,50	1.265.284.600.374
		Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial	persen	48,15	92,59	38.785.522.105	96,29	38.994.014.105	100,00	38.904.014.105	100,00	116.683.550.315
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Obat dan BMHP di Fasilitas Kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang terdistribusi Obat dan BMHP	persen	100,00	100,00	38.785.522.105	100,00	38.994.014.105	100,00	38.904.014.105	100,00	116.683.550.315
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	dokumen	27,00	27,00	499.524.105	27,00	708.016.105	27,00	618.016.105	27,00	1.825.556.315
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket	27,00	27,00	38.285.998.000	1,00	38.285.998.000	1,00	38.285.998.000	1,00	114.857.994.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Jaminan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Jawa Barat	Persentase kab/kota yang mencapai UHC	persen	55,56	55,56	377.378.634.882	74,07	441.944.145.720	92,59	445.961.819.772	92,59	1.265.284.600.374



Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	12,00	12,00	377.378.634.882	12,00	441.944.145.720	12,00	445.961.819.772	36	1.265.284.600.374
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kapasitas Tenaga Kesehatan di Provinsi Jawa Barat	Persentase Kabupaten/Kota memenuhi standar ketenagaan minimal di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah	persen	-	55,10	31.689.916.694	55,20	33.075.236.100	55,20	33.575.236.100	55,20	98.340.388.894
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terlaksananya Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Wilayah Kab/Kota Minimal 80% yang memiliki Tenaga Kesehatan teregistrasi yang aktif bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan	persen	-	67,00	31.443.862.100	70,00	31.443.862.100	73,00	31.443.862.100	73,00	94.331.586.300
Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	orang	-	2.505,00	31.443.862.100	5.160	31.443.862.100	5.160	31.443.862.100	12.825	94.331.586.300
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang sesuai Anjab/ABK	persen	-		246.054.594	81,48	1.631.374.000	81,48	2.131.374.000	81,48	4.008.802.594
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	12,00	5,00	246.054.594	1,00	1.631.374.000	1,00	2.131.374.000	7,00	4.008.802.594
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Persentase sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Distributor Alat Kesehatan (DAK), Sarana Pedagang Besar Kosmetika (PBK), Sarana Pedagang Besar Obat Tradisional (PBOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) sesuai standar perizinan	persen	90,97	92,00	169.112.900	93,00	270.625.536	94,00	288.311.643	94,00	728.050.079
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Distributor Alat Kesehatan (DAK), Sarana Pedagang Besar Kosmetika (PBK) dan Sarana Pedagang Besar Obat Tradisional (PBOT)	Persentase sarana PBF Cabang, cabang DAK, PBK dan PBOT yang diawasi dan dikendalikan dalam rangka penerbitan dan tindaklanjut perizinan	persen	-	70,00	156.030.800	80,00	211.756.086	90,00	222.901.143	90,00	590.688.029
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	sarana	90,00	90,00	156.030.800	95,00	211.756.086	100,00	222.901.143	100,00	590.688.029
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan sarana UKOT dalam rangka penerbitan dan tindaklanjut penerbitan perizinan UKOT	Persentase sarana UKOT yang diawasi dan dikendalikan dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut perizinan	persen	-	90,00	13.082.100	95,00	58.869.450	100,00	65.410.500	100,00	137.362.050





Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	sarana	35,00	35,00	13.082.100	45,00	58.869.450	50,00	65.410.500	50,00	137.362.050
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN						6.210.175.749		6.833.909.368		7.517.300.305		19.504.366.422
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Kabupaten/Kota dengan fasilitas kesehatan sesuai standar	persen	67,24	67,24	6.210.175.749	73,50	6.833.909.368	79,77	7.517.300.305	79,77	19.504.366.422
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				-		3.352.062.469		3.687.268.716		4.055.995.587		11.095.326.772
Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	unit	1	1	3.352.062.469	1	3.687.268.716	1	4.055.995.587	1	11.095.326.772
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Kab/Kota Dengan Tata kelola FKTP Sesuai Standar		-		2.020.768.520		2.222.845.372		2.445.129.909		6.688.743.801
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	dokumen	30	30	111.993.600	30	123.192.960	30	135.512.256	90	370.698.816
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	dokumen	71	71	288.158.240	71	316.974.064	71	348.671.470	213	953.803.774
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit	23	23	1.620.616.680	25	1.782.678.348	27	1.960.946.183	27	5.364.241.211
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar		-		837.344.760		923.795.280		1.016.174.808		1.720.295.848
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan	Tersedianya Rumah Sakit Kelas	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan	unit	90	90	106.534.000	90	117.187.400	90	128.906.140	270	352.627.540



Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya										
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	unit	27	27	342.370.800	27	376.607.880	27	414.268.668	27	1.133.247.348
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	unit	2.954	2.954	388.439.960	3.083	430.000.000	3.083	473.000.000	3.083	234.420.960
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT						4.305.392.325		22.209.696.540		24.482.226.540		50.997.315.405
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentasi kab/kota yang menurun angka prevalensi penyakit menular dan tidak menular	persen	84,86	85	4.305.392.325	89,00	22.209.696.540	93	24.482.226.540		50.997.315.405
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penatalaksanaan Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, Obat-obatan dan Pemenuhan SPM	Persentase kab/kota yang menerapkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	persen	91,01	92,60	3.959.097.100	96,30	11.919.696.540	100,00	13.295.976.540		29.174.770.180
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis akibat bencana dan/atau potensi bencana	persen	100,00	100,00	311.764.535	100,00	2.300.000.000	100,00	2.550.000.000		5.161.764.535
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	persen	91,01	92,60	34.530.690	96,30	50.000.000	100,00	70.000.000		154.530.690
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	orang	-	148.661	311.764.535	162.661	2.300.000.000	178.661	2.550.000.000	489.983	5.161.764.535
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	-	1.280	34.530.690	1.280	50.000.000	1.280	70.000.000	3.840	154.530.690
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	-	25	3.508.447.280	27	2.490.000.000	27	2.990.000.000	27	8.988.447.280



Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	dokumen	1	6	136.904.920		989.696.540		1.139.726.540	6	2.266.328.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	-	12	313.744.900	12	500.000.000	12	600.000.000	36	1.413.744.900
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penatalaksanaan Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, Obat-obatan dan Pemenuhan SPM	Persentase kab/kota yang menerapkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	persen	91,01	92,60	-	96,30	7.940.000.000	100,00	8.566.250.000		16.506.250.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	dokumen	N/A	-	-	0	2.000.000.000	0	2.500.000.000	-	4.500.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	dokumen	N/A	-	-		475.000.000		546.250.000	-	1.021.250.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	dokumen	N/A	-	-		850.000.000		1.200.000.000	-	2.050.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	dokumen	N/A	N/A	-	27 K/K	550.000.000	27 K/K	750.000.000	27 K/K	1.300.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Cacingan yang	dokumen	N/A	N/A	-	27 K/K	650.000.000	27 K/K	800.000.000	27 K/K	1.450.000.000



Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia Sesuai Standar	Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	dokumen	N/A	-	-	165.000.000	120.000.000	-	285.000.000		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	dokumen	N/A	-	-	700.000.000	900.000.000	-	1.600.000.000		
Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit tidak Menular Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar	dokumen	N/A	-	-	1.500.000.000	1.750.000.000	-	3.250.000.000		
Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	dokumen	N/A	-	-	1.050.000.000	-	-	1.050.000.000		
SEKRETARIAT						732.163.787.849	805.121.403.421	885.374.780.552		2.422.659.971.822		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya administrasi penunjang di Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	poin	86,90	87,20	731.685.157.969	87,50	804.594.910.553	87,80	884.795.638.397	87,80	2.421.075.706.919
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan pada Dinas Kesehatan	persen	100	100	2.587.632.119	100	2.587.632.119	100	2.587.632.119	100	7.762.896.357
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	2	1.890.853.739	2	1.890.853.739	2	1.890.853.739	6	5.672.561.217
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	2	208.259.150	2	208.259.150	2	208.259.150	6	624.777.450
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	3	60.882.765	3	60.882.765	3	60.882.765	9	182.648.295
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	laporan	12	5	427.636.465	5	427.636.465	5	427.636.465	15	1.282.909.395



Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD										
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan Dinas Kesehatan	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	persen	100	100	706.123.311.493	100	776.735.642.642	100	854.409.206.907	100	2.337.268.161.042
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	1433	600	704.876.311.493	600	775.363.942.642	600	852.900.336.907	600	2.333.140.591.042
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	12	12	258.000.000	12	283.800.000	12	312.180.000	36	853.980.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	344.000.000	1	378.400.000	1	416.240.000	3	1.138.640.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	12	645.000.000	12	709.500.000	12	780.450.000	36	2.134.950.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian Daerah Dinas Kesehatan	Persentase Administrasi Kepegawaian Dinas Terpenuhi	persen	100	100	2.798.079.840	100	3.077.887.824	100	3.385.676.606	100	9.261.644.270
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	12	26	1.948.639.840	26	2.143.503.824	26	2.357.854.206	78	6.449.997.870
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	4	300	500.000.000	300	550.000.000	300	605.000.000	900	1.655.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0	55	349.440.000	55	384.384.000	55	422.822.400	165	1.156.646.400
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Kesehatan	Persentase Administrasi Umum di Dinas Kesehatan Yang Terpenuhi	persen	100	100	5.710.425.000	100	6.281.467.500	100	6.909.614.250	100	18.901.506.750
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	10	620.000.000	10	682.000.000	10	750.200.000	30	2.052.200.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	3	3	650.000.000	3	715.000.000	3	786.500.000	9	2.151.500.000



Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	100	4.440.425.000	100	4.884.467.500	100	5.372.914.250	300	14.697.806.750
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang di Dinas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	persen	100	100	7.368.270.517	100	8.105.097.568	100	8.915.607.325	100	24.388.975.410
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	5	2.662.000.000	5	2.928.200.000	5	3.221.020.000	15	8.811.220.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	10	901.242.517	10	991.366.768	10	1.090.503.445	30	2.983.112.730
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	-	10	3.805.028.000	10	4.185.530.800	10	4.604.083.880	30	12.594.642.680
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	persen	100	100	5.810.000.000	100	6.391.000.000	100	7.030.100.000	100	19.231.100.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	-	112	760.000.000	112	836.000.000	112	919.600.000	336	2.515.600.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	-	6	2.600.000.000	6	2.860.000.000	6	3.146.000.000	18	8.606.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	-	327	2.450.000.000	327	2.695.000.000	327	2.964.500.000	981	8.109.500.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah di Dinas Kesehatan	Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	-	80	1.287.439.000	85	1.416.182.900	90	1.557.801.190	90	4.261.423.090
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	-	100	1.287.439.000	100	1.416.182.900	100	1.557.801.190	300	4.261.423.090
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya pemanfaatan Sistem Informasi dalam pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kesehatan di Jawa Barat	persen	100	100	478.629.880	100	526.492.868	100	579.142.155	100	1.584.264.903
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya pemanfaatan Sistem Informasi dalam pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan	Persentase Dokumen Data dan Informasi Kesehatan	persen	100	100	478.629.880	100	526.492.868	100	579.142.155	100	1.584.264.903





Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	1	1	478.629.880	1	526.492.868	1	579.142.155	3	1.584.264.903
UOBK RSUD AL IHSAN						453.342.266.345		713.953.426.928		725.093.213.910		1.892.388.907.183
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas tatakelola Rumah Sakit Pada RS Al-Ihsan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RSUD Al Ihsan	poin	97,08	97,10	425.721.649.000	97,15	483.907.977.881	97,20	508.103.376.775	97,20	1.417.733.003.656
Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	persen	100,00	100,00	425.721.649.000	100,00	483.907.977.881	100,00	508.103.376.775	100,00	1.417.733.003.656
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM terhadap Pelayanan RSUD Al Ihsan	poin	97,10	97,10	425.721.649.000	97,15	483.907.977.881	97,20	508.103.376.775	97,20	1.417.733.003.656
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas pelayanan pada RSUD Al Ihsan	Indikator Nasional Mutu di RSUD Al Ihsan	persen	69,00	69,00	27.620.617.345	77,00	230.045.449.047	85,00	216.989.837.135	85,00	474.655.903.527
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan medik di RSUD Al Ihsan	INM Bidang Medis tercapai sesuai target	persen	-	75,00	13.599.195.905	75,00	196.025.449.047	100,00	181.268.837.135	100,00	390.893.482.087
Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Bangunan/gedung pelayanan kesehatan	Jumlah bangunan / Gedung pelayanan kesehatan yang di bangun	Gedung	-	-	-	1,00	165.115.732.782	1,00	146.595.635.508	1,00	311.711.368.290
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	unit/paket	1,00	1,00	13.599.195.905	1,00	30.909.716.265	1,00	34.673.201.627	3	79.182.113.797
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang di RSUD Al Ihsan	INM Bidang Penunjang tercapai sesuai target	persen	-	75,00	14.021.421.440	75,00	34.020.000.000	100,00	35.721.000.000	100,00	83.762.421.440
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1,00	1,00	14.021.421.440	1,00	34.020.000.000	1,00	35.721.000.000	3	83.762.421.440
UPTD RS JIWA						66.056.179.813		138.700.000.000		155.050.000.000		359.806.179.813
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan, keuangan dan umum pada UOBK RS Jiwa	IKM atas pelayanan perencanaan, keuangan dan umum RS Jiwa	poin	90,85	87,00	56.414.822.053	89,00	84.200.000.000	90,00	96.050.000.000	90,00	236.664.822.053
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum RS Jiwa	Persentase Administrasi Umum di RS Jiwa Yang Terpenuhi	persen	100	100	650.000.000	100	700.000.000	100	1.050.000.000	100	2.400.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12,00	12,00	150.000.000	12,00	200.000.000	12,00	250.000.000	36,00	600.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12,00	12,00	500.000.000	12,00	500.000.000	12,00	800.000.000	36,00	1.800.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	-	80	4.995.000.000	85	-	90	-	90	4.995.000.000



Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	1,00	1,00	4.995.000.000	-	-	-	-	1,00	4.995.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	persen	100	100	12.350.000.000	100	13.500.000.000	100	15.000.000.000	100	40.850.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12,00	12,00	12.350.000.000	12,00	13.500.000.000	12,00	15.000.000.000	36,00	40.850.000.000
Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	persen	100,00	100,00	38.419.822.053	100,00	70.000.000.000	100,00	80.000.000.000	100,00	188.419.822.053
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1,00	1,00	38.419.822.053	1,00	70.000.000.000	1,00	80.000.000.000	1,00	188.419.822.053
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas pelayanan medik, keperawatan dan penunjang pada UOBK RS Jiwa	IKM atas pelayanan medik, keperawatan dan penunjang RS Jiwa	poin	90,85	87,00	6.500.000.000	89,00	50.500.000.000	90,00	54.500.000.000	90,00	111.500.000.000
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada RS Jiwa	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan medik sesuai standar	persen	100,00	100,00	500.000.000	100,00	40.500.000.000	100,00	42.500.000.000	100,00	83.500.000.000
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	unit	-	-	-	1,00	30.000.000.000	1,00	30.000.000.000	1,00	60.000.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	unit	-	-	-	40,00	4.000.000.000	40,00	5.000.000.000	80,00	9.000.000.000
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	unit	12,00	12,00	500.000.000	12,00	6.500.000.000	12,00	7.500.000.000	36,00	14.500.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang medik sesuai standar	Persentase Pasien Yang Terlayani Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	100,00	100,00	6.000.000.000	100,00	8.000.000.000	100,00	9.000.000.000	100,00	23.000.000.000
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	12,00	12,00	6.000.000.000	12,00	8.000.000.000	12,00	9.000.000.000	36,00	23.000.000.000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Meningkatnya pemanfaatan Sistem Informasi dalam pelayanan Kesehatan di RS Jiwa	Persentase Dokumen Data dan Informasi Kesehatan	persen	100,00	-	-	100,00	2.000.000.000	100,00	3.000.000.000	100,00	5.000.000.000
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	-	-	-	12,00	2.000.000.000	12,00	3.000.000.000	12,00	5.000.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, pengembangan sdm, pendidikan, penelitian dan pengembangan	IKM pelayanan kepegawaian, pengembangan sdm, pendidikan, penelitian dan pengembangan RS Jiwa	poin	90,85	87,00	3.141.357.760	89,00	4.000.000.000	90,00	4.500.000.000	90,00	11.641.357.760



Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Tersusunnya rencana kebutuhan pegawai	Jumlah rencana Kebutuhan Pegawai yang tersusun	dokumen	1,00	1,00	3.141.357.760	1,00	4.000.000.000	1,00	4.500.000.000	1,00	11.641.357.760
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang	12,00	12,00	3.141.357.760	9,00	4.000.000.000	9,00	4.500.000.000	30,00	11.641.357.760
UOBK RSUD JAMPANGKULON						100.246.153.751		358.060.263.026		382.212.039.328		840.518.456.105
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan Administrasi umum dan Keuangan Pada RSUD Jampangkulon	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100,00	100,00	67.443.318.987	100,00	80.389.863.026	100,00	86.128.849.328	100,00	233.962.031.341
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah di RSUD Jampangkulon	Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	-	80	1.634.352.600	85	1.500.000.000	90	-	90	3.134.352.600
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	-	2,00	1.634.352.600	4,00	1.500.000.000	-	-	6,00	3.134.352.600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang di RSUD Jampangkulon	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	persen	100	100	-	100	6.500.000.000	100	6.500.000.000	100	13.000.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas dan Akuntabel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	-	-	-	1,00	6.500.000.000	1,00	6.500.000.000	2,00	13.000.000.000
Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	persen	100,00	100,00	65.808.966.387	100,00	72.389.863.026	100,00	79.628.849.328	100,00	217.827.678.741
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1,00	1,00	65.808.966.387	1,00	72.389.863.026	1,00	79.628.849.328	1,00	217.827.678.741
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan pada RSUD Jampangkulon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RSUD Jampangkulon	persen	83,92	82,75	17.802.834.764	83,55	259.670.400.000	85,41	274.883.190.000	85,41	552.356.424.764
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada RSUD Jampangkulon	Persentase Pasien Yang Terlayani Pelayanan Medik dan Asuhan keperawatan Sesuai Standar	persen	-	74,90	14.802.834.764	81,60	256.370.400.000	90,55	271.283.190.000	90,55	542.456.424.764
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	unit	-	50,00	12.585.834.764	150,00	30.000.000.000	200,00	40.000.000.000	400,00	82.585.834.764
Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka	unit	1,00	1,00	2.217.000.000	4,00	193.327.500.000	6,00	194.936.000.000	11,00	390.480.500.000



Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit Tersedianya Jumlah Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket	-	-	-	48,00	33.042.900.000	50,00	36.347.190.000	98,00	69.390.090.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang medik sesuai standar	Persentase Pasien Yang Terlayani Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	-	100,00	2.000.000.000	100,00	1.800.000.000	100,00	1.600.000.000	100,00	5.400.000.000
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	-	350,00	2.000.000.000	180,00	1.800.000.000	160,00	1.600.000.000	690,00	5.400.000.000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Meningkatnya pemanfaatan Sistem Informasi dalam pelayanan Kesehatan di RSUD Jampangkulon	Persentase layanan yang memanfaatkan sistem informasi	persen	-	100,00	1.000.000.000	100,00	1.500.000.000	100,00	2.000.000.000	100,00	4.500.000.000
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	-	85,00	1.000.000.000	12,00	1.500.000.000	12,00	2.000.000.000	109,00	4.500.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD Jampang Kulon yang Memenuhi Standar		-	-	-	15.000.000.000	-	18.000.000.000	-	21.200.000.000	-	54.200.000.000
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan RSUD Jampangkulon	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	orang	-	-	15.000.000.000	-	17.000.000.000	-	20.000.000.000	-	52.000.000.000
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang	-	32,00	15.000.000.000	36,00	17.000.000.000	41,00	20.000.000.000	109,00	52.000.000.000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang meningkat kapasitasnya	persen	-	-	-	-	1.000.000.000	-	1.200.000.000	-	2.200.000.000
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya Jumlah Dokumen Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	dokumen	-	-	-	60,00	1.000.000.000	60,00	1.200.000.000	120,00	2.200.000.000
UOBK RSUD PAMEUNGPEUK						74.196.224.646		256.954.246.458		209.768.905.522		540.919.376.626
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian dan umum pada RSUD Pameungpeuk	SPM lingkup umum dan kepegawaian tercapai sesuai standar	persen	100,00	100,00	44.566.174.646	100,00	53.224.196.458	100,00	60.382.218.271	100,00	158.172.589.375



Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum RSUD Pameungpeuk	Persentase Administrasi Umum di Dinas Kesehatan Yang Terpenuhi	persen	100	100	-	100	3.000.000.000	100	5.000.000.000	100	8.000.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	-	-	-	1,00	3.000.000.000	1,00	5.000.000.000	2,00	8.000.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah di RSUD Pameungpeuk	Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	-	80	1.000.000.000	85	1.500.000.000	90	1.500.000.000	90	4.000.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	-	1,00	1.000.000.000	3,00	1.500.000.000	3,00	1.500.000.000	7,00	4.000.000.000
Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	persen	100,00	100,00	43.566.174.646	100,00	48.724.196.458	100,00	53.882.218.271	100,00	146.172.589.375
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1,00	1,00	43.566.174.646	1,00	48.724.196.458	1,00	53.882.218.271	3,00	146.172.589.375
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada UOBK RSUD Pameungpeuk	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RSUD Pameungpeuk	poin	83,21	86,95	14.500.000.000	87,00	188.600.000.000	87,05	134.256.637.251	87,05	337.356.637.251
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada UOBK RSUD Pameungpeuk	Persentase Pasien Yang Terlayani Pelayanan Medik dan Asuhan keperawatan Sesuai Standar	persen	-	100,00	8.500.000.000	100,00	181.000.000.000	100,00	126.556.637.251	100,00	316.056.637.251
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Gedung Poli-Ranap di RSUD Pameungpeuk	Jumlah Gedung Poliranap	unit	-	-	-	1,00	150.000.000.000	-	-	1,00	150.000.000.000
	Tersedianya Gedung IGD di RSUD Pameungpeuk	Jumlah Gedung IGD	Unit	-	-	-	-	-	1,00	94.556.637.251	1,00	94.556.637.251
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	unit	-	51,00	8.500.000.000	1,00	25.000.000.000	1,00	25.000.000.000	53,00	58.500.000.000
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP dan Obat-obatan yang Disediakan	paket	-	-	-	2,00	6.000.000.000	2,00	7.000.000.000	4,00	13.000.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang medik sesuai standar	Persentase Pasien Yang Terlayani Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	-	100,00	6.000.000.000	100,00	7.600.000.000	100,00	7.700.000.000	300,00	21.300.000.000
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1,00	1,00	6.000.000.000	1,00	7.000.000.000	1,00	7.000.000.000	3,00	20.000.000.000
Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD Pameungpeuk	Terlaksananya Pengelolaan Kesehatan Lingkungan (Sampah Medis dan Non Medis , Uji Kesehatan Lingkungan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	-	-	-	3,00	600.000.000	3,00	700.000.000	6,00	1.300.000.000



Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD Pameungpeuk yang Memenuhi Standar		-	-	-	15.130.050.000	-	15.130.050.000	-	15.130.050.000	-	45.390.150.000
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	-	-	-	15.130.050.000	-	15.130.050.000	-	15.130.050.000	-	45.390.150.000
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang	268,00	268,00	15.130.050.000	268,00	15.130.050.000	268,00	15.130.050.000	268,00	45.390.150.000
UPTD RS PARU PROVINSI						69.245.171.586		68.097.306.820		79.947.306.820		113.833.590.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas pelayanan Umum dan Keuangan pada RS Paru	SPM lingkup umum dan keuangan RS Paru tercapai sesuai standar	persen	100	100	22.851.059.026	100	34.652.567.700	100	45.952.567.700	100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang di RS Paru	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	persen	100	100	7.025.000.000	100	9.785.160.000	100	10.085.160.000	100	26.895.320.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	2.025.000.000	12	3.000.000.000	12	3.300.000.000	36	8.325.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	5.000.000.000	133	6.785.160.000	133	6.785.160.000	278	18.570.320.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah di RS Paru	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	persen	100	100	1.611.263.229	100	4.867.407.700	100	5.867.407.700	100	12.346.078.629
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	-	20	867.407.700	20	867.407.700	20	867.407.700	60	2.602.223.100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	-	10	743.855.529	2	4.000.000.000	2	5.000.000.000	14	9.743.855.529
Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	persen	100	100	14.214.795.797	15	20.000.000.000	20	30.000.000.000	100	64.214.795.797
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	14.214.795.797	1	20.000.000.000	1	30.000.000.000		64.214.795.797



Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada UOBK RS Paru	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RS Paru	persen	90,13	90,20	32.300.000.000	90,30	21.900.000.000	90,40	22.450.000.000	90,40	76.650.000.000
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada RS Paru	Terpenuhinya alat dan proses pelayanan sesuai dengan standar	persen	-	100	31.500.000.000	100	20.400.000.000	100	20.450.000.000	100	72.350.000.000
Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Bangunan/gedung pelayanan kesehatan	Gedung pelayanan kesehatan yang di bangun	unit	-	-	-	1	400.000.000	1	450.000.000	1	850.000.000
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	unit	-	1	31.500.000.000	1	20.000.000.000	1	20.000.000.000	1	71.500.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang medik sesuai standar	Terpenuhinya prasarana, sarana, obat, BHP , Reagen dan makan minum untuk menunjang penegakan diagnostik dan perawatan pasien	persen	-	100	800.000.000	100	1.500.000.000	100	2.000.000.000	100	4.300.000.000
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen		12	800.000.000	12	1.500.000.000	12	2.000.000.000	36	4.300.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di RS Paru yang Memenuhi Standar	Persentase pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di RS Paru	persen	-	100	14.094.112.560	100	11.544.739.120	100	11.544.739.120	100	37.183.590.800
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di RS Paru yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	persen	-	100	14.094.112.560	100	11.544.739.120	100	11.544.739.120	100	37.183.590.800
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang	-	90	14.094.112.560	59	11.544.739.120	59	11.544.739.120	208	37.183.590.800
UPTD RSUD KESEHATAN KERJA						42.941.154.620		147.630.950.495		86.967.140.594		277.539.245.709
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas pelayanan Umum dan Keuangan pada RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Pemenuhan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian dan Keuangan di RSUD Kesehatan Kerja	persen	100	100	21.769.041.907	100	27.205.950.495	100	30.342.140.594	100	79.317.132.996
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan pada RSUD Kesehatan Kerja	persen	100	100	100.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	450.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	5	100.000.000	5	150.000.000	5	200.000.000	15	450.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Laporan Keuangan RSUD Kesehatan Kerja Yang Disusun Tepat Waktu	persen	100	100	50.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	225.000.000



Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	12	12	50.000.000	12	75.000.000	12	100.000.000	36	225.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Administrasi umum RSUD Kesehatan Kerja yang terpenuhi	persen	100	100	2.379.982.611	100	2.450.000.000	100	2.525.000.000	100	7.354.982.611
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	-	10	524.322.414	10	550.000.000	10	600.000.000	30	1.674.322.414
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	-	5	285.794.236	5	300.000.000	5	325.000.000	15	910.794.236
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	-	5	835.541.749	5	850.000.000	5	850.000.000	15	2.535.541.749
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	-	12	734.324.212	12	750.000.000	12	750.000.000	36	2.234.324.212
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang di RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	persen	100	100	5.664.019.039	100	5.800.000.000	100	5.800.000.000	100	17.264.019.039
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	36	2.400.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	4.864.019.039	12	5.000.000.000	12	5.000.000.000	36	14.864.019.039
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah di RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	persen	100	100	2.266.575.000	100	3.275.000.000	100	3.275.000.000	100	8.816.575.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	-	16	266.575.000	16	275.000.000	16	275.000.000	48	816.575.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	-	1	1.000.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	3	4.000.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	-	167	1.000.000.000	167	1.500.000.000	167	1.500.000.000	501	4.000.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah di RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	-	80	2.817.002.850	85	900.000.000	90	975.000.000	90	4.692.002.850
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	-	1	1.977.909.000		-		-	1	1.977.909.000



Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	-	1	313.182.700	4	350.000.000	4	375.000.000	9	1.038.182.700
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	-	1	525.911.150	85	550.000.000	90	600.000.000	176	1.675.911.150
Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	persen	100	100	8.491.462.407	100	14.555.950.495	100	17.467.140.594	100	40.514.553.496
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	1	8.491.462.407	1	14.555.950.495	1	17.467.140.594	3	40.514.553.496
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada RSUD Kesehatan Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Kesehatan Kerja	persen	83,5	85	10.874.499.798	85	110.925.000.000	87	47.025.000.000	87	168.824.499.798
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar	SPM lingkup pelayanan sesuai standar	persen	-	83	7.080.483.213	85	108.500.000.000	87	44.500.000.000		160.080.483.213
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	unit	-	22	3.569.687.850	50	4.000.000.000	50	4.000.000.000	122	11.569.687.850
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit	-	429	500.000.000	250	1.000.000.000	275	1.500.000.000	954	3.000.000.000
Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	unit	-	-	-	1	100.000.000.000	1	35.000.000.000	1	135.000.000.000
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket	-	23	3.010.795.363	23	3.500.000.000	23	4.000.000.000	69	10.510.795.363
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang medik sesuai standar	SPM penunjang medik dan non medik sesuai standar	persen	-	80	3.443.227.085	85	2.075.000.000	90	2.175.000.000		7.693.227.085
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	-	5	1.972.277.085	4	525.000.000	4	550.000.000	13	3.047.277.085
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	3	1.050.000.000



Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	3	2.400.000.000
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	dokumen	1	2	370.950.000	2	400.000.000	2	425.000.000	6	1.195.950.000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya pemanfaatan Sistem Informasi dalam pelayanan Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Layanan Yang Memanfaatkan Sistem Informasi	persen	100	100	350.789.500	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.050.789.500
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	1	1	350.789.500	1	350.000.000	1	350.000.000	3	1.050.789.500
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan pengetahuan di RSUD Kesehatan Kerja	persen	53,85	60	10.297.612.915	70	9.500.000.000	80	9.600.000.000	80	29.397.612.915
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	persen		100	9.828.612.915	100	9.000.000.000	100	9.000.000.000	100	27.828.612.915
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang	-	110	9.828.612.915	110	9.000.000.000	110	9.000.000.000	330	27.828.612.915
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase Tenaga Kesehatan yang meningkat kapasitasnya	persen		53,53	469.000.000	58,82	500.000.000	70,59	600.000.000	70,59	1.569.000.000
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	orang	-	91	469.000.000	100	500.000.000	120	600.000.000	311	1.569.000.000
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN						29.009.697.109		32.417.786.282		35.659.564.910		97.087.048.302
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang UPTD Labkes	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang UPTD Labkes	persen	100	100	9.362.447.109	100	10.591.070.382	100	11.650.177.420	100	31.603.694.912
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum di UPTD Laboratorium Kesehatan	Persentase Administrasi Umum yang Terpenuhi		100	100	3.050.848.843	100	3.445.186.329	10	3.789.704.962	100	10.285.740.134
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	-	2	63.514.000	2	69.865.400	2	76.851.940	6	210.231.340
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	-	4	265.385.000	4	249.221.390	4	274.143.529	12	788.749.919
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	-	3	196.062.400	3	161.831.890	3	178.015.079	9	535.909.369
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	-	4	386.170.000	4	424.787.000	4	467.265.700	12	1.278.222.700



Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	221.927.000	12	241.276.200	12	265.403.820	36	728.607.020
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	1.917.790.443	12	2.298.204.449	12	2.528.024.894	36	6.744.019.786
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang di UPTD Laboratorium Kesehatan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	persen	100	100	5.998.258.266	100	6.794.282.803	100	7.473.711.083	100	20.266.252.152
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	1.928.327.772	12	2.298.204.449	12	2.528.024.894	36	6.754.557.115
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	4.069.930.494	12	4.496.078.354	12	4.945.686.189	36	13.511.695.037
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah di UPTD Laboratorium Kesehatan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	persen	100	100	313.340.000	100	351.601.250	100	386.761.375	100	1.051.702.625
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	-	14	313.340.000	14	351.601.250	14	386.761.375	42	1.051.702.625
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan UPTD Labkes	persen	92,4	92,50	19.647.250.000	92,70	21.826.715.900	92,90	24.009.387.490	92,90	65.483.353.390
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar	SPM lingkup pelayanan sesuai standar				19.163.113.000		21.288.318.700		23.417.150.570		63.868.582.270
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	1	1	53.100.000	1	130.350.000	1	143.385.000	3	326.835.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	unit	1	1	25.550.000	1	165.059.400	1	181.565.340	3	372.174.740
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di	paket	-	5	19.084.463.000	4	20.992.909.300	4	23.092.200.230	13	63.169.572.530



Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
	Minuman di Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Kesehatan yang disediakan										
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan					484.137.000		538.397.200		592.236.920	1.614.771.120	
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	unit	1	1	484.137.000	1	538.397.200	1	592.236.920	31.614.771.120	
UPTD PELATIHAN KESEHATAN						7.435.506.057		8.123.037.932		9.416.582.219	24.975.126.208	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang di UPELKES	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	persen	100	100	6.169.364.077	100	6.814.479.602	100	7.589.857.955	10020.573.701.635	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Administrasi Kepegawaian UPTD Pelatihan Kesehatan Terpenuhi	persen	100	100	193.296.000	100	212.625.600	100	233.888.160	100639.809.760	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	-	50	193.296.000	55	212.625.600	60	233.888.160	165639.809.760	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Administrasi Umum yang Terpenuhi	persen	100	100	822.803.960	100	905.084.356	100	995.592.792	1002.723.481.108	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	-	1	42.774.516	1	47.051.968	1	51.757.164	3141.583.648	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	-	2	155.458.275	2	171.004.103	2	188.104.513	6514.566.890	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	-	5	278.738.216	5	306.612.038	5	337.273.241	15922.623.495	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	-	4	140.150.953	4	154.166.048	4	169.582.653	12463.899.654	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	205.682.000	1	226.250.200	1	248.875.220	3680.807.420	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang di UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	persen	100	100	3.036.246.670	100	3.339.871.337	100	3.673.858.471	10010.049.976.478	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1	627.300.913	1	690.031.004	1	759.034.105	32.076.366.022	



Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1	2.408.945.757	1	2.649.840.333	1	2.914.824.366	3	7.973.610.456
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah di UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	persen	100	100	1.929.156.662	100	2.122.072.328	100	2.334.279.561	100	6.385.508.551
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	-	7	234.821.900	7	258.304.090	7	284.134.499	21	777.260.489
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	1.489.643.802	1	1.638.608.182	1	1.802.469.000	3	4.930.720.985
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	204.690.960	1	225.160.056	1	247.676.062	3	677.527.078
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah di UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	-	-	187.860.785	85	234.825.981	90	352.238.972	90	774.925.738
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	-	1	187.860.785	1	234.825.981	1	352.238.972	3	774.925.738
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pelatihan Tenaga Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan UPELKES	persen	88,15	88,50	424.163.500	88,70	466.579.850	88,90	513.237.835	89,00	1.403.981.185
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan UPTD Pelatihan Kesehatan		unit	1	1	424.163.500	1	466.579.850	1	513.237.835	1	1.403.981.185
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	unit	1	1	424.163.500	1	466.579.850	1	513.237.835	3	1.403.981.185
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki Sertifikat Diklat dengan SKP	persen	-	100	841.978.480	100	841.978.480	100	1.313.486.429	100	2.997.443.389



Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan daerah provinsi yang meningkat kapasitasnya	persen	-	-	841.978.480	-	841.978.480	-	1.313.486.429	-	2.997.443.389
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	orang	-	270	841.978.480	360	841.978.480	450	1.313.486.429	1.080	2.997.443.389



6.2 Pendanaan

Sumber pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berasal dari APBD (PAD dan BLUD) dan APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik, Dana Dekonsentrasi, Dana DBHCHT, Dana Insentif Daerah (DID), serta sumber pendanaan sah lainnya.

Berkenaan dengan sumber pendanaan BLUD, UOBK RS Dinas Kesehatan yang telah berstatus RS dengan manajemen keuangan BLUD sebanyak 6 (enam) RS yaitu RSUD Al Ihsan, RSUD Pameungpeuk, RSUD Jampangkulon, RS Paru Sidawangi, RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, dan RSUD Kesehatan Kerja serta UPTD Laboratorium Kesehatan. Estimasi pendapatan BLUD tahun 2024-2026 dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) masing-masing rumah sakit dan UPTD dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 6.3 Estimasi Pendapatan – SiLPA Rumah Sakit Provinsi dan Labkes

No	Rumah Sakit	Estimasi Pendapatan			Estimasi SiLPA			Ket.
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	RSUD Al Ihsan	425.721.649.000	447.007.731.450	469.358.118.002	25.435.121.551	N/A	N/A	
2	RSUD Jampangkulon	65.808.966.387	72.398.863.026	79.628.849.328	11.583.754.537	12.742.129.990	14.016.342.989	
3	RSUD Pameungpeuk	43.566.174.646	48.724.196.458	53.882.218.271	12.633.590.085,69	15.162.560.191	18.390.011.088	
4	RS Jiwa	38.419.822.053	46.110.635.256	55.925.587.959	12.633.590.085,688	15.162.560.191	18.390.011.088	
5	RS Paru	14.214.795.797	14.923.485.584	15.667.609.861	21.237.924.350	N/A	N/A	
6	RSUD KK	12.129.958.746	14.555.950.495	17.46.7140.594	N/A	N/A	N/A	
7	Labkes							Proses BLUD

Selain itu pada tahun anggaran 2024-2026, terdapat potensi sumber pembiayaan lain dari Sukuk/Obligasi Syariah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan 3 (tiga) UPTD Rumah Sakit Dinas Kesehatan, yaitu RSUD Al Ihsan, RSUD Pameungpeuk dan RS Paru Sidawangi. dengan masing masing perkiraan pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 6.4 Pembiayaan pada RS Provinsi

No	Rumah Sakit	Jumlah Pembiayaan
1	RSUD Al Ihsan	Rp. 196.025.449.046,93,-
2	RSUD Pameungpeuk	Rp. 140.000.000.000,-
3	RS Paru Sidawangi	Rp. 140.000.000.000,-
Total		Rp. 476.025.449.046,93,-

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan dukungan dan Kerjasama dari berbagai pelaku pembangunan Kesehatan di Jawa Barat. Oleh karenanya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah mengidentifikasi potensi Kerjasama yang akan dilaksanakan di tahun 2024-2026, diantaranya adalah sebagai berikut:



Tabel 6.5 Mitra Kerja Sama Strategis

No.	Outcome Yang Diharapkan di RPJMD	Mitra Kerja Sama Strategis					
		Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pemerintah Daerah	Pihak Ketiga (Swasta, lembaga nonprofit, yayasan)	Institusi Pendidikan	Pemerintah Luar Negeri & Lembaga Luar Negeri	Bentuk Kegiatan Kerja Sama
I.	URUSAN KESEHATAN						
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular						
a.	Program : Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rumah Sakit Tk. II 03.05.11 Dustira	Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat	BNNP			Penguatan Lembaga Rehabilitasi Narkoba
	Outcome : Terjalannya Kerja Sama		Dinas Kesehatan Kab. Bandung	KPM Dewi Sartika, Panti Rehabilitasi Sosial Napza Yayasan Sekar Mawar			Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Fakir Miskin Diluar Tanggungan PBI
			Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Kab. Tasikmalaya	Panti Rehabilitasi Sosial Napza Yayasan Sekar Mawar			Rujukan Pasien Napza Dan Edukasi
			Dinas Kesehatan Kab. Tasikmalaya				Rujukan Pelayanan Kesehatan
				Panti Rehabilitasi Sosial Napza Yayasan Sekar Mawar			
			RSUD Cibabat Cimahi	BPJS Kesehatan			Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat						
a.	Program : Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular			BNNP			PENGENDALIAN HAMA / PEST CONTROL
	Outcome : Terjalannya Kerja Sama			BPJS Kesehatan			REHABILITASI NARKOTIKA
				LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL POLITIK (LPPSP)			Pelayanan Program Jaminan Kesehatan
				Pt. Advo Matriks Indonesia			Telekonsultasi Kjol
				Dkm Nurul Wasiat			Pemulasaran Jenazah
				BANK BJB			Sewa Ruangan Atm
				BANK BJB			Sewa Payment Point
				RS IMMANUEL			Rujukan Pelayanan Kesehatan Dan Penunjang
				BJB SYARIAH			Kerjasama Penggunaan Produk Dan Jasa Layanan Perbankan
				LABORATORIUM KLINIK PRAMITA			Rujukan Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium
		RSHS					Rujukan Parsial/Penunjang
		PMI					Permintaan Komponen Darah
		RSJ SOEROJO MAGELANG					Sister Hospital
		SENTRA ABIYOSO					LAYANAN KESEHATAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
			Dinkes Kabupaten Bandung Barat				Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Fakis Miskin Diluar Jkn Dan Bpjs
			Rskj Soeprapto				Sister Hospital
			Rs Cibabat				Rujukan Parsial/Penunjang
			Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang				Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Sumedang
			Labkesda Jawa Barat				Rujukan Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Dan Laboratorium Kualitas Lingkungan
							PENDAMPINGAN EBLUD
					Institute Teknologi Bandung		Pelayanan Kesehatan Jiwa
					Kedokteran Maranatha		Tridharma Perguruan Tinggi
					Kedokteran Ukrida		Tridharma Perguruan Tinggi
					Kedokteran Unisba		Tridharma Perguruan Tinggi
					Kedokteran Untirta		Tridharma Perguruan Tinggi



No.	Outcome Yang Diharapkan di RPJMD	Mitra Kerja Sama Strategis					
		Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pemerintah Daerah	Pihak Ketiga (Swasta, lembaga nonprofit, yayasan)	Institusi Pendidikan	Pemerintah Luar Negeri & Lembaga Luar Negeri	Bentuk Kegiatan Kerja Sama
					Kedokteran Unpad		Tridharma Perguruan Tinggi
					Kedokteran Spesialis Kejiwaan Unpad		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Unpad		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Poltek Tni Au Ciumbuleuit		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Stikes Budi Luhur		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Aisyiyah Bandung		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Akper Efarina		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Fitkes Unjani		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta Iii		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Universitas Advent Indonesia		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Akper Dustira		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Stikes Permata Nusantara		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Politeknik Negeri Indramayu		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Ypib Majalengka		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Stikep Ppni		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Politeknik Negeri Subang		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bandung		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Stikes Cirebon		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Stikes Dharma Husada Bandung		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Stikes Kota Sukabumi		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Stikes Rajawali		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Stikes Santo Borromeus		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Stikes Syedza Saintika Padang		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Universitas Bale Bandung		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Universitas Bhakti Kencana (Ubk)		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Universitas Galuh Ciamis		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Poltekkes Tasikmalaya		Tridharma Perguruan Tinggi
					Keperawatan Stikes Sebelas April Sumedang		Tridharma Perguruan Tinggi
					Poltekkes Kesling Bandung		Tridharma Perguruan Tinggi
					Psikologi Maranatha		Tridharma Perguruan Tinggi
					Psikologi Uksw		Tridharma Perguruan Tinggi
					Psikologi Unisba		Tridharma Perguruan Tinggi
					Universitas Persada Yai		Tridharma Perguruan Tinggi
					Unjani		Tridharma Perguruan Tinggi
					Farmasi Poltekkes Kemenkes Bandung		Tridharma Perguruan Tinggi
					Fmipa Unisba		Tridharma Perguruan Tinggi
					Psikologi Maranatha		Tridharma Perguruan Tinggi
					Psikologi Uksw		Tridharma Perguruan Tinggi
					Psikologi Unisba		Tridharma Perguruan Tinggi



No.		Outcome Yang Diharapkan di RPJMD	Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pemerintah Daerah	Pihak Ketiga (Swasta, lembaga nonprofit, yayasan)	Mitra Kerja Sama Strategis	Institusi Pendidikan	Pemerintah Luar Negeri & Lembaga Luar Negeri	Bentuk Kegiatan Kerja Sama
							Universitas Persada Yai		Tridharma Perguruan Tinggi
							Unjani		Tridharma Perguruan Tinggi
							Farmasi Poltekkes Kemenkes Bandung		Tridharma Perguruan Tinggi
							Fmipa Unisba		Tridharma Perguruan Tinggi
Kesehatan Masyarakat									
		Program : Meningkatkan kualitas Kesehatan lingkungan	Kementerian Kesehatan Dit. Penyehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan Kab/Kota	Water.org	UPI			Penguatan kelembagaan dan program
		Outcome : terjalannya Kerjasama dalam pengawasan kualitas lingkungan		Bappeda	luwash	ITB			
				Setda	HAKLI	Poltekkes			
				Disperkmi					
				DLH					
				DPMD					
		Program : Meningkatkan perilaku hidup sehat	Kementerian Kesehatan Dit. Usia Produktif dan Lansia	Disorda	Yayasan senam jantung sehat	Pusat Kajian K3 UI			Penguatan kelembagaan dan program
		Outcome : terjalannya Kerjasama dalam peningkatan Kesehatan usia produktif dan aktivitas fisik	BKOM	Disnaker	FORMI	UNPAD			
				Dinas Koperasi dan UMKM	KORMI	IPB			
				Disperindag	PAKKI	UI			
					Pordoki	FPOK UPI			
					PDSKO				
					Pewatusi		NI, THECHILDREN, GAIN		Penyuluhan Gizi PMT dan Gizi seimbang
		Program : Meningkatkan Kesehatan Keluarga	Direktorat Gizi dan KIA Kemkes RI , Direktorat Kesehatan Keluarga Kemkes RI	BAPPEDA, DISDIK, DINSOS, DPMD, DP3AKB, BKKBN, DKPP,SETDA KESRA	Organisasai Profesi IDI,IDAI,IBI, PPNI, PERSAGI	UNPAD, POLTEKKES, IPB,UI			
		Outcome : Terjalinya kerjasama dalam peningkatan kesehatan keluarga			PRSSNI, BAZNAS,NU				
Sumber Daya Kesehatan									
		Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	BPJS Kesehatan	BPKAD, BAPENDA, BAPPEDA,	Baznas Provinsi dan Kab/Kota, Filantropi kesehatan : kitabisa.com, dompet dhuafa, rumah zakat, dll				penganggaran, data kapasitas fiskal, penganggaran, pelayanan kesehatan, DTKS, data penduduk, data statistik penduduk, pembiayaan bagi peserta menunggak JKN, pembiayaan kesehatan lain di luar JKN, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan
		Outcome : Terjalannya kerja sama		Dinas Kesehatan kab/kota,					
				Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BPS,					
				RS Rujukan					
RSUD Kesehatan Kerja									
a.		Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat					Pembiayaan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).
		Outcome : - Terjalannya kerjasama dengan berbagai lembaga untuk pemenuhan upaya			Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan				Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan.



No.	Outcome Yang Diharapkan di RPJMD	Mitra Kerja Sama Strategis					
		Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pemerintah Daerah	Pihak Ketiga (Swasta, lembaga nonprofit, yayasan)	Institusi Pendidikan	Pemerintah Luar Negeri & Lembaga Luar Negeri	Bentuk Kegiatan Kerja Sama
	kesehatan - Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RSUD KESEHATAN KERJA						
				BPJS Ketenagakerjaan			Pelaksanaan pelayanan kesehatan program jaminan kecelakaan kerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
				PT Taspen (PERSERO)			Perawatan peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja PT Taspen (PERSERO).
				PT Prodia Widyahusada Tbk.			Rujukan pelayanan pemeriksaan kesehatan.
				PT Prodia OHI International			Rujukan pelayanan pemeriksaan biomonitoring.
				Klinik Pratama Padjadjaran Jatinangor			Pelayanan kesehatan rujukan.
				Faskes Dokter Praktik Pribadi			Pelayanan kesehatan rujukan.
				Klinik Hasna Medika			Pelayanan kesehatan rujukan.
				Unit Transfusi Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung			Pelayanan bidang transfusi darah.
				Palang Merah Indonesia Kota Bandung			Pelayanan darah khusus non-bank darah.
				Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan (LPKL)			Pekerjaan pengujian laboratorium kesehtan lingkungan rsud kesehatan kerja
				Perumda Tirtawening Kota Bandung			
				Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi Dan Lingkungan			Evaluasi TLD BARC beta gamma
a.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
	Outcome : Terjalinnya Kerja Sama		Dinas Kesehatan :				
			Kab. Cirebon				Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Fakir Miskin diluar Tanggungan PBI
			Kota Cirebon				
			Kab. Majalengka				
			Kab. Indramayu				
			Kab. Kuningan				
			Dinas Sosial Kab Cirebon				
			RSUD Gunung Jati				Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Lab Kultur TB
			RSUD Arjawinangun				
			RSUD Waled				Rujukan Pelayanan Kesehatan
			Perumda Farmasi Kota Cirebon				
				RS Wijaya Kusumah Kuningan			Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Lab Kultur TB
				LSM Terjang			Pelayanan kesehatan untuk pendampingan pasien TB RO
				RS Permata Kuningan			Pelayanan Kesehatan Pelayanan TB RO dan Lab Kultur TB
				Perkumpulan Pakungwati Cirebon Sebaya			Pelayanan HIV dan AIDS untuk Pendampingan Pasien Klinik Tulip
				PT Administrasi Medis			Terkait pembayaran Asuransi
							Pelayanan Kesehatan (pemeriksaan MCU untuk Karyawan)
				Inti Bios Laboratorium			Pemeriksaan TCM
					SMA Kab Cirebon		Sosialisasi Klinik berhenti merokok
II.	URUSAN PENDIDIKAN						
	Program Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi						
	RSUD Al Ihsan						



No.	Outcome Yang Diharapkan di RPJMD	Mitra Kerja Sama Strategis					
		Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pemerintah Daerah	Pihak Ketiga (Swasta, lembaga nonprofit, yayasan)	Institusi Pendidikan	Pemerintah Luar Negeri & Lembaga Luar Negeri	Bentuk Kegiatan Kerja Sama
a.	Program Studi:				Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung		Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa barat
	Kedokteran (<i>Co-assistant</i>)						
	Keperawatan						
	Kebidanan						
	Apoteker						
	Fisioterapi						
	Ilmu Teknologi Kesehatan						
					Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran		Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa barat
					Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Padjajaran		Pendidikan, penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan Gigi dan Mulut di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat
					Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dustira		Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa barat
					Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Ciamis		Praktek Kerja lapangan dan Penelitian di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat
					Universitas Langlang Buana		Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
					Universitas Jendral Achmad Yani		Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa barat
		Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung					Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa barat
					Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan (STikep) PPNI		Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa barat
					Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rumah Sakit Dustira		Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa barat
		Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasikmalaya					Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa barat
					Politeknik TEDC Bandung		Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa barat
					Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Luhur Cimahi		Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa barat
					RS Pendidikan RSUD Al Ihsan dan Fak Kedokteran UNISBA serta RS Al Islam Bandung		Tripartit Rumah Sakit Satelit dalam Rangka Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Dokter Fak Kedokteran UNISBA di RS Al ISLAM Bandung
III.	URUSAN PELAYANAN PUBLIK						
RSUD Al Ihsan							
a.	Program Pelayanan Publik:		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung				Pelayanan penerbitan AKTA KELAHIRAN, AKTA KEMATIAN, Kartu Indentitas Anak dan Kartu Keluarga Baru bagi Pasien RSUD Al Ihsan
			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Jawa Barat				Mendukung RSUD Al Ihsan Menuju Hospital Tourism



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menetapkan indikator kinerja program (*outcome*) untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Indikator kinerja daerah memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi, sebagai berikut:





Tabel 7.1 Indikator Kinerja Program/Outcome Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING												
MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT												
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT						7.646.052.571		9.963.915.392		11.417.746.420		29.027.714.383
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase kab/kota dengan target IKS> 60%	persen	-	3,70	5.163.200.460	7,40	6.019.520.506	11,11	6.714.472.557	11,11	17.897.193.523
		Persentase Kab/kota yang melaksanakan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan	persen	-	18,00	622.151.840	30,00	650.000.000	40,00	750.000.000	40,00	2.022.151.840
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase kab/kota yang melakukan pengelolaan/penerapan indikator keluarga sehat 100 persen	persen	100,00	100,00	5.023.200.460	100,00	5.669.520.506	100,00	6.364.472.557	100,00	17.057.193.523
		Persentase Kab Kota yang melaksanakan program STBM	persen	-	37,00	622.151.840	44,00	650.000.000	55,00	750.000.000	55,00	2.022.151.840
		Persentase Jemaah Haji Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Haji	persen	100,00	100,00	140.000.000	100,00	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00	840.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan rumah tangga ber-PHBS >80%	persen	37,00	70,00	1.027.697.866	75,00	2.294.792.000	80,00	2.753.750.400	80,00	6.076.240.266
		Persentase Kerjasama/kemitraan Tingkat Daerah Provinsi (Evaluasi Pelaksanaan dan Implementasi PKS-nya)	persen	-	5,00	833.002.405	10,00	999.602.886	15,00	1.199.523.463	15,00	3.032.128.754
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	persen	92,59	92,59	1.027.697.866	96,30	2.294.792.000	100,00	2.753.750.400	100,00	6.076.240.266
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						448.023.186.581		514.284.021.461		518.729.381.620		1.481.036.589.662
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Menuju Universal Health Coverage (UHC)	persen	90,36	96,00	377.378.634.882	96,20	441.944.145.720	96,50	445.961.819.772	96,50	1.265.284.600.374
		Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial	persen	48,15	92,59	38.785.522.105	96,29	38.994.014.105	100,00	38.904.014.105	100,00	116.683.550.315
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Obat dan BMHP di Fasilitas Kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang terdistribusi Obat dan BMHP	persen	100,00	100,00	38.785.522.105	100,00	38.994.014.105	100,00	38.904.014.105	100,00	116.683.550.315
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Jaminan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Jawa Barat	Persentase kab/kota yang mencapai UHC	persen	55,56	55,56	377.378.634.882	74,07	441.944.145.720	92,59	445.961.819.772	92,59	1.265.284.600.374
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kapasitas Tenaga Kesehatan di Provinsi Jawa Barat	Persentase Kabupaten/Kota memenuhi standar ketenagaan minimal di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah	persen	-	55,10	31.689.916.694	55,20	33.075.236.100	55,20	33.575.236.100	55,20	98.340.388.894





Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terlaksananya Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Wilayah Kab/Kota Minimal 80% yang memiliki Tenaga Kesehatan teregistrasi yang aktif bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan	persen	-	67,00	31.443.862.100	70,00	31.443.862.100	73,00	31.443.862.100	73,00	94.331.586.300
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang sesuai Anjab/ABK	persen	-		246.054.594	81,48	1.631.374.000	81,48	2.131.374.000	81,48	4.008.802.594
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Persentase sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Distributor Alat Kesehatan (DAK), Sarana Pedagang Besar Kosmetika (PBK), Sarana Pedagang Besar Obat Tradisional (PBOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) sesuai standar perizinan	persen	90,97	92,00	169.112.900	93,00	270.625.536	94,00	288.311.643	94,00	728.050.079
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Distributor Alat Kesehatan (DAK), Sarana Pedagang Besar Kosmetika (PBK) dan Sarana Pedagang Besar Obat Tradisional (PBOT)	Persentase sarana PBF Cabang, cabang DAK, PBK dan PBOT yang diawasi dan dikendalikan dalam rangka penerbitan dan tindaklanjut perizinan	persen	-	70,00	156.030.800	80,00	211.756.086	90,00	222.901.143	90,00	590.688.029
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan sarana UKOT dalam rangka penerbitan dan tindaklanjut penerbitan perizinan UKOT	Persentase sarana UKOT yang diawasi dan dikendalikan dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut perizinan	persen	-	90,00	13.082.100	95,00	58.869.450	100,00	65.410.500	100,00	137.362.050
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN						6.210.175.749		6.833.909.368		7.517.300.305		19.504.366.422
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Kabupaten/Kota dengan fasilitas kesehatan sesuai standar	persen	67,24	67,24	6.210.175.749	73,50	6.833.909.368	79,77	7.517.300.305	79,77	19.504.366.422
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				-		3.352.062.469		3.687.268.716		4.055.995.587		11.095.326.772
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Kab/Kota Dengan Tata kelola FKTP Sesuai Standar		-		2.020.768.520		2.222.845.372		2.445.129.909		6.688.743.801
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar		-		837.344.760		923.795.280		1.016.174.808		1.720.295.848
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT						4.305.392.325		22.209.696.540		24.482.226.540		50.997.315.405





Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentasi kab/kota yang menurun angka prevalensi penyakit menular dan tidak menular	persen	84,86	85	4.305.392.325	89,00	22.209.696.540	93	24.482.226.540		50.997.315.405
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penatalaksanaan Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, Obat-obatan dan Pemenuhan SPM	Persentase kab/kota yang menerapkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	persen	91,01	92,60	3.959.097.100	96,30	11.919.696.540	100,00	13.295.976.540		29.174.770.180
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis akibat bencana dan/atau potensi bencana	persen	100,00	100,00	311.764.535	100,00	2.300.000.000	100,00	2.550.000.000		5.161.764.535
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	persen	91,01	92,60	34.530.690	96,30	50.000.000	100,00	70.000.000		154.530.690
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penatalaksanaan Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, Obat-obatan dan Pemenuhan SPM	Persentase kab/kota yang menerapkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	persen	91,01	92,60	-	96,30	7.940.000.000	100,00	8.566.250.000		16.506.250.000
SEKRETARIAT						732.163.787.849		805.121.403.421		885.374.780.552		2.422.659.971.822
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya administrasi penunjang di Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	poin	86,90	87,20	731.685.157.969	87,50	804.594.910.553	87,80	884.795.638.397	87,80	2.421.075.706.919
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan pada Dinas Kesehatan	persen	100	100	2.587.632.119	100	2.587.632.119	100	2.587.632.119	100	7.762.896.357
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan Dinas Kesehatan	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	persen	100	100	706.123.311.493	100	776.735.642.642	100	854.409.206.907	100	2.337.268.161.042
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian Daerah Dinas Kesehatan	Persentase Administrasi Kepegawaian Dinas Terpenuhi	persen	100	100	2.798.079.840	100	3.077.887.824	100	3.385.676.606	100	9.261.644.270
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Kesehatan	Persentase Administrasi Umum di Dinas Kesehatan Yang Terpenuhi	persen	100	100	5.710.425.000	100	6.281.467.500	100	6.909.614.250	100	18.901.506.750
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang di Dinas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	persen	100	100	7.368.270.517	100	8.105.097.568	100	8.915.607.325	100	24.388.975.410
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	persen	100	100	5.810.000.000	100	6.391.000.000	100	7.030.100.000	100	19.231.100.000





Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah di Dinas Kesehatan	Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	-	80	1.287.439.000	85	1.416.182.900	90	1.557.801.190	90	4.261.423.090
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya pemanfaatan Sistem Informasi dalam pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kesehatan di Jawa Barat	persen	100	100	478.629.880	100	526.492.868	100	579.142.155	100	1.584.264.903
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya pemanfaatan Sistem Informasi dalam pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan	Persentase Dokumen Data dan Informasi Kesehatan	persen	100	100	478.629.880	100	526.492.868	100	579.142.155	100	1.584.264.903
UOBK RSUD AL IHSAN						453.342.266.345		713.953.426.928		725.093.213.910		1.892.388.907.183
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas tatakelola Rumah Sakit Pada RS Al-Ihsan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RSUD Al Ihsan	poin	97,08	97,10	425.721.649.000	97,15	483.907.977.881	97,20	508.103.376.775	97,20	1.417.733.003.656
Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	persen	100,00	100,00	425.721.649.000	100,00	483.907.977.881	100,00	508.103.376.775	100,00	1.417.733.003.656
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas pelayanan pada RSUD Al Ihsan	Indikator Nasional Mutu di RSUD Al Ihsan	persen	69,00	69,00	27.620.617.345	77,00	230.045.449.047	85,00	216.989.837.135	85,00	474.655.903.527
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan medik di RSUD Al Ihsan	INM Bidang Medis tercapai sesuai target	persen	-	75,00	13.599.195.905	75,00	196.025.449.047	100,00	181.268.837.135	100,00	390.893.482.087
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang di RSUD Al Ihsan	INM Bidang Penunjang tercapai sesuai target	persen	-	75,00	14.021.421.440	75,00	34.020.000.000	100,00	35.721.000.000	100,00	83.762.421.440
UPTD RS JIWA						66.056.179.813		138.700.000.000		155.050.000.000		359.806.179.813
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan, keuangan dan umum pada UOBK RS Jiwa	IKM atas pelayanan perencanaan, keuangan dan umum RS Jiwa	poin	90,85	87,00	56.414.822.053	89,00	84.200.000.000	90,00	96.050.000.000	90,00	236.664.822.053
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum RS Jiwa	Persentase Administrasi Umum di RS Jiwa Yang Terpenuhi	persen	100	100	650.000.000	100	700.000.000	100	1.050.000.000	100	2.400.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	-	80	4.995.000.000	85	-	90	-	90	4.995.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	persen	100	100	12.350.000.000	100	13.500.000.000	100	15.000.000.000	100	40.850.000.000
Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	persen	100,00	100,00	38.419.822.053	100,00	70.000.000.000	100,00	80.000.000.000	100,00	188.419.822.053





Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas pelayanan medik, keperawatan dan penunjang pada UOBK RS Jiwa	IKM atas pelayanan medik, keperawatan dan penunjang RS Jiwa	poin	90,85	87,00	6.500.000.000	89,00	50.500.000.000	90,00	54.500.000.000	90,00	111.500.000.000
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada RS Jiwa	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan medik sesuai standar	persen	100,00	100,00	500.000.000	100,00	40.500.000.000	100,00	42.500.000.000	100,00	83.500.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang medik sesuai standar	Persentase Pasien Yang Terlayani Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	100,00	100,00	6.000.000.000	100,00	8.000.000.000	100,00	9.000.000.000		23.000.000.000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Meningkatnya pemanfaatan Sistem Informasi dalam pelayanan Kesehatan di RS Jiwa	Persentase Dokumen Data dan Informasi Kesehatan	persen	100,00	-	-	100,00	2.000.000.000	100,00	3.000.000.000	100,00	5.000.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, pengembangan sdm, pendidikan, penelitian dan pengembangan	IKM pelayanan kepegawaian, pengembangan sdm, pendidikan, penelitian dan pengembangan RS Jiwa	poin	90,85	87,00	3.141.357.760	89,00	4.000.000.000	90,00	4.500.000.000	90,00	11.641.357.760
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Tersusunnya rencana kebutuhan pegawai	Jumlah rencana Kebutuhan Pegawai yang tersusun	dokumen	1,00	1,00	3.141.357.760	1,00	4.000.000.000	1,00	4.500.000.000	1,00	11.641.357.760
UOBK RSUD JAMPANGKULON						100.246.153.751		358.060.263.026		382.212.039.328		840.518.456.105
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan Administrasi umum dan Keuangan Pada RSUD Jampangkulon	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100,00	100,00	67.443.318.987	100,00	80.389.863.026	100,00	86.128.849.328	100,00	233.962.031.341
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah di RSUD Jampangkulon	Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	-	80	1.634.352.600	85	1.500.000.000	90	-	90	3.134.352.600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang di RSUD Jampangkulon	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	persen	100	100	-	100	6.500.000.000	100	6.500.000.000	100	13.000.000.000
Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	persen	100,00	100,00	65.808.966.387	100,00	72.389.863.026	100,00	79.628.849.328	100,00	217.827.678.741
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan pada RSUD Jampangkulon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RSUD Jampangkulon	persen	83,92	82,75	17.802.834.764	83,55	259.670.400.000	85,41	274.883.190.000	85,41	552.356.424.764
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada RSUD Jampangkulon	Persentase Pasien Yang Terlayani Pelayanan Medik dan Asuhan keperawatan Sesuai Standar	persen	-	74,90	14.802.834.764	81,60	256.370.400.000	90,55	271.283.190.000	90,55	542.456.424.764
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang medik sesuai standar	Persentase Pasien Yang Terlayani Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	-	100,00	2.000.000.000	100,00	1.800.000.000	100,00	1.600.000.000	100,00	5.400.000.000





Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Meningkatnya pemanfaatan Sistem Informasi dalam pelayanan Kesehatan di RSUD Jampangkulon	Persentase layanan yang memanfaatkan sistem informasi	persen	-	100,00	1.000.000.000	100,00	1.500.000.000	100,00	2.000.000.000	100,00	4.500.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD Jampang Kulon yang Memenuhi Standar		-	-	-	15.000.000.000	-	18.000.000.000	-	21.200.000.000	-	54.200.000.000
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan RSUD Jampangkulon	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	orang	-	-	15.000.000.000	-	17.000.000.000	-	20.000.000.000	-	52.000.000.000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang meningkat kapasitasnya	persen	-	-	-	-	1.000.000.000	-	1.200.000.000	-	2.200.000.000
UOBK RSUD PAMEUNGPEUK						74.196.224.646		256.954.246.458		209.768.905.522		540.919.376.626
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian dan umum pada RSUD Pameungpeuk	SPM lingkup umum dan kepegawaian tercapai sesuai standar	persen	100,00	100,00	44.566.174.646	100,00	53.224.196.458	100,00	60.382.218.271	100,00	158.172.589.375
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum RSUD Pameungpeuk	Persentase Administrasi Umum di Dinas Kesehatan Yang Terpenuhi	persen	100	100	-	100	3.000.000.000	100	5.000.000.000	100	8.000.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah di RSUD Pameungpeuk	Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	-	80	1.000.000.000	85	1.500.000.000	90	1.500.000.000	90	4.000.000.000
Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	persen	100,00	100,00	43.566.174.646	100,00	48.724.196.458	100,00	53.882.218.271	100,00	146.172.589.375
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada UOBK RSUD Pameungpeuk	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RSUD Pameungpeuk	poin	83,21	86,95	14.500.000.000	87,00	188.600.000.000	87,05	134.256.637.251	87,05	337.356.637.251
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada UOBK RSUD Pameungpeuk	Persentase Pasien Yang Terlayani Pelayanan Medik dan Asuhan keperawatan Sesuai Standar	persen		100,00	8.500.000.000	100,00	181.000.000.000	100,00	126.556.637.251	100,00	316.056.637.251
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang medik sesuai standar	Persentase Pasien Yang Terlayani Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	-	100,00	6.000.000.000	100,00	7.600.000.000	100,00	7.700.000.000	300,00	21.300.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD		-	-	-	15.130.050.000	-	15.130.050.000	-	15.130.050.000	-	45.390.150.000





Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
	Pameungpeuk yang Memenuhi Standar											
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	-	-	-	15.130.050.000	-	15.130.050.000	-	15.130.050.000	-	45.390.150.000
UPTD RS PARU PROVINSI						69.245.171.586		68.097.306.820		79.947.306.820		113.833.590.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas pelayanan Umum dan Keuangan pada RS Paru	SPM lingkup umum dan keuangan RS Paru tercapai sesuai standar	persen	100	100	22.851.059.026	100	34.652.567.700	100	45.952.567.700	100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang di RS Paru	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	persen	100	100	7.025.000.000	100	9.785.160.000	100	10.085.160.000	100	26.895.320.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah di RS Paru	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	persen	100	100	1.611.263.229	100	4.867.407.700	100	5.867.407.700	100	12.346.078.629
Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	persen	100	100	14.214.795.797	15	20.000.000.000	20	30.000.000.000	100	64.214.795.797
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada UOBK RS Paru	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RS Paru	persen	90,13	90,20	32.300.000.000	90,30	21.900.000.000	90,40	22.450.000.000	90,40	76.650.000.000
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada RS Paru	Terpenuhinya alat dan proses pelayanan sesuai dengan standar	persen	-	100	31.500.000.000	100	20.400.000.000	100	20.450.000.000	100	72.350.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang medik sesuai standar	Terpenuhinya prasarana, sarana, obat, BHP , Reagen dan makan minum untuk menunjang penegakan diagnostik dan perawatan pasien	persen	-	100	800.000.000	100	1.500.000.000	100	2.000.000.000	100	4.300.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di RS Paru yang Memenuhi Standar	Persentase pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di RS Paru	persen	-	100	14.094.112.560	100	11.544.739.120	100	11.544.739.120	100	37.183.590.800
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di RS Paru yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	persen	-	100	14.094.112.560	100	11.544.739.120	100	11.544.739.120	100	37.183.590.800
UPTD RSUD KESEHATAN KERJA						42.941.154.620		147.630.950.495		86.967.140.594		277.539.245.709
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas pelayanan Umum dan Keuangan pada RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Pemenuhan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian dan Keuangan di RSUD Kesehatan Kerja	persen	100	100	21.769.041.907	100	27.205.950.495	100	30.342.140.594	100	79.317.132.996



Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan pada RSUD Kesehatan Kerja	persen	100	100	100.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	450.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Laporan Keuangan RSUD Kesehatan Kerja Yang Disusun Tepat Waktu	persen	100	100	50.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	225.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Administrasi umum RSUD Kesehatan Kerja yang terpenuhi	persen	100	100	2.379.982.611	100	2.450.000.000	100	2.525.000.000	100	7.354.982.611
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang di RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	persen	100	100	5.664.019.039	100	5.800.000.000	100	5.800.000.000	100	17.264.019.039
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah di RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	persen	100	100	2.266.575.000	100	3.275.000.000	100	3.275.000.000	100	8.816.575.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah di RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	-	80	2.817.002.850	85	900.000.000	90	975.000.000	90	4.692.002.850
Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	persen	100	100	8.491.462.407	100	14.555.950.495	100	17.467.140.594	100	40.514.553.496
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada RSUD Kesehatan Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Kesehatan Kerja	persen	83,5	85	10.874.499.798	85	110.925.000.000	87	47.025.000.000	87	168.824.499.798
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar	SPM lingkup pelayanan sesuai standar	persen	-	83	7.080.483.213	85	108.500.000.000	87	44.500.000.000		160.080.483.213
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang medik sesuai standar	SPM penunjang medik dan non medik sesuai standar	persen	-	80	3.443.227.085	85	2.075.000.000	90	2.175.000.000		7.693.227.085
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya pemanfaatan Sistem Informasi dalam pelayanan Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Layanan Yang Memanfaatkan Sistem Informasi	persen	100	100	350.789.500	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.050.789.500
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan pengetahuan di RSUD Kesehatan Kerja	persen	53,85	60	10.297.612.915	70	9.500.000.000	80	9.600.000.000	80	29.397.612.915
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	persen		100	9.828.612.915	100	9.000.000.000	100	9.000.000.000	100	27.828.612.915





Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase Tenaga Kesehatan yang meningkat kapasitasnya	persen		53,53	469.000.000	58,82	500.000.000	70,59	600.000.000	70,59	1.569.000.000
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN						29.009.697.109		32.417.786.282		35.659.564.910		97.087.048.302
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang UPTD Labkes	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang UPTD Labkes	persen	100	100	9.362.447.109	100	10.591.070.382	100	11.650.177.420	100	31.603.694.912
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum di UPTD Laboratorium Kesehatan	Persentase Administrasi Umum yang Terpenuhi		100	100	3.050.848.843	100	3.445.186.329	10	3.789.704.962	100	10.285.740.134
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang di UPTD Laboratorium Kesehatan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	persen	100	100	5.998.258.266	100	6.794.282.803	100	7.473.711.083	100	20.266.252.152
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah di UPTD Laboratorium Kesehatan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	persen	100	100	313.340.000	100	351.601.250	100	386.761.375	100	1.051.702.625
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan UPTD Labkes	persen	92,4	92,50	19.647.250.000	92,70	21.826.715.900	92,90	24.009.387.490	92,90	65.483.353.390
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar	SPM lingkup pelayanan sesuai standar				19.163.113.000		21.288.318.700		23.417.150.570		63.868.582.270
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan					484.137.000		538.397.200		592.236.920		1.614.771.120
UPTD PELATIHAN KESEHATAN						7.435.506.057		8.123.037.932		9.416.582.219		24.975.126.208
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang di UPELKES	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	persen	100	100	6.169.364.077	100	6.814.479.602	100	7.589.857.955	100	20.573.701.635
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Administrasi Kepegawaian UPTD Pelatihan Kesehatan Terpenuhi	persen	100	100	193.296.000	100	212.625.600	100	233.888.160	100	639.809.760
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Administrasi Umum yang Terpenuhi	persen	100	100	822.803.960	100	905.084.356	100	995.592.792	100	2.723.481.108
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang di UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	persen	100	100	3.036.246.670	100	3.339.871.337	100	3.673.858.471	100	10.049.976.478



Nomenklatur Program Provinsi (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah di UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	persen	100	100	1.929.156.662	100	2.122.072.328	100	2.334.279.561	100	6.385.508.551
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah di UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	-	-	187.860.785	85	234.825.981	90	352.238.972	90	774.925.738
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pelatihan Tenaga Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan UPELKES	persen	88,15	88,50	424.163.500	88,70	466.579.850	88,90	513.237.835	89,00	1.403.981.185
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan UPTD Pelatihan Kesehatan		unit	1	1	424.163.500	1	466.579.850	1	513.237.835	1	1.403.981.185
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki Sertifikat Diklat dengan SKP	persen	-	100	841.978.480	100	841.978.480	100	1.313.486.429	100	2.997.443.389
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan daerah provinsi yang meningkat kapasitasnya	persen	-	-	841.978.480	-	841.978.480	-	1.313.486.429	-	2.997.443.389

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 memiliki tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Kedudukan strategis Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menjadi acuan dasar bagi organisasi Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta menjalankan urusan kesehatan pemerintah daerah provinsi.

Rencana Strategis ini disusun untuk lebih memfokuskan pada memperkuat sistem kesehatan provinsi agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Jawa Barat. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan ini diharapkan akan dapat dijadikan sebagai acuan perencanaan program/kegiatan kesehatan di Provinsi Jawa Barat dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, kiranya rencana strategis ini dapat pula menjadi acuan bagi kabupaten/kota, termasuk pula stakeholders kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menjadikan pembangunan kesehatan sebagai upaya pemenuhan hak asasi setiap orang.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2026 serta sebagai pedoman dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas pelaksanaan kinerja tahunan sampai berakhirnya periode Renstra.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal :31 Mei 2023

PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT,



dr. R. NINA SUSANA DEWI, Sp.PK (K), M.Kes., MMRS
Pembina Utama Madya
NIP. 196212031988032001



Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat



@dinkesjabar



@dinkesjabarofficial



@dinkesjabar



DINKES PROV JABAR

**Jl. Pasteur No.25, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota
Bandung, Jawa Barat 40171q**